

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  
DALAM PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



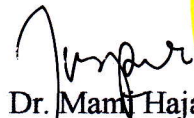
Oleh  
Firdaus Malaya Dewi  
NIM 10110241017

**PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN  
JURUSAN FILSAFAT DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
OKTOBER 2014**

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH” yang disusun oleh Firdaus Malaya Dewi, NIM 10110241017 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Pembimbing I



Dr. Mami Hajaroh, M. Pd.  
NIP 19680308192032001

Yogyakarta, Oktober 2014

Pembimbing II



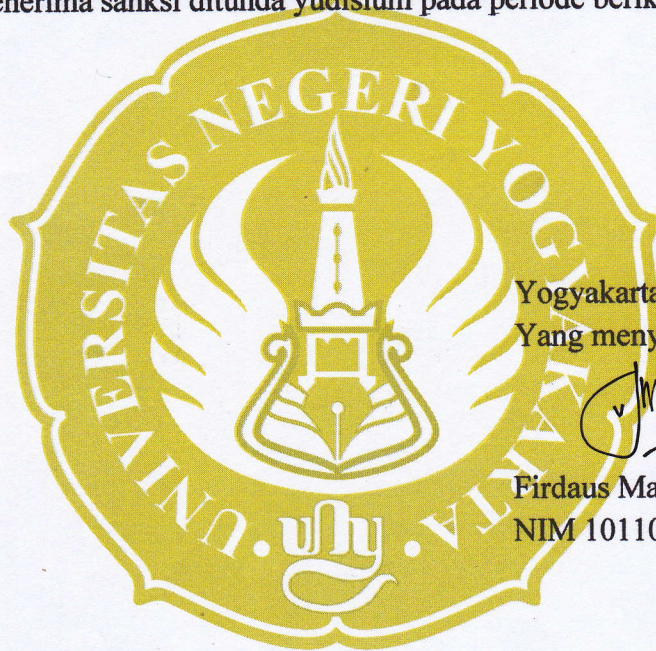
Petrus Priyoyuwono, M. Pd.  
NIP 195606221987021001



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang dituliskan atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

*Tanda tangan dosen penguji tertera lembar pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.*



Yogyakarta, 8 Oktober 2014

Yang menyatakan,

Firdaus Malaya Dewi



NIM 10110241017



## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH” yang disusun oleh Firdaus Malaya Dewi, NIM 10110241017 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 8 Oktober 2014 dan dinyatakan lulus.

### DEWAN PENGUJI

| Nama                       | Jabatan            | Tanda Tangan                                                                          | Tanggal    |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Petrus Priyoyuwono, M. Pd. | Ketua Penguji      |   | 14-10-2014 |
| Ariefa Efianingrum, M. Si. | Sekretaris Penguji |   | 14-10-2014 |
| Nur Djazifah ER., M. Si.   | Penguji Utama      |  | 13-10-2014 |

Yogyakarta, 24 OCT 2014  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan



Dr. Maryanto, M. Pd.  
NIP 19600902 198702 1 001



## **MOTTO**

Man Jadda Wa Jada, Man Shabara Zhafira

(Barang siapa bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan, barang siapa yang bersabar maka akan beruntung)

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(QS. Ar-Rad 13:11)

Sempurna itu bermula dari sebuah proses, tidak kemudian seketika itu terjadi.

(Penulis)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, dengan penuh rasa syukur yang tiada terkira saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah meridhoi perjuangan saya dalam menyelesaikan karya ini. Inilah sebuah karya yang saya harapkan dapat memberikan wacana dan pemikiran kritis bagi para mahasiswa kebijakan pendidikan ataupun khalayak lain mengenai kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan. Atas terselesaikannya karya ini dengan segenap hati saya ucapkan terima kasih dan saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orangtua saya tercinta, Bapak Nurul Ain dan Ibu Partini yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan secara moril, spiritual dan materil.
- ❖ Saudara-saudara saya, Yusef Ramadhona Firdaus, Ericha Mustika Firdaus, Amd., dan Muhamad Sulton Firdaus yang telah memberikan doa dan dukungan kepada saya.
- ❖ Almamater Universitas Negeri Yogyakarta.
- ❖ Agama, Nusa, dan Bangsa.



# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH**

Oleh  
Firdaus Malaya Dewi  
NIM 10110241017

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah yang meliputi implementasi PUG pada pendidikan formal dan non formal.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah staf bidang pendidikan non formal yang bertanggung jawab terkait gender, kepala sekolah dan koordinator PKBM pada pendidikan non formal, teknik penentuan subjek ditentukan dengan teknik *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan pencermatan dokumen. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dilihat dari proses implementasi kebijakan bahwa dari aspek komunikasi sudah jelas, sumber daya staf yang masih kurang, anggaran dan fasilitas sudah terpenuhi, disposisi yang baik dari pelaksana, penyebaran tanggung jawab jelas serta kerjasama yang baik antar pelaksana kebijakan. (2) Pelaksanaan sosialisasi PUG dilaksanakan pada jenjang pendidikan formal dan non formal oleh Dinas pendidikan Kabupaten Klaten sebagai langkah awal implementasi PUG yakni pada 13 sekolah/lembaga di Kecamatan Prambanan. Sosialisasi diberikan kepada kepala sekolah tiap jenjang pendidikan formal dan ketua PKBM pada pendidikan non formal. Dari kegiatan sosialisasi PUG ada peningkatan wawasan gender dan pengarusutamaannya. (3) Hambatan yang terdapat dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan adalah dana yang hanya bersumber dari APBD serta sumber daya staf yang kurang memadai. Pada sekolah, hambatan dalam implementasi PUG adalah alokasi waktu khusus dalam pelaksanaan kegiatan responsif gender, sehingga PUG dilaksanakan dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran.

Kata kunci: *gender, pengarusutamaan gender, pendidikan*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang sangat melimpah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesabaran dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah” ini dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan penyusunan skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Program Studi Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kelancaran pembuatan skripsi ini.
3. Ibu Y. Ch. Nany Sutarini, M. Si., selaku dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan nasehat, pengarahan, dukungan dan semangat selama ini.
4. Ibu Dr. Mami Hajaroh M. Pd., dan Bapak Petrus Priyoyuwono, M. Pd., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan nasehat,



pengarahan, dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sabar membimbing.

5. Bapak/Ibu seluruh Dosen Program Studi Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu selama studi.
6. Segenap Jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten yang telah memberikan kerjasama yang baik dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Tulus Harliyati S. Pd yang telah berkenan membimbing selama pencarian data serta dukungan dan motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi.
8. Kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan serta koordinator PKBM selaku nara sumber yang telah menyempatkan waktu guna menyempurnakan penyusunan skripsi.
9. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Nurul Ain dan Ibu Partini. Sampai dengan saat ini sebagai anak saya merasa belum bisa memberikan apa-apa dalam bentuk bakti maupun materi kepada kedua orang tua saya. Saya sangat berharap bahwa karya ini bisa memberikan kebanggaan tersendiri untuk kedua orang tua saya. Semoga kebaikan, ketulusan serta kasih sayang kedua orang tua saya dibalas dengan sebaik-baiknya balasan dari Allah SWT.
10. Saudara-saudara saya, Yusef Ramadhona Firdaus dan Ericha Mustika Firdaus, Amd., yang selalu mensupport saya dalam hal apapun, selalu memberi motivasi dan solusi dalam keadaan senang maupun susah. Dan untuk adik saya Muhamad Sulton Firdaus, maaf jika sampai saat ini saya belum bisa sepenuhnya menjadi teladan yang baik. Namun saya berharap agar semua

pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki ini bisa sedikit membantunya dalam mengarungi masa-masa pencarian jati diri.

11. Muhammad Sholeh Ridho, yang telah memberikan doa, semangat serta dukungan. Semoga apa yang menjadi tujuan bersama dipermudahkan oleh Allah SWT untuk menuju ridho-Nya.
12. Sahabat-sahabatku "*Power Rangers*", Ria Putri Palupijati, Nofita Shinta Dewi, Dita Purnama Sari, dan Rini Sundari. Menjadi sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri memiliki sahabat luar biasa seperti kalian. Dimana pun kita nanti semoga persahabatan yang terjalin akan senantiasa utuh hingga akhir nanti dan Allah selalu menyertai.
13. Keluarga besar HIMA KP FIP, terkhusus kepengurusan tahun 2011 dan tahun 2012 yang telah berjuang bersama-sama untuk belajar, berorganisasi, bersosialisasi dan mendewasakan diri.
14. Keluarga besar UKMF Penelitian REALITY (*Research And Learning Community*) FIP UNY. Mas Isdiyono dan Mbak Novi Maisaroh yang selalu memotivasi dan menginspirasi serta kepengurusan tahun 2011 dan 2012 yang luar biasa berdikari.
15. Teman-teman seperjuanganku Kebijakan Pendidikan Angkatan 2010 yang telah memberikan keceriaan, semangat dan rangkaian cerita dalam masa perkuliahan.

Semoga budi baik yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran



dari para pembaca yang budiman agar kedepannya ada upaya penyempurnaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan segala permasalahan yang melingkupinya. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan.

Yogyakarta, Oktober 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                 | hal  |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                      | i    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                                | ii   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....                                 | iii  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                                 | iv   |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                                      | v    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                                | vi   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                            | vii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                     | viii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                         | xi   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                       | xv   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                      | xvi  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                                    | xvii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                        |      |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                 | 1    |
| B. Identifikasi Masalah .....                                   | 8    |
| C. Batasan Masalah .....                                        | 9    |
| D. Rumusan Masalah .....                                        | 10   |
| E. Tujuan Penelitian .....                                      | 10   |
| F. Manfaat Penelitian .....                                     | 11   |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>                                    |      |
| A. Implementasi Kebijakan .....                                 | 13   |
| B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan ..... | 19   |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| C. Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) ..... | 26 |
| D. Hakikat Pendidikan.....                      | 35 |
| E. Penelitian yang Relevan .....                | 40 |
| F. Kerangka Berpikir .....                      | 43 |
| G. Pertanyaan Penelitian .....                  | 46 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian .....            | 47 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian.....  | 48 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian ..... | 48 |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....     | 50 |
| 1. Wawancara .....                   | 50 |
| 2. Dokumentasi .....                 | 51 |
| E. Instrumen Penelitian .....        | 52 |
| F. Teknik Analisis Data.....         | 53 |
| 1. Pengumpulan Data .....            | 53 |
| 2. Reduksi Data.....                 | 54 |
| 3. Penyajian Data .....              | 54 |
| 4. Penarikan Kesimpulan.....         | 54 |
| G. Keabsahan Data .....              | 55 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....         | 58 |
| 1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Klaten ..... | 58 |
| 2. Dinas PendidikanKabupaten Klaten.....    | 61 |
| 3. TK Pertiwi Tlogo .....                   | 67 |
| 4. SD Negeri 1 Prambanan .....              | 80 |
| 5. SMP Negeri 1 Prambanan .....             | 82 |
| 6. SMA Negeri 1 Prambanan.....              | 83 |
| 7. PKBM Cipta Karya .....                   | 86 |

|                                                                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B. Hasil Penelitian .....                                                                                                                                               | 88  |
| 1. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah .....                                 | 88  |
| a. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Pendidikan Formal .....                                                                                     | 98  |
| b. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Pendidikan Non Formal .....                                                                                 | 107 |
| 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah ..... | 110 |
| C. Pembahasan .....                                                                                                                                                     | 112 |
| 1. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah .....                                 | 113 |
| a. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Pendidikan Formal .....                                                                                     | 121 |
| b. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Pendidikan Non Formal .....                                                                                 | 129 |
| 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.....  | 132 |

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 137 |
| B. Saran.....      | 138 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 140 |
|----------------------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... | 142 |
|-------------------------|-----|

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                               | hal |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1. Perbandingan Ketiga Lembaga Pendidikan .....                                                         | 39  |
| Tabel 2. Kisi-kisi Wawancara .....                                                                            | 51  |
| Tabel 3. Kisi-kisi Kajian Dokumen .....                                                                       | 52  |
| Tabel 4. Latar Belakang Pendidikan Pegawai Tahun 2013.....                                                    | 65  |
| Tabel 5. Keadaan Pendidik di TK Pertiwi Tlogo Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status .....                      | 79  |
| Tabel 6. Keadaan Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun Pelajaran 2014/2015.....                               | 79  |
| Tabel 7. Keadaan Pendidik di SD Negeri 1 Prambanan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun Pelajaran 2014/2015.....   | 80  |
| Tabel 8. Keadaan Siswa di SD Negeri 1 Prambanan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun Pelajaran 2014/2015.....      | 81  |
| Tabel 9. Keadaan Pendidik di SMP Negeri 1 Prambanan Berdasarkan Jenis Kelamin .....                           | 83  |
| Tabel 10. Keadaan Siswa di SMP Negeri 1 Prambanan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun Pelajaran 2014/2015.....    | 83  |
| Tabel 11. Keadaan Pendidik di SMA Negeri 1 Prambanan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun Pelajaran 2014/2015..... | 85  |
| Tabel 12. Keadaan Siswa di SMA Negeri 1 Prambanan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun Pelajaran 2014/2015.....    | 86  |
| Tabel 13. Ketersediaan Sumber Daya dalam Pelaksanaan Sosialisasi Implementasi Kebijakan PUG .....             | 93  |
| Tabel 14. Daftar Sekolah Penerima Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG).....                               | 97  |
| Tabel 15. Hasil Sosialisasi PUG pada Pendidikan Formal .....                                                  | 106 |
| Tabel 16. Hasil Sosialisasi PUG pada PKBM.....                                                                | 110 |
| Tabel 17. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan PUG .....                                    | 135 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                         | hal |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1. Proses Kebijakan menurut H.A.R Tilaar .....                                                                   | 17  |
| Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward George III .....                                                  | 18  |
| Gambar 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Implementasi Menurut<br>Mazmanian, Daniel A Sabatier, Paul A .....     | 25  |
| Gambar 4. Kerangka Berpikir .....                                                                                       | 45  |
| Gambar 5. Model Analisis Interaktif (Sugiyono, 2009:247) .....                                                          | 55  |
| Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten .....                                                   | 66  |
| Gambar 7. Struktur Organisasi PKBM Cipta Karya .....                                                                    | 87  |
| Gambar 8. Sasaran Sosialisasi PUG pada Pendidikan Formal .....                                                          | 101 |
| Gambar 9. Proses Implementasi Kebijakan PUG dalam Pendidikan di Dinas<br>Pendidikan Kabupaten Klaten .....              | 120 |
| Gambar 10. Implementasi Kebijakan PUG dalam Pendidikan<br>pada Pendidikan Formal .....                                  | 129 |
| Gambar 11. Implementasi Kebijakan PUG dalam Pendidikan<br>pada Pendidikan Non Formal .....                              | 132 |
| Gambar 12. Implementasi Kebijakan pengarusutamaan Gender<br>dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan kabupaten Klaten ..... | 136 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                     | hal |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1. Pedoman Dokumentasi dan Wawancara ..... | 143 |
| Lampiran 2. Pedoman Pencermatan Dokumen .....       | 150 |
| Lampiran 3. Catatan Lapangan .....                  | 152 |
| Lampiran 4. Transkrip Wawancara .....               | 162 |
| Lampiran 5. Reduksi Data .....                      | 180 |
| Lampiran 6. Hasil Pencermatan Dokumen .....         | 209 |
| Lampiran 7. Dokumentasi Foto .....                  | 212 |
| Lampiran 8. Surat Keputusan.....                    | 218 |
| Lampiran 9. Surat Izin Penelitian .....             | 235 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini, kesetaraan laki-laki dan perempuan menjadi sebuah *issue* yang menjadi pemikiran serius dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik maupun bidang pendidikan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia menjadi hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi, dan tidak layak untuk dirampas oleh siapapun. Dasar pilar utama HAM adalah persamaan, kebebasan/kemerdekaan dan keadilan. Hasil dari *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1984 menyatakan bahwa manusia dilahirkan sama dan setara di dalam harkat dan haknya. Persamaan hak yang terkandung dalam deklarasi tersebut bahwa tidak ada perbedaan antara ras maupun gender. Bertolak dari isi pernyataan dalam dokumen tersebut dalam kenyataannya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat umat manusia masih saja muncul berbagai jenis diskriminasi berdasarkan ras, agama, kedudukan ekonomi, kedudukan sosial dan perbedaan gender.

Gender adalah perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang (Manshour Fakih, 2005:71-72). Perbedaan gender (*gender*

*differences*) mampu melahirkan ketidakadilan gender. Perbedaan dan pembagian gender yang mengakibatkan, termanifestasi dalam posisi *subordinasi* kaum perempuan di hadapan laki-laki. Seperti dalam tradisi, tafsir keagamaan, maupun dalam aturan birokrasi dimana kaum perempuan diletakkan dalam posisi yang lebih rendah dari kaum laki-laki. Perbedaan dan pembagian gender juga membentuk penandaan atau stereotipe terhadap kaum perempuan yang berakibat pada penindasan terhadap mereka. Stereotipe merupakan bentuk penindasan ideologi dan kultural, yakni pemberian *label* yang memojokkan kaum perempuan sehingga berakibat kepada posisi dan *kondisi* kaum perempuan. Seperti stereotipe kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” sangat merugikan mereka, yang mana perempuan hanya pantas untuk di sektor domestik tidak pada sektor publik. Perbedaan dan pembagian gender juga membuat kaum perempuan bekerja lebih keras. Banyak observasi yang dilakukan, menunjukkan bahwa hampir 90% pekerjaan domestik dikerjakan oleh perempuan. Perbedaan gender juga melahirkan kekerasan dan penyalahgunaan atau *violence* terhadap kaum perempuan, baik secara fisik maupun mental. Kekerasan dalam bentuk nonfisik yang sering terjadi misalnya pelecehan seksual, menyebabkan ketidaknyamanan bagi perempuan secara emosional (Manshour Fakih, 2008: 147-151).

Memperjuangkan keadilan gender merupakan tugas berat, karena masalah gender adalah masalah yang sangat *intens*, di mana masing-masing terlibat secara emosional. Pemecahan masalah perlu dilakukan secara

serempak. Perlu upaya-upaya bersifat jangka pendek yang dapat memecahkan masalah-masalah praktis ketidakadilan tersebut. Usaha jangka panjang juga perlu dilakukan untuk memikirkan bagaimana menemukan cara strategis dalam rangka memerangi ketidakadilan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Dalam pembangunan bangsa, kesetaraan dan keadilan gender juga menjadi salah satu fokus dari delapan poin penting dalam rencana pembangunan MDGs 2025. Target MDGs terkait kesetaraan gender yakni mencapai pendidikan dasar bagi semua dengan tujuan bahwa pada tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun perempuan dapat mengenyam pendidikan dasar, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2015. Hal tersebut diperkuat dalam Konferensi Beijing tahun 1995 dengan lahirnya *platform action strategy gender mainstreaming* (Riant Nugroho, 2008:141). *Gender mainstreaming* muncul sebagai strategi penyempurnaan dari strategi perjuangan kesetaraan gender, *gender mainstreaming* menjadi agenda



perjuangan yang mutakhir dari mereka yang mencita-citakan percepatan terciptanya suatu keadilan gender di masyarakat luas. *Gender mainstreaming* atau pengarusutamaan gender merupakan sebuah strategi dan rencana untuk meningkatkan kepedulian akan aspirasi, kepentingannya dan peranan perempuan dan laki-laki tanpa mengesampingkan harkat, kodrat, dan martabat perempuan dan laki-laki dalam segala bidang.

Menyelaraskan peran antara laki-laki dan perempuan serta mewujudkan kesetaraan gender sebagai upaya kebijakan yang harus dijalankan oleh pemerintah ialah 1) meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, 2) meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga masyarakat (Evi Muawanah, 2009: 45).

Kesulitan untuk mewujudkan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan menurut UNDP disebabkan karena adanya beberapa alasan yakni: a) kurangnya komitmen politik, b) salah arah kebijakan, c) ketidakefisienan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Selain itu budaya patriarkhi yang masih melekat dalam masyarakat memiliki kontribusi yang cukup besar sebagai faktor yang mempersulit upaya untuk mewujudkan

kesetaraan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki (Singarimbun, 1996) dalam Riant Nugroho (2008: 156).

Permasalahan gender dalam pendidikan masih banyak dijumpai. Bias gender masih terlihat seperti dalam buku bacaan di sekolah, yang beberapa masih mentransfer nilai atau norma gender yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat. Contoh dalam buku *Aku Cinta Bahasa Indonesia 3A* karangan Surana tahun 2004 yang isinya “Imah, gadis kecil itu sibuk memberesi dapur”. Kalimat tersebut mencerminkan bahwa pekerjaan di dapur hanya pantas dilakukan oleh anak perempuan. Artinya sistem nilai gender akan berpengaruh pada kehidupan sistem sosial di sekolah, yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan.

Kebijakan (*policy*) sebagai suatu strategi pertama dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender karena kebijakan merupakan sebuah komitmen politik. Kebijakan yang dimaksud adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga negara yang bersifat mengatur warganya. Sebagai strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan. Betapa pentingnya pengarusutamaan gender untuk diterapkan di berbagai sektor kehidupan, begitu pula pendidikan, yang mana pendidikan merupakan ujung tombak dalam memberikan penyadaran serta pembelajaran bagi manusia. Di sektor pendidikan pelaksanaan pengarusutamaan gender telah diatur dalam

Permendikans Nomor 84 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam pendidikan. Berbeda dengan daerah lain yang telah melampaui jangkauan dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan. Dinas pendidikan Kabupaten Klaten masih sebatas sosialisasi pada pendidikan formal dan non formal. Di Kabupaten Klaten, kebijakan pengarusutamaan gender menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan berbagai kebijakan yang dilakukan di beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, BPKD serta Dinas Pendidikan. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten belum lama diwujudkan. Pelaksanaan PUG baru sebatas sosialisasi terhadap lembaga-lembaga sekolah di Kabupaten Klaten serta penyusunan kegiatan pengarusutamaan gender. POKJA PUG belum tersusun secara berjangka untuk kelangsungan rencana serta pelaksanaan pengimplementasian kebijakan PUG di sektor pendidikan. Mengingat *gender mainstreaming*/pengarusutamaan gender ini adalah mengorganisir dan melihat perkembangan proses kebijakan, serta implementasi dan evaluasinya, maka diperlukan tenaga-tenaga ahli gender yang tepat. Selain itu, harus juga diketahui proses administrasinya seperti siapa saja yang terlibat di dalam, serta langkah apa yang harus diambil, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap proses ini. Ketertinggalan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan PUG pendidikan

memberikan dampak pada belum maksimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada pendidikan formal maupun non formal yang baru sebatas sosialisasi pengarusutamaan gender. Mengingat bahwa visi dan misi pemerintah Kabupaten Klaten adalah turut mencanangkan kesetaraan bagi kaum laki-laki dan perempuan melalui implementasi pengarusutamaan gender, sehingga PUG dalam pendidikan perlu segera direalisasikan agar kesetaraan gender dapat terwujud.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, jumlah penduduk Kabupaten Klaten sebanyak 1.461.706 jiwa pada Tahun 2012, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 724.785 jiwa, dan perempuan sebanyak 736.921 jiwa. Penambahan penduduk sebanyak 150.685 jiwa, dengan kepadatan penduduk 2.230 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Klaten terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah bahwa jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten berjumlah 117 orang. Dari jumlah pegawai yang ada, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten belum memiliki tim khusus dalam menangani gender. Pengelolaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten masih dibebankan pada Kepala Seksi Perpustakaan yang merupakan bagian dari Bidang Pendidikan Non Formal di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Pelaksanaan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dilakukan pada 13 sekolah di Kecamatan

Prambanan yang telah ditunjuk, sosialisasi diberikan pada pendidikan formal yakni jenjang TK, SD, SMP, dan SMA, serta pada pendidika non formal yakni pada PKBM atau Pusat kegiatan Belajar Masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini penting untuk dikaji mengingat kebijakan pengarusutamaan gender merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan gender tanpa diskriminasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kritik, dan rekomendasi kepada para pembuat dan pelaksana kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan untuk menjalankan kebijakan dengan tepat, sehingga tujuan utama perumusan kebijakan yakni untuk mengatasi permasalahan ketidakadilan gender dapat dilaksanakan dengan baik.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas berbagai permasalahan yang nampak dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih adanya bahan ajar yang bias gender.
2. Pengarusutamaan gender belum menjadi hal yang penting untuk disegerakan dalam program kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
3. Belum terbentuknya tim program kerja pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.



4. Belum adanya program berjangka dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.
5. Pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan belum sesuai dengan Permendiknas Nomor 8 Tahun 2008.
6. Lembaga pendidikan formal maupun non formal relatif masih kurang memperhatikan tentang kesetaraan gender.

### **C. Batasan Masalah**

Melihat banyaknya permasalahan yang ada dan keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti membatasi permasalahan pada:

1. Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:
  - a. Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan pada pendidikan formal.
  - b. Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan pada pendidikan non formal.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah yang meliputi pada pendidikan formal dan non formal.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berpijak dari identifikasi masalah serta batasan masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah?
  - a. Bagaimana implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan pada pendidikan formal?
  - b. Bagaimana implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan pada pendidikan non formal?
2. Faktor pendukung dan penghambat apakah yang terdapat dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah yang meliputi pada pendidikan formal dan non formal?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkap di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:
  - a. Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan pada pendidikan formal.

- b. Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan pada pendidikan non formal.
2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah yang meliputi pada pendidikan formal dan non formal.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah secara umum diklasifikasikan dalam dua manfaat yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Merupakan laporan hasil penelitian yang dapat berguna sebagai referensi atau informasi yang tentang pelaksanaan gender dalam pendidikan.
  - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam permasalahan pendidikan terkait pelaksanaan gender mengenai peran lembaga dan instansi pemerintah dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender dalam pendidikan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui indikator dan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender serta dapat memberikan penilaian terhadap masukan, pelaksanaan proses serta hasil program kerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk dapat mengatasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender.

b. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan program pelaksanaan pengarusutamaan gender yang ada di Dinas Pendidikan serta mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

c. Bagi Sekolah

Penelitian ini bermanfaat sebagai informasi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di tiap satuan pendidikan, baik pendidikan formal jenjang pendidikan TK, SD, SMP dan SMA, serta pendidikan non formal yakni PKBM, serta sebagai acuan dalam melakukan tindak lanjut pengembangan kebijakan pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Implementasi Kebijakan**

Dalam kamus Webster (Arif Rohman: 134) implementasi diartikan sebagai *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2008) menyatakan bahwa:

*“Implementation is the carrying out of policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executives orders or court decision. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the objectives(s) to be pursued, and in a variety of ways, “structures” the implementation process.”*

Charles O. Jones (Arif Rohman, 2009: 135) juga berpendapat bahwa implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan suatu program. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat Joko Widodo (2008: 88) yang menyatakan bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber, termasuk diantaranya yaitu manusia dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok).

Secara etimologi kebijakan (*policy*) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (*city*) (Syarifuddin: 2008). Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan merupakan sebuah rekayasa sosial (*social engineering*), sebagai sebuah



rekayasa sosial, maka kebijakan dirumuskan oleh pemerintah. Tentu saja rumusan kebijakan ini secara esensial sesuai dengan permasalahan yang ada (Sudiyono, 2007:1).

James E. Anderson memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, dan instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan (Arif Rohman. 2009). Definisi lain dijelaskan oleh Gamage dan Paaf (2003) dalam Syafaruddin (2008: 75), kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai dari apa yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program.

Abidin (2006) menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat (Syafaruddin: 2008: 75). Bogue dan Saunders (1976) menyimpulkan, kebijakan adalah menjelaskan sasaran umum organisasi yang berisikan alasan bagi eksistensi dan menyediakan arah pembuatan keputusan bagi pencapaian sasaran.

Suatu kebijakan yang telah dibuat mulai dari pengkajian permasalahan yang terjadi kemudian diformulasikan suatu kebijakan yang tepat untuk mereduksi permasalahan yang terjadi akan sia-sia apabila tidak diimplementasikan. Menurut Van Meter dan Von Horn dalam Arif Rohman (2009: 134), implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan individu, pejabat atau kelompok pemerintahan atau

swasta yang diarahkan kepada ketercapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu. James E. Anderson (1979) dalam Sudiyono (2007:81) dengan tegas menyatakan bahwa implementasi kebijakan mencakup 4 aspek, yaitu: siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, esensi proses administrasi, kepatuhan terhadap kebijakan, pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan.

Dwijowijoto (2003) juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Syarifuddin: 2008: 86). Sudiyono (2007:82) menjelaskan bahwa implementasi sebagai proses yang *linier*, artinya ketika suatu kebijakan telah ditetapkan, maka secara otomatis dapat dilaksanakan, tanpa ada hambatan. Asumsinya adalah ketika sebuah kebijakan ditetapkan, maka sudah seharusnya dilengkapi dengan standar operasional baku (SOB). Sehingga dalam pelaksanaannya akan berjalan dengan lancar sebagaimana diharapkan. Karenanya kebijakan mesti bersifat *top down* dalam rangka pencapaian tujuan secara efisien, dimana mengharuskan adanya pengawasan yang sempurna.

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun dalam Solichin AW (1997) (Sudiyono, 2007:85) untuk mewujudkan implementasi yang sempurna diperlukan persyaratan tertentu, yaitu:

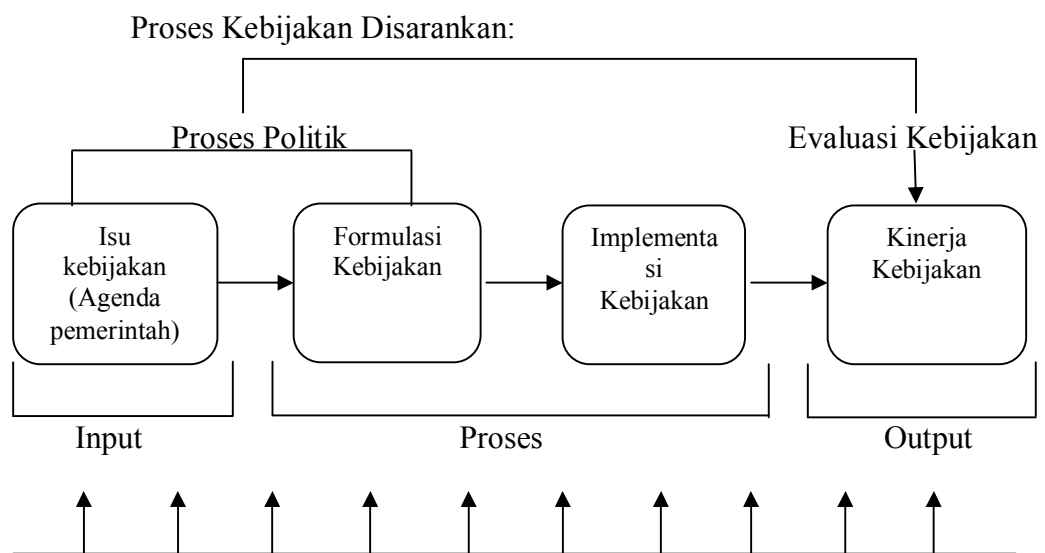
1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh organisasi atau agen pelaksana tidak menimbulkan gangguan yang serius.
2. Tersedianya waktu dan sumber-sumber yang memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan berdasarkan atas hubungan kasualitas yang dapat diandalkan.
5. Hubungan kasualitas sebagaimana dimaksud harus bersifat langsung dan hanya memiliki matarantai penghubung yang sedikit.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam terhadap tujuan kebijakan dan kesepakatannya terhadap tujuan tersebut.
8. Tugas-tugas setiap organisasi pelaksana harus diperinci dan ditempatkan sesuai dengan urutannya secara tepat.
9. Terjadinya koordinasi dan komunikasi yang sempurna di antara para pelaksana
10. Pihak yang bersenang memiliki kewenangan untuk menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna dari para pelaksana termasuk para kelompok sasaran.

Berdasar atas paparan di atas, dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan bukanlah sesuatu yang singkat dan sederhana, namun sangat kompleks dan rumit dimana meliputi beberapa tahapan proses kebijakan. Sama halnya dengan Yoyon Bahtiar Irianto (2012) mengemukakan mengenai implementasi kebijakan sebagai berikut:

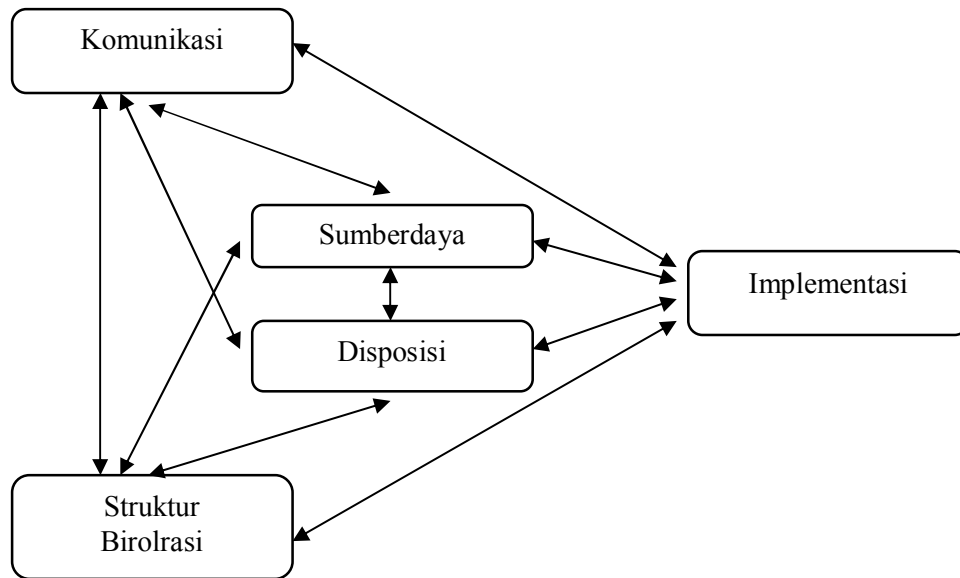
“Implementasi kebijakan dapat disebut sebagai rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategik, maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.”

Charles O. Jones membagi aktivitas implementasi kebijakan menjadi tiga macam, antara lain sebagai berikut: 1) *Organization, the establishment or rearrangement of resources, units and methods for putting a policy into effect*, 2) *Interpretation, the translaton of language (often contained in a statute into acceptable and feasible plans and directives)*, 3) *Application, the routine provision of servise. Payments, or other agree upon objectives instruments* (Joko Widodo, 2008:89)



**Gambar 1. Proses Kebijakan menurut H.A.R Tilaar**

Setelah proses kebijakan dirumuskan, maka suatu implementasi yang kemudian dilakukan dalam proses kebijakan. Gambaran mengenai proses implementasi kebijakan menurut Edward George III dapat disajikan dalam gambar berikut:



**Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward George III**  
(Sumber: Subarsono, 2008:91)

Melalui gambar proses tahapan implementasi kebijakan tersebut maka implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam praktik organisasi (Putt dan Springer, 1989). Berdasar pernyataan Putt dan Springer, suatu implementasi kebijakan memerlukan banyak keputusan dan tindakan seperti; menjamin dan menguatkan berbagai arahan dan peraturan, mengeluarkan dan membuat penemuan, rekrutmen dan pembinaan personel, menghargai dan membuat kontrak, menciptakan unit organisasi baru supervisi staf, membuat anggaran yang diperlukan dan menciptakan bentuk analisis laporan (Syarifuddin, 2008).

## **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor yang mendukung dalam proses implementasi kebijakan yang masing-masing memiliki keterikatan atau saling berhubungan. Faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980) serta teori dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) dalam AG. Subarsono (2008:90) adalah sebagai berikut:

### **a. Teori George C. Edwards III (1980)**

#### **1) Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Komunikasi kebijakan mempunyai beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi kebijakan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan (*target group*) dan pihak yang berkepentingan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan dapat diterima dengan jelas, sehingga mereka

mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut. jika tidak jelas mereka tidak akan tahu mengenai apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien (Joko Widodo, 2008:97)

## 2) Sumberdaya

Implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif jika tidak didukung dengan adanya sumberdaya. Sumberdaya dalam proses implementasi antara lain manusia yang memiliki kemampuan yaitu kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Dengan adanya sumberdaya yang mendukung maka implementasi dapat berjalan dengan baik untuk merealisasikan kebijakan yang ada agar kebijakan tidak hanya menjadi sebuah dokumen dalam kertas.

Dalam implementasi kebijakan, sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut: a) Sumber Daya Manusia (*Staff*). Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran, b) Anggaran (*Budgetary*). Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan

dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, c) Fasilitas (*Facility*). Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan, d) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*). Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki (Joko Widodo, 2008:98-104)

### 3) Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Seorang implementor yang memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sehingga dengan disposisi yang baik yang dimiliki oleh implementor maka suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif.

### 4) Struktur Birokrasi

Pengaruh yang cukup signifikan dalam implementasi kebijakan yakni suatu struktur organisasi, dimana struktur organisasi memiliki aspek yang amat penting yaitu adanya prosedur operasi yang standar



(*standar operating procedures* atau SOP). SOP merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Sehingga arah implementasi dalam kebijakan sesuai dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai. Aspek kedua yakni stuktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel (Joko Widodo, 2008:106).

b. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

1) Karakteristik dari masalah

- a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Sehingga sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
- b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda.
- c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif

mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.

- d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

2) Karakteristik kebijakan/undang-undang

- a) Kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci isi kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
- b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
- c) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan. Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administratif dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.
- d) Besarnya dukungan dan keterpautan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan karena

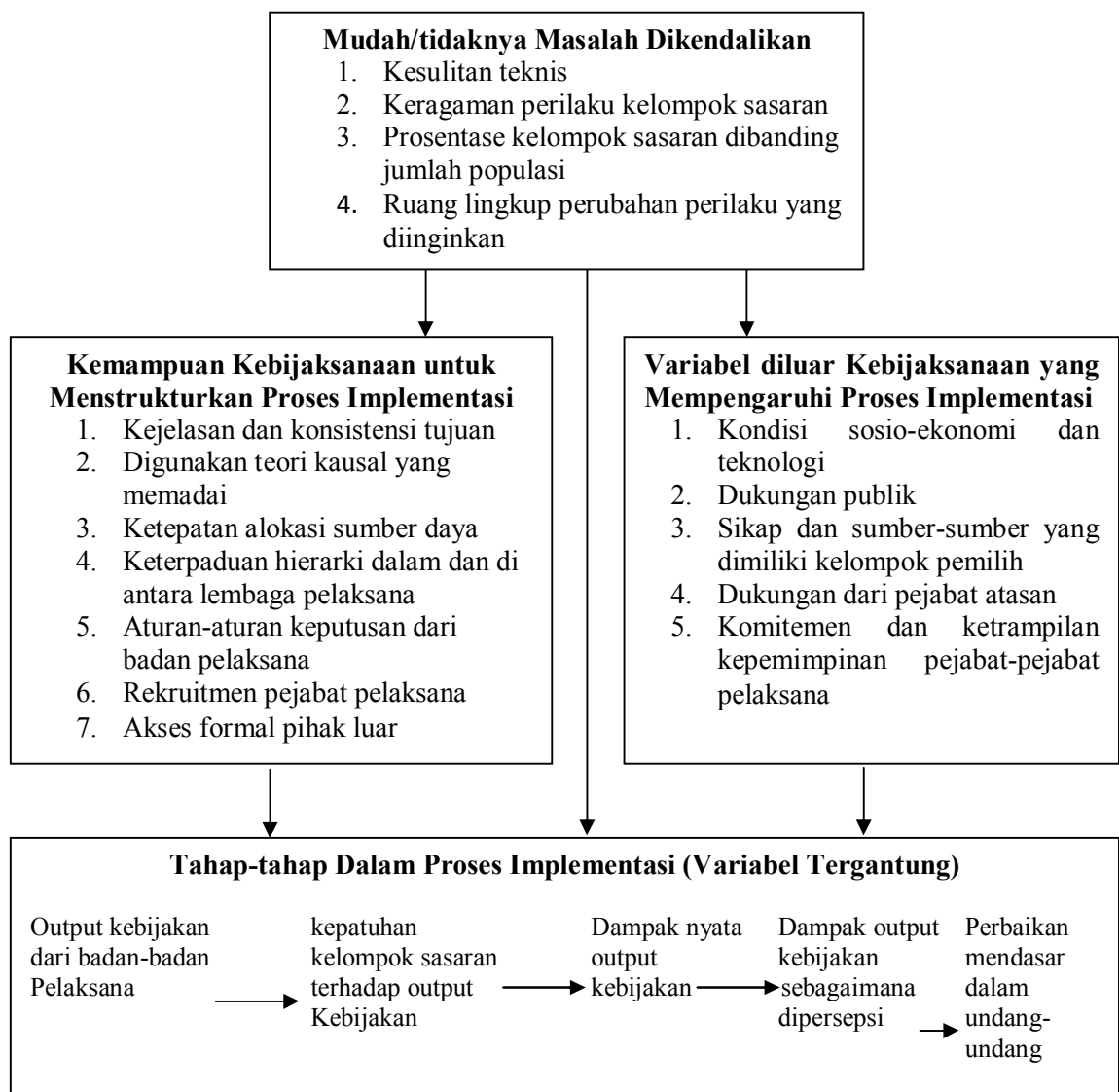
kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program.

- e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
- g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.

### 3) Lingkungan Kebijakan

- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
- b) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
- c) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*).
- d) Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor.

Komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.



**Gambar 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Implementasi Menurut Mazmanian, Daniel A Sabatier, Paul A**  
(Sumber: Subarsono, 2008: 95)

Sejalan dengan Yoyon Bahtiar Irianto (2012: 41) yang menyatakan bahwa tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada tahap implementasi, dimana implementasi lebih mengarah pada aktivitas yang lebih praktis yang didalamnya terdapat perilaku untuk mengeksekusi dan mengarahkan. Keberhasilan proses implementasi akan mendapat pengaruh

dari berbagai unsur baik unsur pendukung maupun penghambat serta adanya unsur lingkungan, baik fisik maupun sosial budaya.

Solichin Abdul Wahab (1990) mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan berhasil tidaknya suatu kebijakan antara lain:

1. Kompleksitas kebijakan yang telah dirumuskan
2. Kejelasan rumusan masalah dan alternatif pemecahan masalah
3. Sumber-sumber potensial yang mendukung
4. Keahlian pelaksana kebijakan
5. Dukungan dari khalayak sasaran
6. Efektivitas dan efisiensi birokrasi

*Politics and Policies Implementation in the Third World* karya Grindle (1980) dalam Yoyon Bahtiar (2012:42) dijelaskan bahwa keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan tergantung pada kegiatan yang telah dirancang dan pembiayaan yang cukup memadai, di samping dipengaruhi pula oleh dua hal, yaitu: 1) *Content of policy*, yang terdiri dari *interests affected, type of benefits, extent of change envisioned, site of decision making, program implementators, resources, committed*. 2) *Context of implementation*, yang terdiri dari *power, interest, and strategies of actors involved, institutions and regime characteristics, compliance and responsiveness*.

### **C. Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)**

#### **1. Pengertian Gender**

Definisi gender dan jenis kelamin tidaklah sama, kebanyakan masyarakat mengartikan gender sama halnya dengan jenis kelamin.

Gender membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan atas konstruksi sosial dan kultural. Seperti yang diungkapkan oleh Mansour Fakih dalam bukunya Analisis Gender Transformasi Sosial bahwa gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural (Riant Nugroho, 2008:7).

Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu '*gender*' dalam kamus bahasa Inggris pengertian antara *sex* dan *gender* tidak secara jelas dibedakan. Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) dalam Riant Nugroho (2008:2) dimana gender dimaksudkan untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri fisik biologis.

Oakley (1972) yang dikutip dalam Mansour Fakih (1999) juga menegaskan dalam *Sex, Gender and Society* bahwa gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (*sex*) adalah kodrat Tuhan maka secara permanen berbeda dengan pengertian gender (Riant Nugroho, 2008:3). Gender adalah pembagian peran manusia pada maskulin dan feminim yang di dalamnya terkandung peran dan sifat yang diletakkan oleh masyarakat kepada kaum laki-laki dan perempuan dan dikonstruksikan secara sosial, ataupun kultural (Moh. Roqib, 2003)

Dari berbagai definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya

bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu/zaman, suku /ras/bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, negara, ideologi, politik, hukum, dan ekonomi. Sehingga gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat relatif.

## **2. Ketidakadilan Gender**

Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem tersebut (Faqih, 1998: 1997) dalam Achmad Muthali'in (2001:33). Ketidakadilan gender juga terwujud dalam stereotip terhadap perempuan. Stereotip bias gender merupakan suatu bentuk penindasan ideologi dan kultural, yakni dengan pemberian label tertentu yang memojokkan kaum perempuan. Pelabelan tersebut menjadikan perempuan dalam kondisi terpojok dan tidak menguntungkan bagi eksistensi dirinya.

Ketidakadilan gender bagi kaum perempuan juga termanifestasi dalam pendidikan, yakni dinomorduakannya kaum perempuan dalam pendidikan. Perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi-tinggi, perempuan sebagai ibu rumah tangga, pendidik anak, dan pendamping suami tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Dalam kegiatan publik perempuan dipandang tidak perlu begitu menonjol, perempuan dipandang sebagai tambahan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, walaupun

tidak jarang pendapatan perempuan atau istri lebih tinggi dari laki-laki/suaminya.

### **3. Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*)**

Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi, stereotipe, subordinasi, kekerasan dan beban ganda). Sesuai dengan Inpres No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional, pengertian Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Menurut Omas Ihromi dalam Hak Azasi Perempuan (2005), tujuan pengarusutamaan gender adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender berfungsi untuk menciptakan mekanisme-mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan di semua bidang kegiatan dan kehidupan masyarakat dan pemerintahan.



#### 4. Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender yakni melalui berbagai kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah. Kesetaraan sebagai hak asasi perempuan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dalam berbagai aspek. Kebijakan atau hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam mewujudkan keadilan gender selama perkembangannya adalah:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)
- b) Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Sidang ke-11 Tahun 1992 Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- c) Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan (Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104)
- d) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- f) Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Instruksi Presiden ini bertujuan melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- g) Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan.

Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 sebagai pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan bertujuan memberikan acuan bagi para pemegang kebijakan dan pelaksana pendidikan dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan.

Acuan kebijakan sebagai dasar dalam perwujudan kesetaraan gender telah mengalami proses perubahan dari tahun ke tahun. Dalam mewujudkan kesetaraan gender bidang pendidikan pemerintah mengeluarkan kebijakan guna mendukung pelaksanaan keadilan gender. Kebijakan pemerintah terkait kesetaraan gender tertuang dalam Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diselenggarakan pada lingkup bidang masing-masing, serta Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kesetaraan gender bidang pendidikan.

## **5. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan**

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan tertuang dalam Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam bidang pendidikan mengacu pada kandungan isi pelaksanaan PUG dalam Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 yang di dalamnya terdapat pedoman perencanaan yang telah dirinci serta dijabarkan bagaimana pelaksanaan PUG dalam pendidikan. Adapun cakupan perencanaan dan pelaksanaan PUG dalam pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Unit kerja pusat dan dinas pendidikan serta satuan pendidikan berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Pendidikan Nasional, Rencana Strategis Dinas Pendidikan, serta Rencana Kerja Satuan Pendidikan.

- b) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada point (a) dilakukan melalui analisis gender,
- c) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam point (b) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode lain.
- d) Analisis gender terhadap rencana kerja dilakukan oleh masing-masing lembaga yang bersangkutan.
- e) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMN, RPJMD dan Renstra dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- f) Dinas Pendidikan mengkoordinasikan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan berperspektif gender.
- g) Rencana Kerja Dinas Pendidikan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada point (f) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dalam mewujudkan kesetaraan gender dan serta responsif gender dalam pendidikan, dalam pedoman Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 juga dijelaskan proses pelaksanaan PUG di satuan pendidikan yakni sebagai berikut:

- a) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Program Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di unit kerjanya.
- b) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di satuan pendidikan dibentuk Pokja PUG Bidang Pendidikan di unit kerjanya.
- c) Kepala satuan pendidikan menetapkan pokja PUG Bidang Pendidikan di unit kerjanya.
- d) Anggota Pokja PUG Satuan Pendidikan adalah seluruh *stakeholders* terkait di unit kerja yang bersangkutan.
- e) Pokja PUG Bidang Pendidikan di Satuan pendidikan mempunyai tugas:
  - 1) Mempromosikan dan memfasilitasi PUG bidang pendidikan kepada seluruh pihak terkait di unit kerjanya.
  - 2) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG Bidang Pendidikan.
  - 3) Menyusun program kerja setiap tahun.
  - 4) Mendorong terwujudnya anggaran satuan pendidikan yang berperspektif gender.
  - 5) Menyusun rencana kerja POKJA PUG Bidang Pendidikan setiap tahun.
  - 6) Bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan di kabupaten/kota.
  - 7) Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota.

- 8) Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di unit kerjanya.
- 9) Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Penggerak Kegiatan PUG di masing-masing unit kerja.

## **D. Hakikat Pendidikan**

### **1. Pengertian Pendidikan**

Secara etimologis Pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu Paedagogie yang terdiri dari kata "*Pais*", artinya anak, dan "*Ago*" artinya membimbing, jadi paedagogie artinya bimbingan yang diberikan kepada anak (A. Soedomo Hadi. 2008). Menurut John Dewey pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fondamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia.

Rousseau menyebutkan bahwa pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa anak-anak, akan tetapi kita membutuhkannya pada waktu dewasa. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan merupakan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada masa anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Menurut Undang-undang Sisdiknas Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam GBHN Tahun 2003 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggungjawab, produktif, dan sehat jasmani-rohani.

Penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

## **2. Lembaga Pendidikan**

Pada umumnya pendidikan menurut jenisnya dibedakan menjadi tiga macam. Ketiga macam tersebut adalah: a) pendidikan formal, b) pendidikan non formal, dan c) pendidikan informal.

### **a. Pendidikan Formal**

Dalam UU Sisdiknas disebutkan bahwa yang dimaksud pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Disebut pendidikan formal dikarenakan

pendidikan diselenggarakan disekolah/tempat tertentu, teratur sistematis, mempunyai jejaring dan dalam kurun waktu tertentu, serta berlangsung mulai dari TK sampai PT, berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan.

Lembaga formal adalah tempat yang paling memungkinkan bagi seseorang meningkatkan pengetahuan, dan paling mudah untuk membina generasi muda yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat (Abu Ahmadi, 2001: 162).

Sekolah merupakan suatu organisasi yang melaksanakan kegiatan pendidikan secara formal. Keberadaan sekolah sebagai lembaga formal penyelenggara pendidikan memainkan peran strategis dalam keberhasilan sistem pendidikan nasional. Sekolah dipimpin oleh kepala sekolah yang bertanggung jawab dalam menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah. Mulai dari UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, sampai kepada peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten dan kota.

Tujuan pengadaan lembaga pendidikan formal adalah:

- 1) Tempat sumber ilmu pengetahuan.
- 2) Tempat untuk mengembangkan bangsa.
- 3) Tempat untuk menguatkan masyarakat bahwa pendidikan itu penting guna bekal kehidupan di masyarakat sehingga siap pakai.



## **b. Pendidikan Non Formal**

Lembaga pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah (PLS) ialah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, dan berencana, diluar kegiatan persekolahan. (Abu Ahmadi, 2001: 164). Ditegaskan pula dalam UU Sisdiknas Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan non formal memiliki ciri antara lain: tidak terorganisir secara struktural, tidak terdapat penjenjangan kronologis, tidak mengenal adanya kredensial, lebih merupakan hasil pengalaman belajar individu-mandiri, dan pendidikannya tidak terjadi di dalam *“medan interaksi pembelajaran yang artifisial”*

Salah satu bentuk pendidikan non formal adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang biasa disebut PKBM. PKBM memiliki fungsi: *pertama*, sebagai wadah berbagai kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan masyarakat. *Kedua*, fungsi pendukung di antaranya sebagai pusat informasi bagi masyarakat sekitar, bagi lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, konsultasi, komunikasi dan bermusyawarah, serta sebagai tempat kegiatan penyebaran program dan teknologi tepat guna (Yoyon Bahtiar Irianto, 2012:168)

### c. Pendidikan In Formal

Pendidikan, selain terjadi dalam pendidikan formal dan non formal juga berlangsung dalam pendidikan in formal. Pendidikan in formal berlangsung di tengah keluarga. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kegiatan pendidikan in formal tanpa suatu organisasi yang ketat tanpa adanya program waktu, tak terbatas, dan tanpa adanya evaluasi. Pendidikan in formal ini mempunyai tujuan tertentu, khususnya untuk lingkungan keluarga/rumah tangga, lingkungan desa, lingkungan adat (desa mawa cara, negara mawa tata: bahasa Jawa) (Abu Ahmadi, 2001: 169)

**Tabel 1. Perbandingan Ketiga Lembaga Pendidikan**

| No | Ketentuan        | Pend. Formal                          | Non Formal                             | In Formal                          |
|----|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 1  | Tempat langsung  | Gedung sekolah                        | Luar sekolah                           | Utama dalam keluarga inti          |
| 2  | Syaratnya        | Usia sesuai dengan jenjang pendidikan | Kadang-kadang ada tetapi tidak penting | -                                  |
| 3  | Jenjang          | Ada dan ketat                         | Biasanya tidak ada                     | -                                  |
| 4  | Program          | Kurikulum                             | Ada                                    | -                                  |
| 5  | Bahan pelajaran  | Akademis                              | Praktis dan khusus                     | -                                  |
| 6  | Lama pendidikan  | Panjang                               | Singkat                                | Terus menerus                      |
| 7  | Usia peserta     | Relatif sama                          | Tidak sama                             | Terus menerus                      |
| 8  | Penilaian        | Ada/Ijazah                            | Ada/Sertifikat                         | -                                  |
| 9  | Penyelenggara an | Pemerintah dan swasta                 | Pemerintah dan swasta                  | -                                  |
| 10 | Metode           | Tertentu                              | Tak selalu                             | -                                  |
| 11 | Tenaga           | Ada SIM                               | Tak selalu                             | -                                  |
| 12 | Administrasi     | Sistematis                            | Tak selalu                             | -                                  |
| 13 | Sejarahnya       |                                       | Agak tua                               | Tertua, sejak manusia ada di dunia |

## **E. Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang relevan dengan dengan berbagai kajian yang ada akan menjadi masukan untuk melengkapi penelitian ini. Penelitian yang relevan tersebut antara lain:

1. Peneliti relevan pertama, penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si dan Lutfi Wibawa, M.Pd, dalam Penelitian Pengembangan Keilmuan Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, pada Tahun 2010. Judul penelitiannya adalah: “Kesetaraan Gender pada Struktur Aparat Pemda dan Penduduk Kabupaten Sleman.”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang keadaan kesetaraan gender pada aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan kondisi kependudukan di wilayah Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif karena peneliti ingin mengetahui gambaran secara umum struktur aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sudah menggambarkan kesetaraan gender atau belum. Penelitian ini juga menggunakan deskriptif kualitatif karena peneliti ingin melihat serta mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman terhadap kesetaraan gender.

Persamaan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait kesetaraan gender melalui Pengarusutamaan Gender. Perbedaan penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian yakni

dalam kesetaraan aparat pemerintah, adapun subjek penelitian yang peneliti lakukan dalam penelitian ini lebih pada implementasi kebijakan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

2. Penelitian relevan kedua, Penelitian yang pernah dilakukan oleh Lusia Andriani dan L. Hendrowibowo pada tahun 2011 mengenai “Identifikasi Kebijakan Pendidikan yang Responsif Gender di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isi kebijakan pendidikan (peraturan-peraturan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta) yang responsif gender dan mencanangkan *social action* yang dapat dilaksanakan untuk analisis kebijakan yang responsif gender Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) isi kebijakan pendidikan di kota Yogyakarta masih netral gender, b) data pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan belum disajikan secara kuantitatif dan kualitatif yang didasarkan pada jenis kelamin sebagai data yang terbuka. Oleh karena itu direkomendasikan sebuah model pelatihan penyusunan data pendidikan yang responsif gender. Pelatihan ini merupakan sebuah *Social Action*. Kemampuan ini diperlukan sebagai bahan melakukan *Analysis for Policy* bagi para pengambil kebijakan di Dinas Pendidikan di tingkat propinsi ataupun di kabupaten/kota.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lusia Andriani dan L. Hendrowibowo adalah sama-sama meneliti terkait kesetaraan gender di

Dinas Pendidikan. Namun fokus dalam penelitian yang dilakukan tidaklah sama. Penelitian yang dilakukan oleh Lusia Andriani dan L. Hendrowibowo mengidentifikasi isi kebijakan pendidikan yang responsif gender yang kemudian dilakukan suatu perencanaan pemecahan masalah yang ada. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti fokus ada implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan.

3. Penelitian yang ketiga, Penelitian yang pernah dilakukan oleh Abid Rosadi pada tahun 2012 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan studi kasus pada kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Sleman, Yogyakarta terhadap Kesetaraan Gender”.

Hasil penelitian ini diperoleh deskripsi kegiatan program kebijakan kesetaraan gender yang dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga: 1) Perencanaan dan Penyusunan meliputi Penguatan Kelembagaan Pokja Gender Bidang Pendidikan Kabupaten Sleman, Perencanaan Penganggaran yang responsif gender, Pembentukan Lembaga/Satuan Pendidikan yang Responsif Gender di Kecamatan Tempel, Pelatihan Perencanaan Penganggaran Pendidikan Responsif Gender, 2) Pelaksanaan PUG adapun implementasinya di lembaga pendidikan formal, non formal dan in formal. Implementasi program di lembaga Pendidikan Formal meliputi: Pelatihan Rintisan Satuan Pendidikan Berwawasan Gender (SPBG) serta Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG),

Workshop Penyusunan Bahan Ajar yang Responsif Gender Pokja PUG bidang Pendidikan, Fasilitasi Implementasi SPBG serta PKBG. Lembaga yang dijadikan model dalam Pendidikan Non Formal adalah PKBM Ngundi Ngelmu. Pendidikan In Formal meliputi: 1) Perencanaan Pengajaran Responsif Gender, 2) Implementasi Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender, 3) Pemantauan dan Evaluasi. Adapun program tersebut meliputi: Pertemuan Rutin Pokja PUG, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan Kegiatan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan pengarusutamaan geender di dinas pendidikan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah fokus implementasi kebijakan pengarusutamaan gender yang masih sebatas sosialisasi.

#### **F. Kerangka Berpikir**

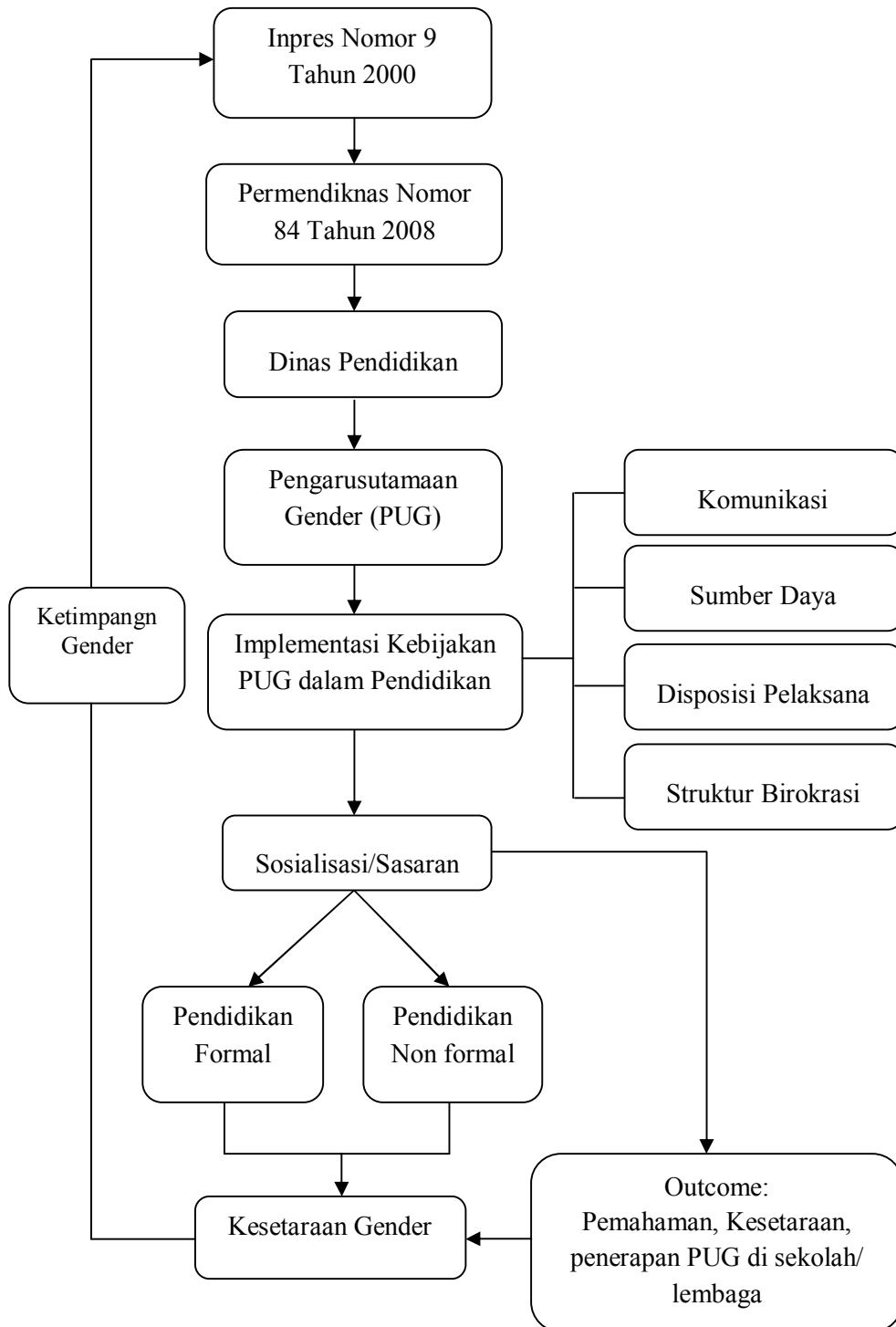
Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dipandang perlu untuk dilakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan telah diatur

dalam Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan.

Pelaksanaan PUG sesuai dengan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 bahwa pelaksanaan PUG dilaksanakan di Provinsi, Kabupaten/Kota, serta di satuan pendidikan. Pelaksanaan PUG di satuan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Dalam penelitian ini *setting* penelitian adalah di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan amanat Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang pelaksanaan PUG dalam pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten melaksanakan kegiatan sosialisasi pengarusutamaan gender sebagai bentuk implementasi kebijakan PUG.

Proses implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, peneliti mengamati dari 4 aspek yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Sasaran kegiatan sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten adalah Pendidikan Formal yakni sekolah dan Pendidikan Non Formal. Melalui penelitian tentang implementasi kebijakan Pengarusutamaan gender dapat diketahui tingkat ketercapaian implementasi PUG di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan sosialisasi pengarusutamaan gender dalam pendidikan adalah adanya pemahaman, kesetaraan, serta penerapan pengarusutamaan gender di sekolah/lembaga pendidikan. Sehingga dari kegiatan sosialisasi yang

dilakukan oleh Dinas Pendidikan tersebut dapat terwujud kesetaraan gender sebagai bentuk implementasi kebijakan PUG dalam Pendidikan.



**Gambar 4. Kerangka Pikir**



## **G. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir yang dibangun dalam penelitian ini, maka pertanyaan penelitiannya adalah :

1. Bagaimana proses implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah?
2. Seperti apa program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender?
3. Seperti apa pelaksanaan pengarusutamaan gender pada pendidikan formal dan non formal guna mendukung realisasi kebijakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan?
4. Bagaimana kesetaraan gender pada pendidikan formal dan non formal?
5. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah?
6. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada pendidikan formal dan non formal?

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (Sugiyono, 2009:9). Denzin dan Lincoln (1994) dalam Emzir (2012: 1) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah:

*“Qualitative research is multimethod in focus, involving an interpretative, naturalistic approach to subject matter. This means that qualitative researchers study in their natural setting, attempting to make sense of or interpret phenomena in terms of meanings people bring to them. Qualitative research involves the studied use and collection of a variety of empirical materials-case study, personal experience, introspective, life story, interview, observational, historical, interactional, and visual texts-that describe routine and problematic moment and meaning in individuals lives.”*

Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk mengkaji masalah-masalah dalam pendidikan terkait kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) yakni implementasi kebijakan yang ada, meliputi: masukan, proses, pelaksanaan dan keluaran serta program kerja yang disusun guna menunjang pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) serta fenomena yang terjadi dalam kebijakan yang ada pada populasi tersebut. Implementasi Kebijakan adalah sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang ditentukan terlebih dahulu (Arif Rohman, 2009).

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian secara kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Perolehan data bisa berasal dari hasil dokumentasi, wawancara atau pengamatan.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Mei-Juli 2014 di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl Pemuda Selatan No 151. Peneliti juga melakukan penelitian di beberapa sekolah dan lembaga, yaitu:

1. TK Pertiwi Tlogo Klaten, yang beralamat di Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan.
2. SD N 1 Prambanan Klaten, yang beralamat di Jl. Yogya-Solo Km. 17 Prambanan Klaten.
3. SMP N 1 Prambanan Klaten, yang beralamat di Jl. Raya Solo-Yogya Km 47 Kongklangan, Sanggrahan, Prambanan.
4. SMA N 1 Prambanan Klaten, yang beralamat di Jl. Manisrenggo, Dengok Prambanan Klaten.
5. PKBM Cipta Karya, yang beralamat di Desa Pereng Kecamatan Prambanan Klaten.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh di lapangan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data yang pertama atau primer diperoleh dari informan yang diamati serta diwawancarai sebagai sumber data utama. Subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Seksi Perpustakaan Bidang Pendidikan Non Formal di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
2. Kepala sekolah jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
3. Koordinator Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Informan dipilih secara *snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar guna mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Data sekunder merupakan dokumen-dokumen mengenai kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Dokumen tersebut diperoleh langsung dari lembaga yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan, yaitu di Dinas Pendidikan Klaten, sekolah dan lembaga. Objek tersebut antara lain:

1. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
2. Permendiknas No 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.1/5314/11 tentang petugas pendaftaran, narasumber dan penyusunan makalah penyelenggaraan program pendidikan non formal PUG.
4. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) pada sekolah/lembaga.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam suatu metode penelitian. Suharsimi Arikunto (2005:100) menyatakan metode atau teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Alat-alat yang dapat digunakan dalam penelitian meliputi wawancara dan dokumentasi.

##### **1. Wawancara**

Menurut Suharsimi Arikunto (2005: 155) wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah sebuah dialog atau percakapan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual kepada orang-orang yang dapat memberikan informasi.

Wawancara adalah komunikasi secara lisan antara dua orang atau lebih yang didalamnya terdapat kegiatan tanya jawab secara tatap muka untuk memperoleh informasi-informasi dan keterangan-keterangan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi: 83 2003).

Moh Nazir (2005: 193) menegaskan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil tatap muka antara si pewawancara dengan responden dengan menggunakan panduan wawancara.

**Tabel 2. Kisi-kisi Wawancara**

| No | Hal yang dikaji                                                            | Aspek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sumber data                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Program Kerja<br>Pengarusutamaan<br>Gender Bidang<br>Pendidikan            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program kerja</li> <li>- Strategi<br/>Perkembangan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Dinas Pendidikan</li> <li>• Seksi Perpustakaan Dinas Pendidikan</li> </ul>              |
| 2  | Implementasi<br>Kebijakan<br>Pengarusutamaan<br>Gender dalam<br>Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi</li> <li>• Sumberdaya <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumberdaya manusia</li> <li>- Anggaran</li> <li>- Fasilitas</li> </ul> </li> <li>• Disposisi</li> <li>• Struktur Birokrasi <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP</li> <li>- Penyebaran tanggungjawab</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seksi Perpustakaan Dinas Pendidikan</li> <li>• Kepala sekolah</li> <li>• Ketua PKBM</li> </ul> |
| 3  | Pelaksanaan PUG di Pendidikan Formal                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi</li> <li>• Faktor pendukung dan penghambat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA</li> </ul>                                                     |
| 4  | Pelaksanaan PUG di Pendidikan Non Formal                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi</li> <li>• Faktor pendukung dan penghambat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelola PKBM</li> </ul>                                                                      |

## 2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:89) metode dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data serta keterangan-keterangan yang ada pada catatan, transkrip dan buku yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa catatan, dokumen, sebagai pelengkap data sekunder yang

tidak ditemukan di lapangan. Dokumen yang diteliti dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian yakni terkait kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) di Dinas Pendidikan maupun di Lembaga Pendidikan.

**Tabel 3. Kisi-kisi Kajian Dokumen**

| No | Hal yang dikaji                                                | Aspek                                                                                                   | Sumber data                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten                       | a. Sejarah<br>b. Visi<br>c. Misi<br>d. Tujuan<br>e. Kondisi Geografi<br>f. Sumber Daya                  | Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten                                                                                                   |
| 2  | Dokumen Program Kerja Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan | Rencana dan program kerja yang disusun untuk mengimplementasikan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Bidang Perencanaan</li> <li>• Seksi Bidang Perpustakaan Dinas Pendidikan</li> </ul> |

#### **E. Instrumen Penelitian**

Peneliti dalam penelitian ini berkedudukan sebagai perumus, pelaksana, analisator dan pelapor hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen pokok sehingga kedudukan peneliti tidak dapat diwakilkan ketika proses pengambilan data berlangsung. Pengumpulan data utama dalam penelitian ini menggunakan pedoman dokumentasi dan wawancara.

### **1. Pedoman Dokumentasi**

Digunakan peneliti untuk mengamati Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Dengan adanya lembar dokumentasi dapat digunakan sebagai catatan bagi peneliti dalam bentuk deskriptif maupun data berupa angka maupun gambar.

### **2. Pedoman Wawancara**

Digunakan peneliti sebagai panduan untuk mengumpulkan data langsung dari informan yakni *stakeholder* dan lembaga pendidikan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisa data menurut Noeng Moehadjir (2000:103) merupakan bagian penting dari suatu penelitian, untuk mengetahui hasil dari penelitian berdasarkan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan model analisis interaktif Milles and Hubberman (1992:18 – 20) dalam Sugiyono (2009) yaitu interaktif model yang mengklasifikasikan analisis data dalam langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Pengumpulan Data**

Data yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan (*field notes*). Catatan lapangan tersebut berisi apa yang dikemukakan oleh informan dan juga



catatan tentang tafsiran peneliti terhadap informasi yang diberikan oleh responden.

## **2. Reduksi Data**

Reduksi data adalah aktivitas peneliti dalam memilih data yang relevan untuk disajikan. Proses pemilihan data memfokuskan pada informasi yang mengarah untuk pemecahan masalah, pemaknaan, dan penemuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Reduksi data dilakukan terus menerus selama penelitian dilaksanakan.

Reduksi data merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari analisis data. Fungsinya menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan sehingga interpretasi dapat dilakukan.

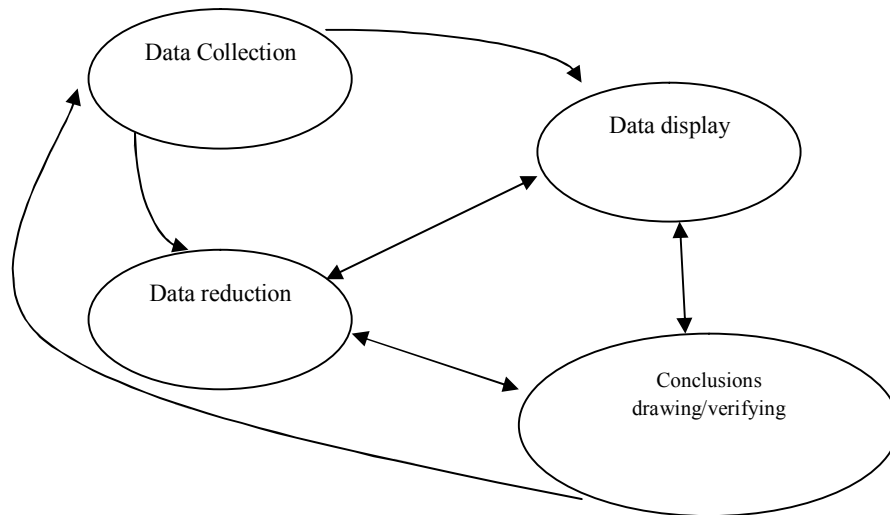
## **3. Penyajian Data**

Pada tahap ini disajikan data hasil temuan lapangan dalam bentuk teks naratif, yaitu uraian tertulis tentang pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

## **4. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan upaya mencari makna dari komponen-komponen data yang disajikan dengan mencermati pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi, dan hubungan sebab akibat. Dalam melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi tentang implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di

Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten selalu dilakukan peninjauan terhadap penyajian data dan catatan di lapangan melalui triangulasi sumber maupun teknik.



**Gambar 5. Model Analisis Interaktif (Sugiyono, 2009:247)**

Peneliti dalam penelitian ini harus selalu mempersiapkan diri untuk bergerak bolak-balik diantara empat sumbu kumparan tersebut selama kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu yang digunakan dalam penelitian.

### **G. Keabsahan Data**

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya (Moeloeng, 2007:330)

Menurut Riant Nugroho (2012:241) triangulasi yaitu mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang ada dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan observasi tidak langsung, observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan di antara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan sekunder, observasi dan interview digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender baik di dinas pendidikan maupun lembaga pendidikan.

Dalam penelitian ini triangulasi data yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber atau informan. Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah mengenai implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, dan yang menjadi sumber data yaitu Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Kepala Sekolah dan koordinator PKBM. Untuk menguji kredibilitas data mengenai implementasi kebijakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten tersebut maka dilakukan pengecekan data antara sumber satu dan lainnya.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data hasil penelitian dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Data dari sumber-sumber tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorikan berdasarkan fokus penelitian. data yang telah dianalisis menghasilkan suatu kesimpulan yang sama dari beberapa sumber tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Klaten**

Kabupaten Klaten adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Wilayah Kabupaten Klaten terletak antara Bujur Timur  $110^{\circ} 26'14'' - 110^{\circ} 47'61''$  dan terletak pada Lintang Selatan  $7^{\circ} 32'19'' - 7^{\circ} 48'33''$ . Kabupaten Klaten berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur, Kabupaten Gunungkidul (DIY) di sebelah selatan dan Kabupaten Sleman (DIY) di sebelah barat.

Wilayah di bagian utara merupakan dataran Lereng Gunung Merapi yang meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung. Pada bagian timur membujur Dataran Rendah yang meliputi seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah dataran lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur, dan di bagian selatan merupakan dataran Gunung Kapur yang meliputi sebagian kecil sebelah Selatan Kecamatan Bayat dan Cawas. Melihat keadaan alaminya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial disamping penghasil kapur, batu kali dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi.

Ketinggian daerah wilayah Kabupaten Klaten sekitar 3,72% terletak diantara ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut. Terbanyak 83,62% terletak diantara ketinggian 100 – 500 meter di atas permukaan laut. Sisanya 12,76% terletak diantara ketinggian 500 – 2.500 meter di atas permukaan laut.

a. Penduduk

Penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2012 sebanyak 1.461.706 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 724.785 jiwa, dan perempuan sebanyak 736.921 jiwa. Penambahan penduduk sebanyak 150.685 jiwa, dengan kepadatan penduduk 2.230 jiwa/km<sup>2</sup>.

Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan terjadinya pertambahan jumlah Kepala Keluarga (KK). Pada tahun 2011 jumlah KK sebesar 349.631 KK, atau terjadi peningkatan jumlah kepala keluarga sebesar 1,19% bila dibandingkan dengan kondisi di tahun 2012 yang jumlahnya sebanyak 353.849 KK. Jumlah keluarga pra sejahtera mengalami penurunan sebesar 1,74% dari 69.243 KK pada tahun 2011 menjadi 68.039 KK pada tahun 2012, sedangkan keluarga KS III+ mengalami kenaikan sebesar 5,41 dari 12.048 KK pada tahun 2011 menjadi sebesar 12.737 KK.

Dari sudut kepadatan penduduk, tertinggi Kecamatan Klaten tengah (5.276 jiwa/km<sup>2</sup>). Kecamatan Klaten Utara (4.871 jiwa/km<sup>2</sup>), dan Kecamatan Klaten Selatan (3.493 jiwa/km<sup>2</sup>) sedangkan

kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kemalang (800 jiwa/km<sup>2</sup>), Kecamatan Karangnongko (1.557 jiwa/km<sup>2</sup>), dan Kecamatan Manisrenggo (1.756 jiwa/km<sup>2</sup>).

b. Pendidikan di Kabupaten Klaten

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarananya merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik itu pembangunan manusia sendiri ataupun pembangunan ekonomi. Pendidikan ataupun pengetahuan diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa komponen yang diantaranya adalah angka partisipasi sekolah, angka putus sekolah dan angka melek huruf. Aspek pendidikan dapat dilihat dari berbagai faktor, diantaranya angka partisipasi sekolah yang ditampilkan dalam kelompok umur, yakni kelompok 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun.

**2. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten**

Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten terletak di Jl. Pemuda Selatan No 151 Kabupaten Klaten 57424 Provinsi Jawa Tengah. Visi

Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten adalah Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas, Kreatif, Disiplin dan berakhlak Mulia dalam Kerangka Klaten yang Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo. Adapun misi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam mewujudkan visi adalah; a) Melaksanakan Pembinaan terhadap pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap sekolah dan masyarakat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki, b) Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan yang demokratis dan berkualitas, c) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya bangsa, menjadi sumber kearifan dalam bertindak, d) Menerapkan pelaksanaan manajemen berbasis kompetensi, baik di jalur sekolah maupun luar sekolah dalam rangka melibatkan seluruh warga masyarakat dan kelompok lain yang terkait dengan Dinas Pendidikan.

Menumbuhkan semangat keunggulan dan kemandirian dalam rangka menuju sumber daya manusia yang profesional. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten mengemban fungsi:



- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengarusutamaan gender dalam pendidikan merupakan bagian dari ranah PNF (Pendidikan Non Formal) yang dikelola oleh kasi perpustakaan. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, meliputi pengelolaan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan serta Perpustakaan Sekolah. Adapun rincian tugas Bidang Pendidikan Non Formal adalah :

- a) Menyusun, merumuskan dan menetapkan rencana kegiatan dan petunjuk teknis pembinaan bidang Pendidikan Masyarakat, PAUD dan Kesetaraan serta Perpustakaan Sekolah.
- b) Melakukan koordinasi dan menyusun rencana kerja bidang Pendidikan Masyarakat, PAUD dan Kesetaraan serta Perpustakaan dan Kesiswaan sesuai program kerja.
- c) Menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal yang meliputi Pendidikan Masyarakat, PAUD dan Kesetaraan serta Perpustakaan.

- d) Menyusun, menetapkan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan lembaga pendidikan masyarakat, organisasi kesiswaan dan perpustakaan.
- e) Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga pendidikan masyarakat, organisasi kepramukaan dan perpustakaan.
- f) Memelihara dan meningkatkan kerjasama/kemitraan dengan lembaga/instansi di bidang pendidikan masyarakat, organisasi kesiswaan dan perpustakaan.
- g) Merencanakan dan menetapkan pemberian izin penyelenggaraan lembaga Pendidikan Masyarakat dan Perpustakaan.
- h) Melakukan koordinasi dengan Penilik PLS dalam rangka pembinaan kepada lembaga Pendidikan Masyarakat dan Perpustakaan.
- i) Menghimpun, mensosialisasikan dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang menyangkut lembaga pendidikan masyarakat, kesiswaan dan perpustakaan.
- j) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan organisasi kesiswaan.
- k) Mengkoordinasikan kepala seksi dan kegiatan bidang agar dapat dilaksanakan secara baik untuk mencapai program.
- l) Melakukan penilaian dan bimbingan terhadap bawahan untuk penyelesaian tugas.

- m) Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah.
- n) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- o) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bidang Pendidikan Non Formal dibantu oleh Seksi Pendidikan Masyarakat, PAUD dan Kesetaraan serta Perpustakaan Sekolah.

- a) Seksi Pendidikan Masyarakat, PAUD dan Kesetaraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang PNF meliputi pengelolaan Pendidikan Masyarakat, PAUD dan Kesetaraan.
- b) Seksi Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang PNF yang mengelola perpustakaan sekolah.

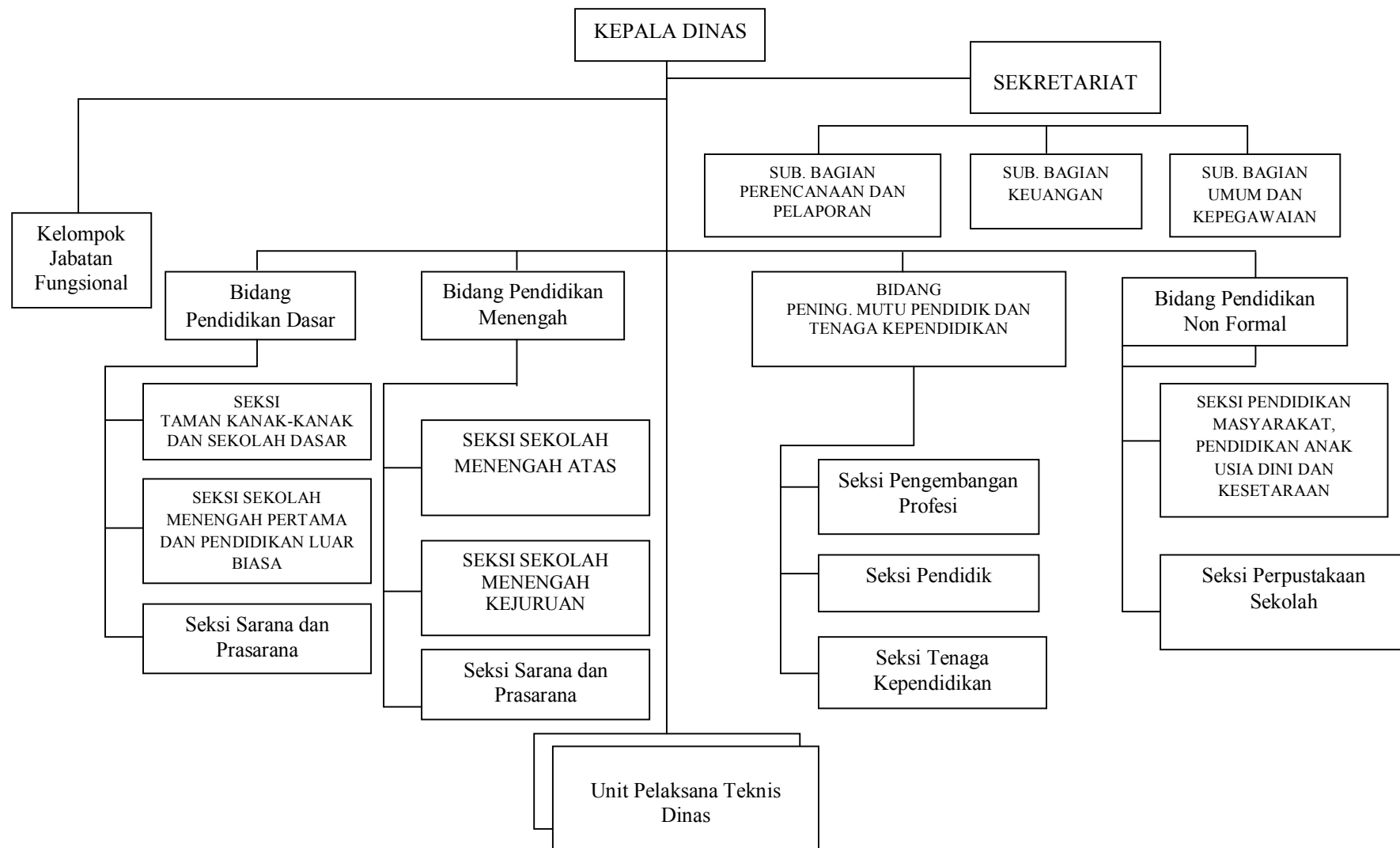
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten memiliki pegawai berjumlah 117 orang termasuk kepala dinas yang siap melayani berbagai kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten berstatus PNS berjumlah 85 orang dan berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) berjumlah 18 orang dengan latar pendidikan yang berbeda-beda. Gambaran mengenai

latar belakang pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagai berikut:

**Tabel 4. Latar Belakang Pendidikan Pegawai Tahun 2013**

| No            | Jabatan       | Tingkat Pendidikan |     |     |         |    |    | Jml |
|---------------|---------------|--------------------|-----|-----|---------|----|----|-----|
|               |               | SD                 | SMP | SMA | Diploma | S1 | S2 |     |
| 1             | Kepala Dinas  | -                  | -   | -   | -       | -  | 1  | 1   |
| 2             | Sekretaris    | -                  | -   | -   | -       | -  | 1  | 1   |
| 3             | Kepala Bidang | -                  | -   | -   | -       | 1  | 3  | 4   |
| 4             | Kepala Subbag | -                  | -   | -   | -       | 1  | 2  | 3   |
| 5             | Kepala Seksi  | -                  | -   | -   | -       | 4  | 7  | 11  |
| 6             | Pengawas      | -                  | -   | -   | -       | 3  | 13 | 16  |
| 7             | Staf          | 2                  |     | 27  | 2       | 25 | 7  |     |
| 8             | Staf CPNS     |                    |     | 4   | 3       | 10 |    | 17  |
| 9             | Penjaga       | -                  | 1   | -   | -       | -  | -  | 1   |
| <b>Jumlah</b> |               | 2                  | 1   | 31  | 5       | 44 | 34 | 117 |

(Sumber: Daftar Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2013)



**Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten**

### **3. TK Pertiwi Tlogo**

#### **a) Profil Sekolah**

TK Pertiwi Tlogo merupakan TK di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten yang beralamat di Desa Tlogo Kecamatan Prambanan. TK Pertiwi Tlogo memiliki visi “Mewujudkan anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih baik” serta memiliki misi: 1) Mengupayakan pemerataan layanan kepada semua anak didik, 2) Mengupayakan peningkatan mutu dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, 3) Meletakkan dasar-dasar pendidikan secara terpadu, proporsional, utuh menyeluruh dan seimbang antara aspek-aspek moral, intelektual, dan emosional, kognitif, bahasa, dan psikomotorik, 4) Mempersiapkan anak sedini mungkin agar kelak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Profil Sekolah TK Pertiwi Tlogo, 2014).

#### **b) Keadaan Pendidik**

TK Pertiwi Tlogo memiliki jumlah pendidik sebanyak 5 orang yang kesemuanya adalah perempuan. Gambaran mengenai keadaan pendidik yang dimiliki TK Pertiwi Tlogo dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5. Keadaan Pendidik di TK Pertiwi Tlogo Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status**

| Status           | Jenis Kelamin |   | Status Pegawai |
|------------------|---------------|---|----------------|
|                  | L             | P |                |
| Guru Tetap       | -             | 3 | PNS            |
| Guru Tidak Tetap | -             | 2 | Wiyata Bakti   |
| Jumlah           | -             | 5 |                |

(Sumber: Data Keadaan Pendidik TK Pertiwi Tlogo)

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa pendidik di TK Pertiwi Tlogo semua adalah perempuan dan belum semua pendidik menjadi guru tetap.

c) Keadaan Siswa

Gambaran mengenai siswa di TK Pertiwi Tlogo berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 6. Keadaan Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun Pelajaran 2014/2015**

| Kelompok | Jumlah Siswa | Jenis Kelamin |    |
|----------|--------------|---------------|----|
|          |              | L             | P  |
| A        | 27           | 17            | 10 |
| B        | 27           | 15            | 12 |
| Jumlah   | 54           | 27            | 27 |

(Sumber: Data Keadaan Siswa TK Pertiwi Tlogo)

Berdasarkan data tersebut di atas jumlah siswa kelompok kelas sama, dilihat dari perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak memiliki selisih jumlah yang cukup banyak. Sehingga hal tersebut tidak begitu menjadi suatu perbedaan terkait jenis kelamin pada peserta didik.

#### 4. SD Negeri 1 Prambanan

##### a) Profil Sekolah

SD Negeri 1 Prambanan merupakan salah satu SD di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten yang beralamat di Jalan Yogya-Solo Km. 17 Prambanan, Klaten. Sekolah yang memiliki akreditasi A tersebut memiliki visi “Siswa cerdas, terampil, berkarakter, agamis, dan berbudaya” serta memiliki misi: 1) Melaksanakan pembelajaran secara PAIKEM (Pembelajaran aktif, Inovatif, Kreatif, Efektis, Menyenangkan), 2) Meningkatkan sumber daya manusia, 3) Membina budi pekerti yang luhur, 4) Membina akhlakul karimah siswa sesuai agama masing-masing, 5) Membina potensi siswa di bidang seni budaya (Profil Sekolah SD Negeri 1 Prambanan, 2014).

##### b) Keadaan Pendidik

SD Negeri 1 Prambanan memiliki jumlah pendidik sebanyak 8 orang yang berkualifikasi S1 dan 1 orang yang berkualifikasi D2. Gambaran mengenai keadaan pendidik yang dimiliki SD Negeri 1 Prambanan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7. Keadaan Pendidik di SD Negeri 1 Prambanan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun Pelajaran 2014/2015**

| No     | Status           | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|--------|------------------|---------------|-----------|--------|
|        |                  | Laki-laki     | Perempuan |        |
| 1      | Guru Tetap       | 3             | 5         | 8      |
| 2      | Guru Tidak Tetap | -             | 1         | 1      |
| 3      | Guru Bantu       | -             | -         | -      |
| Jumlah |                  | 3             | 6         | 9      |

(Sumber: Data Keadaan Pendidik SD Negeri 1 Prambanan)



Dari tabel dapat diketahui jumlah guru di SD Negeri 1 Prambanan berdasarkan jenis kelamin. Dimana kepala sekolah di SD Negeri 1 Prambanan adalah seorang perempuan sehingga tidak ada perbedaan gender di SD Negeri 1 Prambanan dalam kepengurusan organisasi sekolah.

c) Keadaan Siswa

Gambaran mengenai keadaan siswa di SD Negeri 1 Prambanan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 8. Keadaan Siswa di SD Negeri 1 Prambanan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun Pelajaran 2014/2015**

| Kelas  | Jumlah Siswa | Jenis Kelamin |    |
|--------|--------------|---------------|----|
|        |              | L             | P  |
| I      | 22           | 14            | 8  |
| II     | 41           | 20            | 21 |
| III    | 33           | 18            | 15 |
| IV     | 22           | 9             | 13 |
| V      | 39           | 23            | 16 |
| VI     | 33           | 13            | 20 |
| Jumlah | 190          | 97            | 93 |

(Sumber: Data Keadaan Siswa SD Negeri 1 Prambanan)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah siswa SD Negeri 1 Prambanan antara siswa laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan jumlah yang tidak terpaut banyak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam penerimaan siswa di SD Negeri 1 Prambanan.

## **5. SMP Negeri 1 Prambanan**

### **a) Profil Sekolah**

SMP Negeri 1 Prambanan merupakan salah satu SMP di Kabupaten Klaten yang beralamat di Jalan Raya Solo-Yogya Km. 47 Kongklangan, Sanggrahan, Prambanan, Klaten 57454. SMP Negeri 1 Prambanan memiliki visi “Berbudi Pekerti Luhur, Cerdas, Berkarakter dan Kompetitif” serta memiliki misi: 1) Menumbuhkan kembangkan penghayatan terhadap ajaran agama dan budi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari, 2) Mengefektifkan pembelajaran dan bimbingan untuk mengoptimalkan potensi akademik siswa, 3) Mengembangkan budaya tertib, disiplin, beretika, dan berkarakter, 4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meraih prestasi bidang akademik/nonakademik yang kompetitif (Profil Sekolah SMP Negeri 1 Prambanan, 2014).

### **b) Keadaan Pendidik**

SMP Negeri 1 Prambanan memiliki jumlah pendidik sebanyak 45 orang yang berkualifikasi S1 sejumlah 38 orang, S2 sejumlah 2 orang, DII/Sarmud sejumlah 1 orang, DII sejumlah 2 orang, dan SMTA/PGSLP sejumlah 2 orang. Gambaran mengenai keadaan pendidik di SMP Negeri 1 Prambanan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 9. Keadaan Pendidik di SMP Negeri 1 Prambanan Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No     | Pangkat/Golongan | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|--------|------------------|---------------|-----------|--------|
|        |                  | Laki-laki     | Perempuan |        |
| 1      | IV/a             | 18            | 21        | 39     |
| 2      | III/d            | -             | -         | 0      |
| 3      | III/c            | -             | 1         | 1      |
| 4      | III/b            | -             | 3         | 3      |
| 5      | III/a            | -             | 2         | 2      |
| Jumlah |                  | 18            | 27        | 45     |

(Sumber: Data Keadaan Guru SMP Negeri 1 Prambanan)

c) Keadaan Siswa

Gambaran mengenai keadaan siswa di SMP Negeri 1

Prambanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 10. Keadaan Siswa di SMP Negeri 1 Prambanan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun Pelajaran 2014/2015**

| Kelas  | Jumlah Siswa | Jenis Kelamin |     |
|--------|--------------|---------------|-----|
|        |              | L             | P   |
| VII    | 269          | 122           | 147 |
| VIII   | 248          | 112           | 136 |
| IX     | 233          | 91            | 142 |
| Jumlah | 750          | 325           | 425 |

(Sumber: Data Keadaan Siswa SMP Negeri 1 Prambanan)

Dari tabel di atas diketahui bahwa SMP Negeri 1 Prambanan memiliki jumlah siswa yang cukup banyak yaitu 750 orang. Jumlah siswa laki-laki sebanyak 325 orang dan siswa perempuan sebanyak 425 orang.

## 6. SMA Negeri 1 Prambanan

### a. Profil Sekolah

SMA Negeri 1 Prambanan merupakan salah satu SMA di Kabupaten Klaten yang beralamat di Jalan Manisrenggo Prambanan,

Klaten 57454. SMA Negeri 1 Prambanan memiliki visi “Terwujudnya prestasi unggul, berbudaya dan beretika lingkungan berakar pada Budaya Bangsa Indonesia” serta memiliki misi: 1) Melaksanakan pembelajaran dan layanan bimbingan efektif kepada peserta didik yang berorientasi pada proses dan hasil belajar yang produktif dan bermakna, 2) Mendorong dalam membantu terbentuknya manusia yang berbudaya, yaitu manusia yang berkarakter unggul, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur dan berkepribadian kuat seta beretika lingkungan yang didasari oleh penghayatan terhadap agamanya secara benar berakar pada Budaya Bangsa Indonesia, 3) Menumbuhkan semangat keunggulan, kebersamaan dalam keberagaman, kepekaan sosial dan mengembangkan budaya mutu secara intensif kepada segenap warga sekolah, 4) Mendorong dan membantu peserta didik dalam memahami dan mengenali potensi dirinya agar dapat memiliki lifeskill sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, 5) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan pihak sekolah, 6) Mendorong dan meningkatkan peserta didik agar mampu berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun jejaring (*networking*) dengan memanfaatkan ICT dan literasi Berbahasa Asing yang berguna dalam komunikasi regional, nasional dan internasional, 7) Mendorong terbentuknya perilaku dan

lingkungan yang tertib, bersih, sehat, indah, rindang, aman, nyaman dan ramah lingkungan untuk segenap warga sekolah, 8) Mendorong dan meningkatkan segenap pendidik dan peserta didik untuk meneliti dan melakukan publikasi ilmiah (Profil Sekolah SMA Negeri 1 Prambanan, 2014).

b) Keadaan Pendidik

SMA Negeri 1 Prambanan memiliki jumlah pendidik sebanyak 63 orang. Gambaran mengenai keadaan pendidik yang dimiliki SMA Negeri 1 Prambanan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 11. Keadaan Pendidik di SMA Negeri 1 Prambanan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun Pelajaran 2014/2015**

| No     | Status           | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|--------|------------------|---------------|-----------|--------|
|        |                  | Laki-laki     | Perempuan |        |
| 1      | Guru Tetap       | 25            | 25        | 50     |
| 2      | Guru Tidak Tetap | 3             | 10        | 13     |
| 3      | Guru Bantu       | -             | -         | -      |
| Jumlah |                  | 28            | 35        | 63     |

(Sumber: Data Keadaan Pendidik SMA Negeri 1 Prambanan)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa SMA Negeri 1 Prambanan berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa jumlah guru laki-laki sebanyak 25 orang berstatus guru tetap dan 3 orang verstatus guru tidak tetap. Jumlah guru perempuan sejumlah 25 orang berstatus guru tetap dan 10 orang berstatus guru tidak tetap. Perbandingan jumlah guru laki-laki dan perempuan tidak memiliki selisih yang cukup tinggi.

c) Keadaan Siswa

Gambaran mengenai keadaan siswa di SMA Negeri 1 Prambanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 12. Keadaan Siswa di SMA Negeri 1 Prambanan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun Pelajaran 2014/2015**

| Kelas  | Jumlah Siswa | Jenis Kelamin |     |
|--------|--------------|---------------|-----|
|        |              | L             | P   |
| I      | 266          | 94            | 172 |
| II     | 227          | 83            | 144 |
| III    | 149          | 91            | 157 |
| Jumlah | 742          | 268           | 473 |

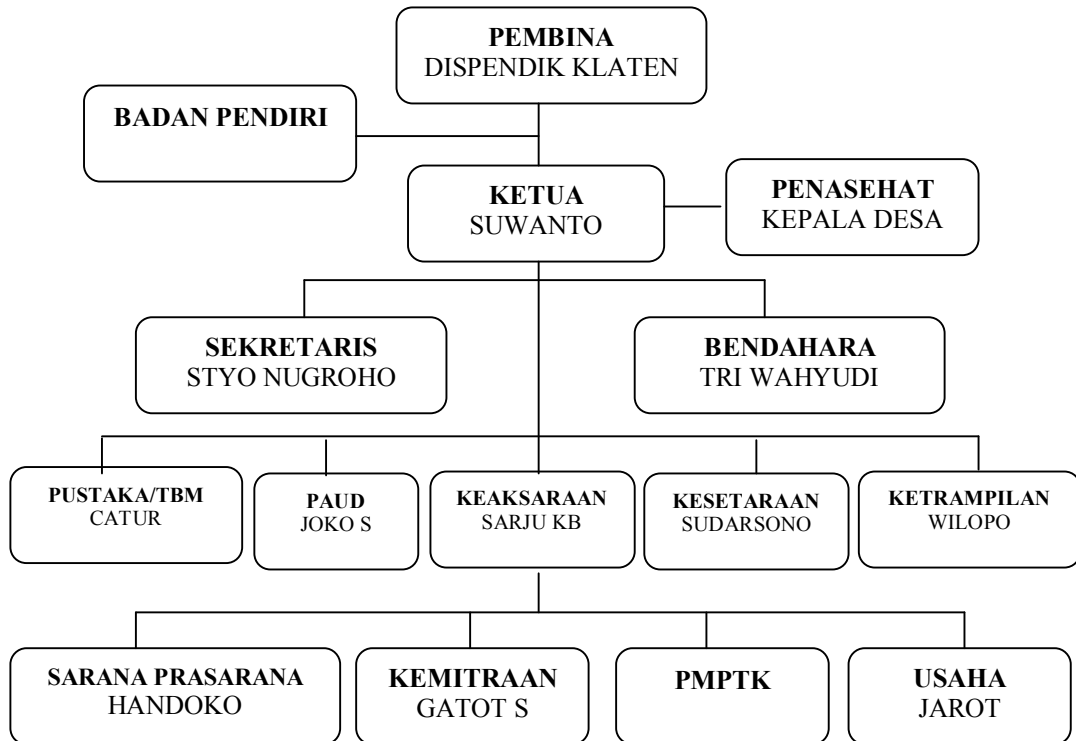
(Sumber: Data Keadaan Siswa SMA Negeri 1 Prambanan)

Dari tabel di atas, diketahui bahwa SMA Negeri 1 Prambanan memiliki jumlah siswa keseluruhan 742 orang pada tahun ajaran 2014/2015 dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 268 orang dan siswa perempuan sejumlah 473 orang. Hal tersebut dapat diketahui bahwa perbandingan antara jumlah siswa laki-laki dan perempuan di SMA Negeri 1 Prambanan lebih banyak siswa perempuan.

## 7. PKBM Cipta Karya

PKBM Cipta Karya merupakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang beralamat di Desa Pereng Kecamatan Prambanan Klaten. PKBM Cipta Karya mewadahi berbagai aktivitas warga Pereng baik dari segi ekonomi maupun sosial masyarakat. Kerajinan kayu merupakan bentuk kegiatan masyarakat yang dibina oleh PKBM Cipta Karya sebagai sarana untuk belajar serta menambah penghasilan. Selain itu ada juga kegiatan seperti sanggar warga bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu. PKBM yang terletak diatas bukit ini diketuai oleh bapak SW

yang menjadi penggerak dalam kegiatan masyarakat di Desa Pereng Kecamatan Prambanan. Adapun gambaran kepengurusan PKBM Cipta Karya dapat diamati dari bagan berikut ini:



**Gambar 7. Struktur Organisasi PKBM Cipta Karya**  
(Sumber: Struktur Organisasi PKBM Cipta Karya)

Sebagai lembaga pendidikan non formal yakni berbasis masyarakat, dari bagan organisasi di atas dapat diketahui bahwa PKBM Cipta Karya dalam berbagai programnya seperti Taman Baca Masyarakat (TBM, PAUD, keaksaraan, keterampilan juga ada pula kesetaraan. Sehingga dalam kegiatan sosialisasi PUG oleh Bidang PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, PKBM juga merupakan bagian dari ranah sosialisasi PUG dalam pendidikan.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah**

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari proses implementasi sebelum suatu kebijakan tersebut diimplementasikan. Untuk melihat proses Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, peneliti mengamati berdasarkan beberapa aspek yang dikemukakan oleh George C. Edwards III yakni komunikasi, sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

#### **a. Komunikasi**

Kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 terkait pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Pendidikan merupakan salah satu unsur dalam peningkatan pembangunan negara. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan agar lebih menjamin semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif, dan memiliki kontrol serta mendapat manfaat dari pembangunan pendidikan, sehingga laki-laki dan perempuan dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Strategi



kesetaraan gender diwujudkan melalui pengarusutamaan gender yang harapannya dapat diterapkan di sekolah-sekolah agar seluruh aspek pembangunan pendidikan memiliki responsif gender dan lebih menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki.

Dinas pendidikan merupakan ujung tombak pendidikan pada tingkat daerah yang menjadi penggerak dalam realisasi PUG bidang pendidikan. Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 terkait pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan menjadi acuan bagi dinas pendidikan dalam mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender yang dicanangkan pemerintah dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang mana pendidikan merupakan salah satu ujung tombak pembangunan nasional.

Suatu kebijakan akan berjalan dengan efektif apabila para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan melaksanakan persiapan terkait hal-hal yang berhubungan dalam pelaksanaan kebijakan dan diperlukan proses komunikasi berupa penyampaian informasi mengenai kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan. Sosialisasi pengarusutamaan gender dilakukan dengan memberikan pengarahan dan pemahaman. Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi pengarusutamaan gender yakni Dasar Hukum, Ciri Khas Seks dan Gender, Pengertian Gender, Proses Konstruksi Gender, Karakteristik Gender, Bentuk Diskriminasi, Gender

menjadi suatu masalah dan Gender tidak menjadi suatu masalah, Latar Belakang PUG Pendidikan, Pengertian-pengertian tentang Gender, serta Contoh Bahan Ajar Bias Gender.

**b. Sumberdaya**

**1) Sumber Daya Manusia**

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ditentukan salah satunya oleh faktor sumber daya manusia, dikarenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Dalam implementasi kebijakan PUG dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, yang menjadi tim pelaksanaannya adalah staf yang ada di subbag Pendidikan Non Formal (PNF), seperti yang diutarakan oleh TH dalam wawancaranya berikut ini:

“Gender adalah bagian dari bidang PNF yang mana kasi perpustakaanlah yang bertanggung jawab pada pelaksanaannya” (TH/20 Juni 2014)

Bidang Pendidikan Non Formal merupakan bidang yang memiliki tugas dalam pengelolaan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesertaan serta Perpustakaan Sekolah. Gender sebagai bagian dari ranah tanggun jawab Bidang Non Formal diamanahkan oleh kasi perpustakaan.

**2) Sumber Daya Anggaran**

Sumber daya anggaran sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan. Dalam Surat keputusan Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.1/5314/11 disebutkan bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten segala biaya dibebankan pada Anggaran Pengarusutamaan Gender pada APBD II Kabupaten Klaten Tahun 2013 sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh TH berikut ini:

“Pelaksanaan PUG di Dinas Pendidikan Klaten itu bersumber dari APBD. Dari sumber yang sangat terbatas itu jadi untuk pelaksanaan pada tingkat sosialisasi dan pemetaan sekolah-sekolah yang ditunjuk”(TH/20 Juni 2014).

Sumber dana yang hanya dari APBD tersebut dirasa minim untuk dapat dipergunakan dalam pelaksanaan PUG pada seluruh sekolah di Kabupaten Klaten. Sehingga baru sebatas sosialisasi yang mampu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten pada beberapa sekolah yang telah ditunjuk. Alokasi dana yang telah dianggarkan tersebut oleh Bidang PNF terkhusus pada seksi perpustakaan telah digunakan dengan semestinya sesuai dengan alokasi dana yang ada. Besarnya dana yang dibutuhkan juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pelaksanaan kebijakan. Apabila sumber dana yang dibutuhkan kurang dalam implementasi kebijakan maka akan menghambat dalam kegiatan implementasi PUG dalam

pendidikan. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh TH dalam wawancara berikut ini:

“Faktor pendukung ya pemahaman itu butuh dana, penerapan juga butuh dana. Secara konkrit pemetaan butuh ini butuh ini juga butuh dana. Mungkin pendanaan juga butuh dana. Untuk tenaga juga perlu mengetahui dan dipahami” (TH/20 Juni 2014).

Sumber dana merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan. Maka suatu kebijakan akan terealisasi dengan baik jika dukungan dana terpenuhi.

### **3) Sumber Daya Fasilitas**

Faktor penting dalam implementasi kebijakan selain sumber daya manusia adalah fasilitas. Suatu kebijakan dengan adanya sumber daya manusia yang berkualifikasi baik namun tidak didukung dengan fasilitas yang memadai akan menjadikan kurang maksimalnya dalam pelaksanaan kebijakan. Selain fasilitas berupa laptop/komputer serta projector, dalam pelaksanaan sosialisasi juga didukung dengan adanya materi yang akan disampaikan serta dibagikan oleh para peserta. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada 13 sekolah baik formal maupun non formal pada tingkat pendidikan TK, SD, SMP dan SMA, serta lembaga non formal yakni PKBM di Kecamatan Prambanan Klaten. Sebagai fasilitator, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten telah melakukan fasilitasi dalam pemahaman

gender serta pengarusutamaan nya bagi sekolah-sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh TH berikut ini:

“Untuk peran dari dinas pendidikan tentang PUG untuk saat ini sepanjang kami tahu baru bisa memfasilitasi atau membedakan pengertian dasar dari gender itu sendiri sehingga siswa anak didik kami tahu tentang keberadaan, pembeda, fungsinya. Dari situ dulu anak-anak secara dasar tahu” (TH/20/06/2014).

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang dibutuhkan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pengarusutamaan gender dengan memberikan materi baik melalui penayangan slide maupun berupa lembaran materi telah diberikan. Melalui materi sosialisasi yang disampaikan sangat membantu dalam pelaksanaan sosialisasi PUG dalam implementasinya di sekolah dan lembaga.

**Tabel 13. Ketersediaan Sumber Daya dalam Pelaksanaan Sosialisasi Implementasi Kebijakan PUG**

| No | Sumber Daya           | Bentuk                                          | Fungsi                                              |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | Sumber Daya Manusia   | Kompetensi, Kualifikasi, keterampilan pelaksana | Mengatur pelaksanaan kebijakan PUG dalam pendidikan |
| 2  | Sumber Daya Anggaran  | APBD                                            | Memenuhi kebutuhan sosialisasi PUG                  |
| 3  | Sumber Daya Fasilitas | Laptop/komputer, projector, materi              | Memudahkan penyampaian materi implementasi PUG      |

*(Sumber: Diolah dari hasil wawancara)*

### **c. Disposisi Pelaksana**

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Disposisi yang baik yang dimiliki oleh implementor maka suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan sosialisasi pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dapat dilihat dari respon kasi perpustakaan selaku seorang yang memiliki tanggung jawab terkait kesetaraan gender yang merupakan tugas dari bidang PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagai berikut:

“Dalam merealisasikan kebijakan pengarusutamaan gender sepanjang jalur pendidikan itu ditempatkan pada porsi yang sesuai dengan keinginan anak didiknya dan bisa diterapkan pada kehidupan masing-masing saya kira gender bisa berjalan dengan sendirinya” (TH/20 Juni 2014).

Dari pernyataan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tenaga atau pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten perlu tenaga khusus dalam menangani gender dalam pendidikan, agar tanggung jawab pegawai dapat dilaksanakan dengan fokus pada kajian yang menjadi ranahnya. Sehingga gender dan pengarusutamaannya dalam pendidikan dapat terarah dan maksimal.

### **d. Struktur Birokrasi**

#### **1) *Standard Operating Procedure (SOP)***

SOP merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Sehingga arah implementasi dalam kebijakan

sesuai dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, SOP yang digunakan adalah Surat Keputusan pelaksanaan sosialisasi pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Surat keputusan tersebut hampir sama dengan SOP, yang didalamnya terdapat petunjuk pelaksanaan sosialisasi PUG mulai dari penetapan sumber daya manusia, anggaran, bahan materi serta pelaporan. Dalam wawancara peneliti dengan TH, peneliti tidak menemukan adanya POKJA PUG bidang pendidikan sebagai petunjuk teknis dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender. Peneliti hanya diberi laporan pertanggungjawaban kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.1/5314/11. Hal ini diutarakan oleh TH dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sendiri belum memiliki POKJA PUG selain itu karena keterbatasan tenaga yang ada” (TH/20 Juni 2014).

Belum adanya POKJA PUG dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan membuat implementasi kebijakan kurang bisa terarah sehingga pemahaman terkait pengarusutamaan gender dalam pendidikan

yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut belum dapat terwujud dengan baik.

## **2) Penyebaran Tanggung Jawab**

Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten baru sebatas sosialisasi yang dilakukan pada bulan Desember Tahun 2013 lalu. Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten pengarusutamaan gender (PUG) ada sejak tahun 2002, yang mana staf yang bertanggung jawab menangani tentang gender itu berubah-ubah atau beralih peran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh kasi perpustakaan Dinas Pendidikan sebagai berikut:

“PUG ada sejak 2002 atau 2004. Saya baru tahun 2012 untuk ditugasi gender. Kalau saya mendengar tentang gender sejak ditugasi“ (TH/20 Juni 2014).

Dari waktu yang belum lama tersebut oleh staf yang menangani gender, program yang dijalankan memang baru sebatas sosialisasi pada sekolah-sekolah. Pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan tersebut diperkuat dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/5314/11 tentang petugas pendaftaran, narasumber dan penyusun makalah penyelenggaraan program pendidikan non formal PUG serta dokumentasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan sosialisasi pengarusutamaan gender kepada sekolah oleh koordinator yang menangani gender. Dimana



sejumlah 13 sekolah/lembaga diundang untuk diberikan sosialisasi pengarusutamaan gender.

**Tabel 14. Daftar Sekolah/Lembaga Penerima Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG)**

| NO | NAMA                   | SEKOLAH                    |
|----|------------------------|----------------------------|
| 1  | Tribekti               | SDN 1 Prambanan            |
| 2  | Najmu Munawaroh W      | SDN 1 Brajan               |
| 3  | Suwarni, S.Pd          | SDN1 Randusari             |
| 4  | Sulasmi, S.Pd          | SDN1 Joho                  |
| 5  | Ester Lely Susilo      | SDN1 Cucukan               |
| 6  | Tri Suhartini, S.Pd    | SDN 1 Kebondalem Lor       |
| 7  | Triningsih             | SDN 1 Sengon               |
| 8  | Sendang Wahyuningsih   | PAUD Taji                  |
| 9  | Sri Sudiyati           | TKP Tlogo                  |
| 10 | Sugini                 | TKP 1 Brajan               |
| 11 | M. Suryoto, S.Pd, M.Pd | SMPN 1 Prambanan           |
| 12 | Drs. Suwito            | SMAN 1 Prambanan           |
| 13 | Suwanto                | PKBM Cipta Karya Prambanan |

(Sumber: Kasi Perpustakaan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2013)

Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender oleh Dinas Pendidikan yang baru sebatas sosialisasi tidak terlepas dari berbagai hambatan. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sendiri yakni terkait dana. Sehingga dalam realisasinya Dinas Pendidikan baru sebatas sosialisasi. Sebagaimana yang dituturkan oleh staff Dinas Pendidikan Bidang PNF berikut:

“Faktor pendukung ya pemahaman itu butuh dana, penerapan juga butuh dana. Secara konkrit pemetaan butuh ini butuh ini juga butuh dana. Mungkin pendanaan

juga butuh dana. Untuk tenaga juga perlu mengetahui dan dipahamkan” (TH/20 Juni 2014).

Berdasarkan hal tersebut Dinas Pendidikan dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender masih pada tahap awal dalam proses kebijakan, yakni baru sebatas sosialisasi kepada sekolah-sekolah. Sehingga masih perlu dibuat suatu renstra pug sebagai agenda kegiatan tahunan oleh dinas pendidikan dalam mewujudkan PUG dalam pendidikan, serta membentuk tenaga kerja dibidang PUG.

Dari proses implementasi kebijakan PUG dalam pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan, implemntasi berupa sosialisai tertuang dalam SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.1/5314/11 tentang penyelenggaraan program non formal yaitu pengarusutmaan gender dalam pendidikan yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan formal dan non formal.

**a. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Pendidikan Formal**

Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dilaksanakan pada pendidikan formal di tiap jenjang pendidikan. Keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dari 13 sekolah sebagai pengimplementasian kebijakan gender oleh Dinas Pendidikan, peneliti melakukan penelitian pada satu sekolah pada tiap jenjang pendidikan. Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender oleh Dinas Pendidikan pada jenjang pendidikan formal masih sebatas

sosialisasi, seperti yang diungkapkan oleh koordinator bidang gender Dinas Pendidikan sebagai berikut:

“Pelaksanaan PUG di Dinas Pendidikan Klaten bersumber dari APBD. Dari sumber yang sangat terbatas tersebut digunakan untuk pelaksanaan sosialisasi dan pemetaan sekolah-sekolah yang ditunjuk.”(A-0/ Juni 2014)

Jenjang pendidikan formal yang terdiri dari TK, SD, SMP dan SMA oleh Dinas Pendidikan telah diberikan sosialisasi gender sebagai bentuk implementasi kebijakan pengarusutamaan gender. Dalam hal ini dapat diamati dari kegiatan sosialisasi, implementasi, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan PUG, serta seperti apa kesetaraan gender telah terwujud di sekolah.

#### **1) Sosialisasi Pengarusutamaan Gender**

Dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender pada jenjang pendidikan taman kanak-kanak (TK), sosialisasi telah diberikan kepada kepala sekolah TK Pertiwi Tlogo Prambanan Klaten sebagaimana diketahui pernyataan yang disampaikan sebagai berikut:

“Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten telah melakukan kegiatan sosialisasi gender.”(A-1/11 Juni 2014)

Di tingkat sekolah dasar kegiatan sosialisasi juga telah diberikan oleh dinas pendidikan sebagai upaya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender. Salah satu sekolah dasar yang mendapatkan sosialisasi oleh dinas pendidikan adalah SD N 1 Prambanan Klaten dengan hadir dalam kegiatan sosialisasi

pemahaman gender, berdasarkan pernyataan kepala sekolah sebagai berikut:

“Iya, Dinas Pendidikan telah melakukan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender. Kepala sekolah di undang oleh pihak Dinas pendidikan dalam kegiatan sosialisasi gender dan pelaksanaannya di sekolah untuk di sosialisasikan pada pihak sekolah.”(A-2/31 Mei 2014)

Pada sekolah menengah pertama sosialisasi pengarusutamaan gender pun telah diberikan. Yakni di SMP N 1 Prambanan Klaten. Seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah berikut ini:

“Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten yakni adanya sosialisasi. Secara kedinasan ada surat yang diberikan ke sekolah-sekolah terkait kegiatan sosialisasi tersebut. pada tahun 2012/2013 pemerintah juga memberikan subsidi dalam pelaksanaan gender di sekolah. Dimana kebijakan tersebut memberikan manfaat kepada bapak dan ibu yang berkaitan dengan siswa bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan.”(A-3/10 Juni 2014)

Sama halnya dengan jenjang pendidikan lain seperti TK, SD dan SMP. Di SMA N 1 Prambanan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender juga baru sebatas sosialisasi. Seperti yang diungkapkan kepala sekolah:

“Implementasi pengarusutamaan gender di sekolah oleh Dinas pendidikan baru tahap sosialisasi.”(A-4/7 Juli 2014)

Hal ini diperkuat dari dokumen presensi atau kehadiran dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten pada bulan Desember tahun 2013 serta adanya anggaran dana untuk sekolah dalam melaksanakan implementasi pengarusutamaan gender di sekolah.

## **2) Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Sekolah**

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di jenjang pendidikan formal masih sebatas sosialisasi kepada guru-guru oleh kepala sekolah, yang mana meneruskan sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala sekolah TK Pertiwi Tlogo sebagai berikut:

“Penerapan PUG di TK belum tepat atau belum waktunya, dan baru pertama kali PUG di lakukan di TK ini.”(A-1/11 Juni 2014)

Sehingga pengarusutamaan gender di TK Pertiwi Tlogo masih sebatas guru-guru telah mengetahui atau memahami pengarusutamaan gender itu sendiri. Guna menunjang kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan, di TK Pertiwi Tlogo juga mendapat dana bantuan guna pelaksanaan kegiatan PUG di sekolah, namun penggunaannya kurang tepat. Seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah TK Pertiwi Tlogo berikut ini:

“Alokasi dana untuk kegiatan gender juga diberikan bagi sekolah. Yang perlu ditekankan lebih adalah pemahaman tentang gender itu sendiri, karena kami memang belum paham betul seperti apa gender itu jika diterapkan di sekolah.”(A-1/11 Juni 2014)

Sama halnya dengan TK Pertiwi Tlogo, implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di SD N 1 Prambanan oleh Dinas Pendidikan dalam pelaksanaannya baru tahap sosialisasi, sehingga belum ada program khusus PUG di sekolah. Sehingga pengarusutamaan gender di sekolah diintegrasikan dengan pembelajaran di kelas dengan secara implisit guru menjabarkan suatu pelajaran yang responsif gender, serta dalam berbagai aktivitas sekolah yang melibatkan siswa baik laki-laki maupun perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah SD N 1 Prambanan berikut ini:

“Program dari Dinas Pendidikan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender bagi sekolah adalah sosialisasi. Dari sosialisasi tersebut diharapkan untuk disebarluaskan atau disosialisasikan kepada guru dan siswa, yang mana tentunya harapan dari Dinas Pendidikan dapat bermanfaat dan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.”(A-2/31 Mei 2014)

Pemahaman gender dan pengarusutamaannya oleh kepala sekolah dan guru di SMP N 1 Prambanan secara eksplisit nampak pada kegiatan Dharma Wanita serta terlihat dalam berbagai kegiatan sekolah seperti birokrasi sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah berikut ini:

“Program awal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah sosialisasi kepada jajaran guru dan karyawan. Sosialisasi diberikan kepada kepala sekolah yang kemudian disosialisasikan kepada guru dengan menyesuaikan tupoksi dan tidak terlepas dari perannya sebagai tenaga pendidikan.”(A-3/10 Juni 2014)

Dalam penerapannya di SMA, karena PUG baru sebatas sosialisasi sehingga tidak ada program yang dilakukan dalam kegiatan PUG itu sendiri. seperti yang dijelaskan oleh bapak kepala sekolah berikut:

“Belum ada program terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender karena baru tahap sosialisasi.”(A-4/7 Juli 2014)

### **3) Kesetaraan Gender di Sekolah**

Tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan Kabupaten Klaten pada sekolah adalah memberikan pemahaman kepada guru terkait gender serta pengarusutamaannya yang outputnya ialah kesetaraan antara laki-laki maupun perempuan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan, kesetaraan gender di TK Pertiwi Tloga tidak ada diskriminasi baik pada siswa laki-laki maupun perempuan. Secara eksplisit nampak guru tidak membedakan dalam mengajar dan memberikan perhatian bagi siswa-siswanya.

Walaupun kegiatan sosialisasi pengarusutamaan gender ini adalah pertama kalinya di SD N 1 Prambanan, namun kesetaraan gender memang telah ada sebelum dan sesudah

adanya kegiatan sosialisasi dari dinas pendidikan. Kesetaraan gender nampak pada berbagai kegiatan sekolah yang secara implisit terlihat dari kegiatan tersebut karena memang tidak ada alokasi waktu khusus untuk kegiatan PUG itu sendiri. Berdasarkan apa yang telah diungkapkan kepala sekolah berikut:

“Adapun hasil sosialisasi sudah terlihat dari tidak adanya perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Seperti contoh bahwa antara siswa laki-laki dan siswa perempuan berkesempatan yang sama untuk ambil bagian dalam pencapaian prestasi. Banyak anak perempuan yang mendapatkan prestasi, bahkan sebagian besar perempuan yang memegang prestasi 1, 2 dan 3.”(A-2/31 Mei 2014)

Melihat pemahaman terkait gender oleh guru dan kepala sekolah kesetaraan gender di SMP N 1 Prambanan memang telah terwujud. Terbukti dari data yang diperoleh peneliti tentang jumlah guru yang banyak juga perempuan serta siswa yang justru lebih banyak siswa perempuan. Selain itu berbagai aktivitas atau kegiatan sekolah yang ada seperti Dharma Wanita, kemudian kegiatan peningkatan diri bagi guru juga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan tugas sesuai tupoksi.

“Kesetaraan gender di sekolah nampak pada kegiatan Dharma Wanita. Seperti contoh dalam kegiatan kepanitiaan atau kepengurusan selalu melibatkan guru laki-laki maupun guru perempuan.”(A-3/10 Juni 2014)



Dalam hal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, di SMA N 1 Prambanan sendiri tidak adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah ini:

“Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di sekolah ini diupayakan tidak adanya diskriminasi baik laki-laki maupun perempuan, dan emansipasi itu tetap ada. guru laki-laki dan guru perempuan memiliki komposisi yang sama dan juga tidak ada rasio. Sebagai contoh, pemilihan wakil kepala sekolah dilakukan secara terbuka. Baik guru laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama. Dari segi manajemen tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, semua memiliki peluang yang sama untuk menjadi bagian dari manajemen sekolah. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di sekolah terlihat pada berbagai kegiatan dan organisasi seperti Darma Wanita, OSIS serta tugas secara struktural sekolah.”(A-4/7 Juli 2014)

Kesetaraan gender di sekolah terlihat dalam berbagai kegiatan sekolah. Hal ini diperkuat dalam dokumen hasil penelitian yang dilakukan peneliti yakni dari struktur pengurus sekolah tidak adanya perbedaan baik laki-laki maupun perempuan serta melihat dari jumlah siswa laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin. Selain itu kegiatan siswa di sekolah juga terbuka bagi semua siswa tanpa membedakan.

**Tabel 15. Hasil Sosialisasi PUG pada Pendidikan Formal**

| <b>Sekolah</b>   | <b>Hasil</b>                                                                      | <b>Tindak Lanjut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TKP Tlogo        | Jajaran guru dan kepala sekolah paham akan gender dan pengarusutamaan di sekolah. | Tidak ada perlakuan yang berbeda bagi siswa baik laki-laki maupun perempuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SDN 1 Prambanan  | Warga sekolah paham akan gender dan pengarusutamaan.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada perlakuan yang berbeda bagi siswa laki-laki maupun perempuan</li> <li>• Baik guru laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam struktur kepala sekolah.</li> <li>• Aktivitas sekolah memberikan kesempatan yang sama bagi siswa laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan diri.</li> </ul>                                                 |
| SMPN 1 Prambanan | Kepala sekolah dan guru mengerti akan gender dan pengarusutamaan.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Darma Wanita sebagai bentuk aktivitas bagi perempuan.</li> <li>• Kegiatan sekolah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| SMAN 1 Prambanan |                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas sekolah memberikan kesempatan yang sama bagi siswa laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan diri.</li> <li>• Guru laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan dan mengembangkan diri.</li> <li>• Struktur sekolah yang tidak ada batasan bagi perempuan dan laki-laki untuk diberi amanah dalam jabatan di sekolah.</li> </ul> |

(Sumber: Diolah dari hasil wawancara)

**b. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Pendidikan Non Formal**

Pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender oleh Dinas Pendidikan tidak hanya dilakukan pada sekolah formal, namun sekolah non formal pun juga menjadi sasaran dalam pelaksanaan PUG. Pelaksanaan pengarusutamaan gender pada jenjang pendidikan non formal dilakukan pada PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Salah satunya adalah PKBM Cipta Karya yang terletak di Prambanan Klaten. Sama halnya dengan pendidikan formal, pada pendidikan non formal atau di PKBM pelaksanaan PUG oleh dinas pendidikan baru sebatas sosialisasi yang bersama-sama dilakukan dengan jenjang pendidikan yang lain. Seperti yang diungkapkan oleh koordinator PKBM Cipta Karya berikut ini:

“Iya, Dinas Pendidikan telah melakukan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender.”(A-5/1 Juli 2014)

Dari kegiatan sosialisasi tersebut, dampak yang dirasakan oleh PKBM atau masyarakat sekitar sangat positif. Karena masyarakat kini telah memahami seperti apa itu gender. Terbukti dari berbagai kegiatan yang ada di masyarakat sekitar PKBM Cipta Karya tersebut ada sanggar kesenian yang diperuntukkan bagi warga disana yakni ibu-ibu dan bapak-bapak. Melalui sanggar tersebutlah dapat mempererat sosialisasi antar warga, sehingga antara laki-laki dan perempuan kini tidak ada pembedaan. Ibu-ibu pun tidak hanya berdiam diri di rumah namun juga turut dalam kegiatan di sanggar

meskipun pada waktu petang, yang mana biasanya para perempuan desa berada di rumah ketika waktu sudah malam.

Sehingga hambatan yang dirasa dalam pelaksanaan PUG sendiri tidak begitu besar, karena melalui sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten Klaten melalui koordinator PKBM yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat, masyarakat telah memahami peran masing-masing antara laki-laki dan perempuan.

“Implementasi pengarusutamaan gender menurut pandangan saya sampai saat ini baru sebatas sosialisasi, dan belum ada tindak lanjut lagi. Dari Dinas Pendidikan memang mensosialisasikan, dan kemudian saya sosialisasikan kepada elemen masyarakat.”(A-5/1 Juli 2014)

Sehingga kesetaraan gender nampak pada masyarakat sekitar PKBM Cipta Karya. Dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di PKBM yang notabene di masyarakat sama halnya dengan sekolah juga terdapat hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan PUG. Seperti yang diungkapkan oleh koordinator PKBM Cipta Karya sebagai berikut:

“Pemahaman tentang gender menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di masyarakat. Berbagai kegiatan masyarakat sudah mencakup gender, seperti karawitan yang awalnya khusus untuk ibu-ibu yang mana pemikiran masyarakat bahwa ketika sudah menjelang petang ibu-ibu harus sudah berada di rumah, namun kini dengan adanya kegiatan karawitan memberikan ruang sosialisasi bagi ibu-ibu, bahkan bapak-bapak juga turut dalam kegiatan karawitan.”(A-5/1 Juli 2014)

Meskipun hambatan muncul dalam pelaksanaan PUG namun kesetaraan gender terwujud di PKBM khususnya masyarakat sekitar. Masyarakat cukup antusias dengan kegiatan yang dibina oleh PKBM Cipta Karya yang dikelola bersama-sama. Seperti yang diutarakan oleh koordinator PKBM bapak SW berikut:

“Berbagai kegiatan masyarakat sudah mencakup gender, seperti karawitan yang awalnya khusus untuk ibu-ibu yang mana pemikiran masyarakat bahwa ketika sudah menjelang petang ibu-ibu harus sudah berada dirumah, namun kini dengan adanya kegiatan karawitan memberikan ruang sosialisasi bagi ibu-ibu, bahkan bapak-bapak juga turut dalam kegiatan karawitan.”(A-5/1 Juli 2014)

Hal ini diperkuat dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa di PKBM Cipta Karya yang bergerak dalam bidang kerajinan kayu ini, para pengrajin kayu tidak hanya laki-laki, namun perempuan juga menjadi pengrajin kayu. Hal tersebut tidak menjadi pembeda dalam hal pekerjaan baik laki-laki maupun perempuan. Selain usaha kerajinan yang dibina PKBM Cipta Karya, adanya kegiatan karawitan menjadikan kesadaran bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Perempuan yang dipandang hanya pantas mengurus urusan rumah, kini para perempuan juga turut bergabung dalam kegiatan desa.

**Tabel 16. Hasil Sosialisasi PUG pada PKBM**

| Sasaran          | Hasil                                                                                                                                                                       | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PKBM Cipta Karya | <ul style="list-style-type: none"><li>• Masyarakat paham tentang gender dan pengarusutamanya.</li><li>• Tidak ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Usaha kerajinan kayu yang tidak membatasi bagi perempuan untuk ikut dalam membuat kerajinan kayu sebagai sarana kegiatan bagi masyarakat.</li><li>• Adanya kegiatan bagi warga baik laki-laki maupun perempuan untuk <i>guyub</i> yakni sanggar kesenian.</li></ul> |

*(Sumber: Diolah dari hasil wawancara)*

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah**

Untuk mengetahui keberhasilan kebijakan yang telah dilaksanakan maka perlu dilihat dari faktor pendukung dan penghambat yang muncul. Pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten yang dilaksanakan pada pendidikan formal dan formal dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada pendidikan formal yakni di sekolah, terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat yang ditemui. Baik itu dari internal maupun eksternal sekolah. Di TK Pertiwi Tlogo sendiri penghambat dalam pelaksanaan

pengarusutamaan gender sendiri dirasa tidak ada penghambat yang berarti.

“Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan dirasa tidak ada. Pihak sekolah yang pasti menerima dan berusaha untuk melaksanakan kegiatan dari apa yang telah di sosialisasikan oleh Dinas Pendidikan. Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan gender di sekolah, karena sekolah memperoleh wawasan baru terkait gender dan pelaksanaannya.”(A-1/11 Juni 2014)

Dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di sekolah, hal yang menjadi kendala di SD N 1 Prambanan adalah tidak adanya waktu yang khusus dalam melaksanakan kegiatan terkait PUG. Seperti yang diungkapkan kepala sekolah berikut:

“Faktor penghambat dalam implementasi pengarusutamaan gender di sekolah adalah waktu. Adapun hasil dari sosialisasi sudah terlihat dari tidak adanya perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri.”(A-2/31 Mei 2014)

Dalam menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) di sekolah, faktor pendukung dalam implementasi kebijakan PUG di SMP N 1 Prambanan yakni adanya kesadaran dari para guru-guru terkait pentingnya PUG itu sendiri.

“Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender adanya pemahaman kesetaraan gender yang dijunjung tinggi. Adapun faktor penghambat lebih pada segi kegiatan fisik, yang mana masih mengedepankan keikutsertaan laki-laki daripada perempuan.”(A-3/10 Juni 2014)

Dalam pelaksanaan PUG di SMA N 1 Prambanan faktor yang menjadi pendukung dalam kegiatan ini adalah dari sumber daya sekolah itu sendiri yakni para guru-guru. Sebagaimana yang diungkapkan kepala sekolah berikut ini:

“Faktor pendukung dalam implementasi gender di sekolah ini adalah kesiapan teman-teman guru untuk menerima kebijakan yang ada. Adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut lebih pada naluri kewanitaannya saja. Misal seperti ada kegiatan-kegiatan ketika waktunya pulang karena terpancang waktu, namun bagi bapak-bapak waktu tidak menjadi suatu yang menjadi permasalahan.”(A-4/7 Juli 2014)

Berdasarkan hal tersebut faktor yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di sekolah adalah dukungan penuh pihak sekolah dalam mewujudkan gender dalam setiap aktivitas kegiatan sekolah. Para guru menerima dengan senang adanya sosialisasi gender yang dilakukan Dinas Pendidikan sehingga memberikan wawasan tentang gender dalam pendidikan. Selain itu kesiapan guru-guru dalam menerima segala kebijakan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk diterapkan di sekolah. Penghambat pelaksanaan gender di sekolah adalah terkait tidak adanya alokasi waktu khusus terkait PUG. PUG dilaksanakan dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran serta melalui aktivitas sekolah baik guru maupun siswa.



### **C. Pembahasan**

#### **1. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah**

Kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi ketidakadilan gender di Indonesia. Kebijakan ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Tujuan dikeluarkannya instruksi ini adalah meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan diatur dalam Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan.

Kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah adalah tentang pemahaman gender dan pengarusutamannya pada pendidikan formal dan non formal. Dinas Pendidikan merupakan ujung tombak pendidikan pada tingkat daerah yang menjadi penggerak dalam realisasi PUG bidang pendidikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh James E. Anderson bahwa rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, dan instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan (Arif Rohman, 2009). Untuk melihat proses

implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, peneliti menggunakan teori George Edward III. Dalam teori George Edward III disebutkan bahwa ada empat aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan, yakni sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut: a) Sumber Daya Manusia (*Staff*). Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kualitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran, b) Anggaran (*Budgetary*). Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, c) Fasilitas (*Facility*). Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan, d) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*).

Aspek pertama, yaitu komunikasi dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai gender dan pengarusutamaannya

dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten melalui sosialisasi. Untuk tingkat Dinas Pendidikan, sosialisasi yang didapat berasal dari Kemendikbud yang merupakan salah satu *policy makers* dari kebijakan tersebut. Untuk sosialisasi di tingkat Kabupaten Klaten dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dengan target sosialisasi kepala sekolah pada jenjang pendidikan formal yakni TK, SD, SMP, dan SMA, serta pendidikan non formal yaitu ketua PKBM.

Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan, Dinas Pendidikan melaksanakan kegiatan sosialisasi pengarusutamaan gender pada 13 sekolah/lembaga pada pendidikan formal maupun non formal di Kecamatan Prambanan Klaten. Tiga belas sekolah yang ditunjuk untuk diberikan sosialisasi pengarusutamaan gender tersebut yakni SDN 1 Prambanan, SDN 1 Brajan, SDN 1 Randusari, SDN 1 Joho, SDN 1 Cucukan, SDN 1 Kebondalem Lor, SDN 1 Sengon, PAUD Taji, TKP Tlogo, TKP 1 Brajan, SMPN 1 Prambanan, SMAN 1 Prambanan, dan PKBM Cipta Karya Prambanan.

Sosialisasi pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan memberikan materi terkait gender dan pengarusutamaannya yang terangkum dalam bahan materi yang disampaikan pada tanggal 17 Desember 2013. Kejelasan informasi yang diperoleh akan dapat membantu kepala sekolah dan ketua PKBM untuk mempersiapkan hal-hal yang menjadi tujuan dan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan

gender sehingga tidak terjadi *missed communication*. Pelaksanaan sosialisai sebagai langkah awal dalam implementasi kebijakan PUG dalam pendidikan sudah konsisten dengan apa yang tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 412.1/5314/11 dengan memberikan limpahan tanggungjawab kepada kasi perpustakaan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten yang sekaligus menangani gender dalam pendidikan.

Aspek kedua, yaitu sumber daya. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten memiliki staf dengan jumlah 117 orang, adapun gender dilimpahkan oleh Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) yakni kepada kasi perpustakaan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Dalam melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan, kasi perpustakaan memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan pada pendidikan formal dan non formal. Sumber daya kewenangan yang diberikan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten inilah yang akan sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan PUG.

Selain pelimpahan kewenangan, fasilitas juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan PUG dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten tentang penyelenggaraan pengarusutamaan gender sebagai program pendidikan non formal telah ditetapkan petugas pendaftaran, nara sumber dan

penyusun makalah dalam kegiatan sosialisasi PUG pada pendidikan formal dan non formal.

Selain kewenangan dan fasilitas, sumber daya anggaran juga sangat krusial demi kelancaran terlaksanannya kebijakan PUG dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Anggaran yang tersedia dari pemerintah daerah yaitu APBD dirasa kurang jika kebijakan tersebut diimplementasikan pada seluruh sekolah pada semua jenjang pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Klaten serta pada pendidikan non formal yang ranahnya lebih pada masyarakat. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) bahwa besarnya alokasi sumberdaya finansial mempengaruhi terhadap kebijakan. Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administratif dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.

Aspek yang ketiga adalah disposisi atau sikap pelaksana. Staf Dinas Pendidikan yakni Kasi Perpustakaan yang menangani kebijakan pengarusutmaan gender dalam pendidikan memiliki disposisi yang baik terhadap kebijakan tersebut meskipun selain tanggungjawabnya dalam perpustakaan juga memiliki tanggung jawab gender dalam pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan kegiatan sosialisasi kepada 13 sekolah/lembaga yang ditunjuk untuk mendapatkan sosialisasi PUG dalam pendidikan. Selain itu, keterbukaan Kasi Perpustakaan Dinas

Pendidikan dalam menerima kebijakan untuk dapat dilaksanakan dilaksanakan selama hal tersebut baik untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Klaten.

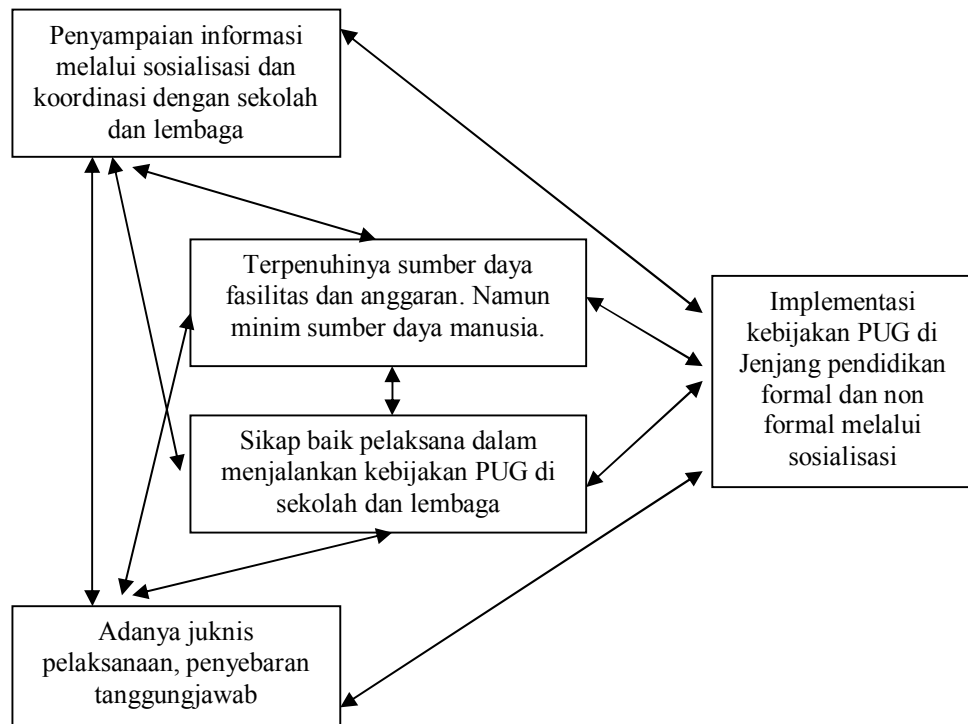
Disposisi dan kinerja yang baik dari pelaksanaan sosialisasi kebijakan PUG dalam pendidikan juga berhubungan dengan struktur birokrasi. Dalam struktur birokrasi harus terdapat dimensi SOP (*Standard Operating Procedure*) yang merupakan tata laksanaan dalam melakukan suatu hal yang berisi tentang petunjuk dan aturan-aturan yang ada dalam organisasi. Kaitannya dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten tidak memiliki SOP dalam pelaksanaan kebijakan PUG dalam pendidikan sebagai acuan pelaksanaan.

Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Kasi Perpustakaan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.1/5314/11 tentang penyelenggaraan program pendidikan non formal pada pengarusutamaan gender. Pemerintah melalui Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 telah memberikan pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan baik di tingkat provinsi, kota/kabupaten serta pelaksanaan di satuan pendidikan. Hal tersebut dapat menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan. Dengan adanya panduan atau pedoman pelaksanaan akan memudahkan dinas pendidikan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Selain SOP, dalam struktur organisasi juga terdapat dimensi penyebaran tanggung jawab sehingga mempermudah pelaksanaan kebijakan. Terkait hal tersebut, penyebaran tugas antar pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sudah terbagi cukup baik yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten mengeluarkan SK dan Kasi Perpustakaan Dinas Pendidikan yang melaksanakan serta melakukan pelaporan kegiatan sosialisasi PUG pada pendidikan formal dan non formal di 13 sekolah/lembaga. Sesuai dengan pernyataan George Edward III bahwa organisasi pelaksana yang telah terfragmentasi (penyebaran tanggung jawab) akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana amak semakin membutuhkan koordinasi yang intensif (Joko Widodo, 2008:106).

Dilihat dari keempat aspek di atas, pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sudah dikatakan cukup berhasil. Komunikasi/sosialisasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan konsisten. Hal yang masih sangat kurang terlihat dari sumber daya yang masih kurang memenuhi, yang mana pelimpahan tanggung jawab masih ditangani oleh satu orang yang juga memiliki tanggung jawab dalam bidang lain. Disposisi pelaksana dalam implelementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sudah baik, dibuktikan dengan kinerja yang efektif

meskipun mengemban dua tanggung jawab dalam bidang yang berbeda. Selain itu adanya SK Kepala Dinas Pendidikan yang menjadi acuan dalam sosialisasi PUG dalam pendidikan.



**Gambar 9. Proses Implementasi Kebijakan PUG dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten**  
(Sumber: Diolah dari hasil penelitian)

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa tindak lanjut dari proses implementasi kebijakan PUG dalam pendidikan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.1/5314/11, selanjutnya dilakukan sosialisasi pengarusutamaan gender pada jenjang pendidikan formal dan pendidikan non formal. Dalam penelitian ini peneliti mengamati pada masing-masing jenjang pendidikan yakni TK, SD, SMP, dan SMA serta pada pendidikan non formal yakni PKBM.



**a. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Pendidikan Formal**

Kebijakan pengarusutamaan gender pada pendidikan formal dilakukan pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP dan SMA. Lembaga formal adalah tempat yang paling memungkinkan bagi seseorang meningkatkan pengetahuan, dan paling mudah untuk membina generasi muda yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat (Abu Ahmadi, 2001: 162). Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai bentuk implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan dapat diamati dari kegiatan sosialisasi, implementasi, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan PUG, serta seperti apa kesetaraan gender telah terwujud di sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dipimpin oleh kepala sekolah yang bertanggung jawab dalam menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah. Mulai dari UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, sampai kepada peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten dan kota. Sosialisasi gender oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten diberikan kepada kepala sekolah yang telah ditunjuk untuk mendapatkan sosialisasi gender.

### **1) Sosialisasi Pengarusutamaan Gender**

Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan yang baru sebatas sosialisasi dilaksanakan pada 13 lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Dari 13 lembaga tersebut peneliti melakukan penelitian masing-masing satu pada tiap jenjang pendidikan karena keterbatasan waktu yang ada. Peneliti melakukan penelitian di TK Pertiwi Tlogo, SD N 1 Prambanan, SMP N 1 Prambanan dan SMA N 1 Prambanan. Dari masing-masing sekolah tersebut, oleh Dinas Pendidikan kepala sekolah diundang untuk mendapatkan sosialisasi gender. Kegiatan sosialisasi gender tersebut baru pertama kalinya didapat pada masing-masing sekolah. Tujuan dari diadakannya sosialisasi gender pada tiap-tiap sekolah adalah agar para guru dan karyawan dapat memahami gender dan pengarusutamaannya di sekolah. Sehingga dari sosialisasi yang diberikan kepada kepala sekolah tersebut harapannya dapat diteruskan kepada para guru dan karyawan serta dapat diimplementasikan di sekolah dengan kebijakan sekolah yang ada.

Tidak hanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, namun pada tiap sekolah yang mendapatkan sosialisasi gender oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten juga memberikan subsidi untuk dapat digunakan dalam

mengimplementasikan apa yang telah didapat dari kegiatan sosialisasi yang sudah diberikan pada sekolah. Adanya kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, memberikan manfaat adanya pemahaman bagi kepala sekolah dan guru terkait gender dan pengarusutamaannya dalam pendidikan. Dimana gender jika orang yang belum memahami masih memandang bahwa gender adalah perbedaan jenis kelamin. Manshour Fakih (1999) juga menegaskan dalam *Sex, Gender and Society* bahwa gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Dari sosialisasi tersebut sekolah mengerti bahwa gender adalah terkait peran bukan sekedar perbedaan jenis kelamin.

## **2) Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Sekolah**

Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan berupa sosialisasi gender pada setiap jenjang pendidikan formal agar setiap kepala sekolah dapat meneruskannya dan mewujudkannya pada sekolah yang mereka pimpin dengan kebijakan sekolah masing-masing. Sebagaimana Yoyon Bahtiar Irianto (2012) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dapat disebut sebagai rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategik, maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan

suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Implementasi kebijakan PUG oleh Dinas Pendidikan belum ada program khusus terkait PUG pada sekolah, Dinas Pendidikan baru sebatas sosialisasi pada kepala sekolah yang ditunjuk untuk diberikan sosialisasi. Dari sosialisasi gender yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, pelaksanaan pengarusutamaan gender di TK Pertiwi Tlogo para guru masih pada tahap pemahaman tentang gender, karena di TK Pertiwi Tlogo selama ini baru pertama kalinya mendapatkan pemahaman terkait gender. Sehingga belum ada program khusus dari sekolah yang dilaksanakan untuk mewujudkan PUG di sekolah. Guru masih sebatas menerapkannya dalam pembelajaran di kelas bahwa tidak ada perbedaan antara siswa laki-laki dan perempuan, karena di TK pembelajaran pun masih pada tahap perkembangan peserta didik.

Di SD N 1 Prambanan implementasi PUG belum ada program khusus terkait gender. Pengarusutamaan gender secara implisit tersirat dalam pembelajaran yang responsif gender, selain itu di SD N 1 Prambanan dalam menunjang PUG di sekolah, aktivitas sekolah memberikan kebebasan pada siswanya baik perempuan maupun laki-laki seperti kegiatan upacara yang mana perempuan juga dipersilahkan untuk memimpin upacara

serta mengembangkan diri dalam bidang akademik untuk berprestasi. Terlihat dari cukup banyaknya siswa perempuan yang mendapatkan peringkat di kelas.

Pelaksanaan PUG di SMP N 1 Prambanan dari program awal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan berupa sosialisasi kepada kepala sekolah. Sosialisasi diberikan kepada kepala sekolah yang kemudian disosialisasikan kepada guru dengan menyesuaikan tupoksi dan tidak terlepas dari perannya sebagai tenaga pendidikan. Seperti dalam struktur kepengurusan, peningkatan prestasi diri oleh para guru, serta kegiatan siswa yang responsif gender.

Pada tingkat sekolah menengah atas yakni SMA N 1 Prambanan pelaksanaan PUG di sekolah juga belum ada program khusus yang dilakukan, karena memang masih sebatas sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Sehingga sekolah belum menyusun kebijakan maupun program sekolah terkait PUG. Pengarusutamaan gender di SMA N 1 Prambanan juga masih sebatas tidak adanya pembedaan kesempatan bagi guru dan siswa untuk mengembangkan diri.

Implementasi pengarusutamaan gender pada jenjang pendidikan formal di TK, SD, SMP dan SMA masih sebatas pemahaman akan gender dan pengarusutamaannya, sehingga dari tiap jenjang pendidikan yang diberikan sosialisasi

pengarusutamaan gender belum memiliki program khusus dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di sekolah. Karena kebijakan tersebut merupakan rancangan dari Dinas Pendidikan sehingga sekolah berharap adanya tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi yang telah diberikan untuk dapat diterapkan di sekolah.

### **3) Ksetaraan Gender di Sekolah**

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan, yakni peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan agar lebih menjamin semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif, dan mempunyai kontrol serta mendapat manfaat dari pembangunan pendidikan, sehingga laki-laki dan perempuan dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten melalui kegiatan sosialisasi yang diberikan

kepada sejumlah lembaga pendidikan formal dari semua jenjang pendidikan diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan di sekolah.

Estafet kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan tersebut di TK Pertiwi Tlogo tidak ada diskriminasi baik pada siswa laki-laki maupun perempuan. Secara eksplisit nampak guru tidak membedakan dalam mengajar dan memberikan perhatian bagi siswa-siswanya. Di SD N 1 Prambanan kesetaraan juga nampak bahwa tidak ada perbedaan dalam perlakuan dan kesempatan, masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Dalam pembelajaran maupun kegiatan sekolah antara siswa laki-laki dan siswa perempuan berkesempatan yang sama untuk ambil bagian dalam pencapaian prestasi. Banyak anak perempuan yang mendapatkan prestasi, bahkan sebagian besar perempuan yang memegang prestasi 1, 2 dan 3.

Kesetaraan gender di tingkat sekolah menengah pertama yakni SMP N 1 Prambanan terlihat dari berbagai aktivitas atau kegiatan sekolah yang ada seperti Dharma Wanita, kemudian kegiatan peningkatan diri bagi guru yang juga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan tugas sesuai tupoksi. Hal tersebut merupakan kesadaran sekolah

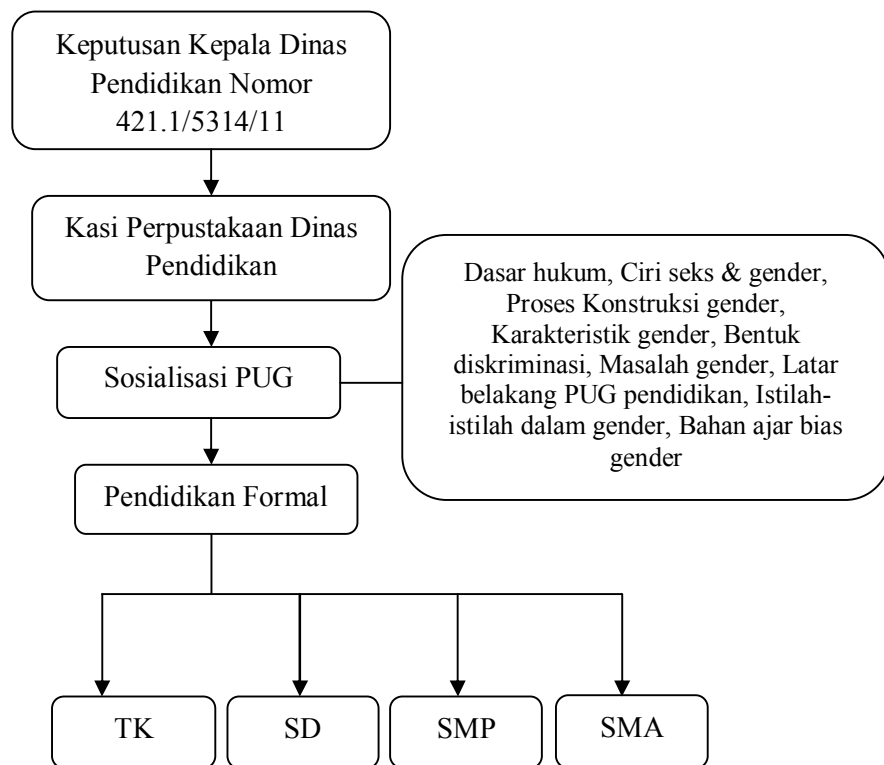
yang memahami bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki peranan yang sama.

Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di SMA N 1 Prambanan diupayakan tidak adanya diskriminasi baik laki-laki maupun perempuan, serta adanya emansipasi. Guru laki-laki dan guru perempuan memiliki komposisi yang sama dan juga tidak ada rasio. Seperti dalam pemilihan wakil kepala sekolah yang dilakukan secara terbuka. Baik guru laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama. Dari segi manajemen pun tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, semua memiliki peluang yang sama untuk menjadi bagian dari manajemen sekolah. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di SMA N 1 Prambanan terlihat pada berbagai kegiatan dan organisasi seperti Dharma Wanita, OSIS serta tugas secara struktural sekolah.

Kegiatan sosialisasi gender yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten pada sejumlah sekolah tingkat TK, SD, SMP dan SMA memberikan pemahaman baru tentang gender dan pengarusutamaannya, serta lebih meningkatkan kesetaraan gender di sekolah meskipun secara khusus belum ada program atau kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan sebagai bentuk implementasi kebijakan pengarusutamaan gender



namun kesetaraan gender di sekolah telah nampak pada sejumlah kegiatan baik guru dan siswa.



**Gambar 10. Implementasi Kebijakan PUG dalam Pendidikan pada Pendidikan Formal**  
*(Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian)*

#### **b. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Pendidikan Non Formal**

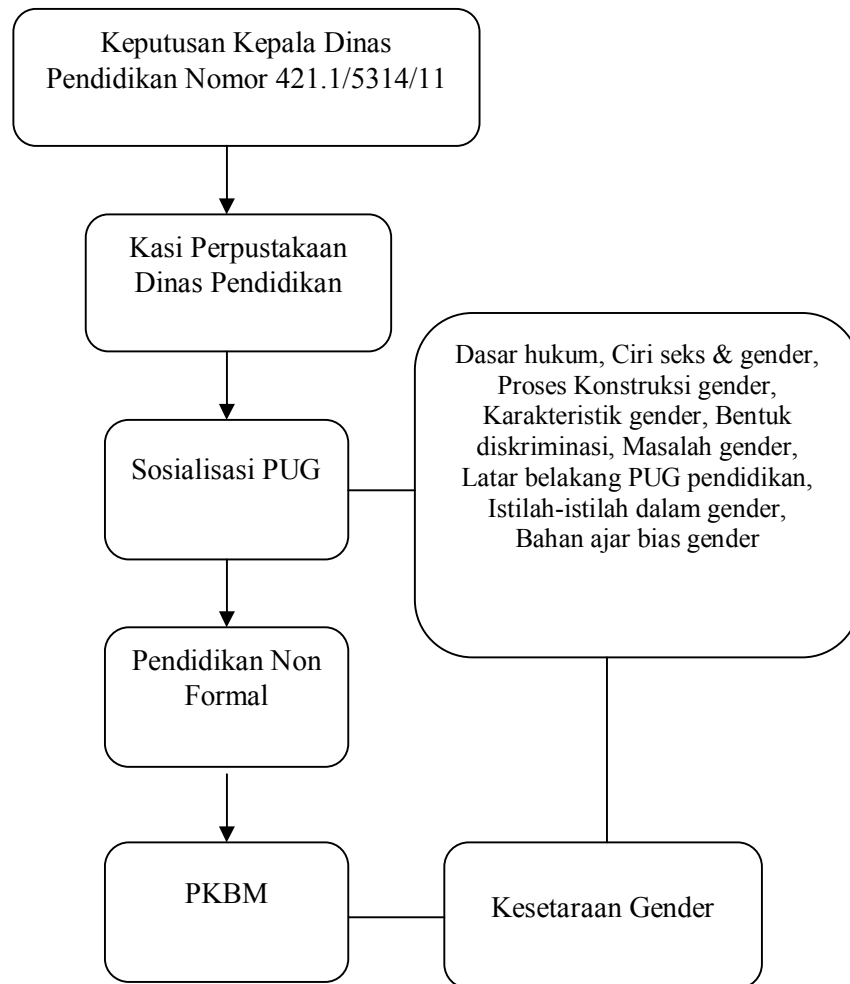
Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten tidak hanya pada jenjang pendidikan formal, namun pada pendidikan non formal pemahaman gender juga diberikan. Lembaga pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah (PLS) ialah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan

dengan sengaja, tertib, dan berencana, diluar kegiatan persekolahan (Abu Ahmadi, 2001: 164). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau biasa disebut PKBM merupakan lembaga pendidikan non formal yang juga menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan untuk dibina. PKBM diselenggarakan bagi masyarakat sekitar suatu daerah dengan memanfaatkan potensi dari suatu daerah yang ada.

Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender oleh Dinas Pendidikan pada pendidikan non formal dilakukan pada PKBM Cipta Karya. Sama halnya dengan pendidikan formal yang lainnya, sosialisasi pengarusutamaan gender diberikan kepada koordinator PKBM Cipta Karya bersama dengan kepala sekolah pendidikan formal yang telah ditunjuk. Sama halnya dengan pendidikan formal, implementasi kebijakan PUG masih sebatas sosialisasi. Dari kegiatan sosialisasi tersebut, dampak yang dirasakan oleh PKBM serta masyarakat sekitar sangat positif. Karena masyarakat kini telah memahami seperti apa itu gender. Terbukti dari berbagai kegiatan yang ada di masyarakat sekitar PKBM Cipta Karya tersebut adanya sanggar kesenian yang diperuntukkan bagi warga disana yakni ibu-ibu dan bapak-bapak. Masyarakat yang dulunya masih mengesampingkan peranan perempuan dimana perempuan pantas untuk berada dirumah dan membatasi aktivitas diluar rumah, dengan pemahaman terkait peranan laki-laki dan perempuan kini bisa beriringan. Para ibu-ibu dan bapak-bapak bersama-sama

mengembangkan sanggar kesenian. Setiap hari jumat malam, mereka melakukan latihan. Biasanya yang dulunya ketika sudah menjelang petang sama sekali tidak ada aktivitas ibu-ibu diluar rumah, dengan adanya sanggar kesenian tersebut mewadahi bagi para ibu-ibu untuk melakukan aktivitas diluar rumah.

Selain sanggar sebagai kesenian bagi masyarakat, dalam pelaksanaan PUG di PKBM Cipta Karya kepada masyarakat sekitar tidak ada program khusus yang dilakukan. Pemahaman yang dimiliki oleh warga masyarakat dari hasil implementasi PUG yang masih sebatas sosialisasi dilakukan dengan tidak membedakan peranan laki-laki dan perempuan. Seperti halnya seni kerajinan yang dikembangkan oleh PKBM Cipta Karya yang mana para pengrajin tidak hanya laki-laki namun perempuan juga turut bekerja sebagai pengrajin kayu, serta adanya sangar yang dikelola bersama sebagai ruang sosialisasi bagi masyarakat. Kesadaran masyarakat yang kini ada menjadikan maju dan berkembangnya aktivitas masyarakat yang ada di sekitar PKBM Cipta Karya. Meskipun dari masyarakat kesetaraan itu telah nampak, namun harapan dari bapak SW selaku koordinator PKBM Cipta Karya adalah adanya tindak lanjut program dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dari sosilasisasi yang telah dilaksanakan.



**Gambar 11. Implementasi Kebijakan PUG dalam Pendidikan pada Pendidikan Non Formal**  
*(Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian)*

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah**

Suatu kebijakan yang telah dirancang dan kemudian di implementasikan tidak terlepas dari berbagai kendala yang ada. Dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender oleh Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten pada tiap jenjang pendidikan yang kemudian dilanjutkan oleh kewenangan sekolah dalam pelaksanaannya terdapat berbagai faktor yang menjadi pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya. Di TK Pertiwi Tlogo faktor pendukung dalam pelaksanaan PUG adalah pihak sekolah yang pasti menerima dan berusaha untuk melaksanakan kegiatan dari apa yang telah di sosialisasikan oleh Dinas Pendidikan. Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di sekolah, karena sekolah memperoleh wawasan baru tentang gender dan pelaksanaannya. Adapun hal yang menjadi penghambat belum dirasakan oleh TK Pertiwi Tlogo. Hanya lebih pada teknis pelaksanaan sosialisasi, yang mana karena antara jenjang pendidikan TK dan SD bahkan SMP sangat berbeda dalam proses pembelajaran, karena di TK pembelajaran masih sebatas pada perkembangan peserta didik, belajar dan bermain. Adapun di SD, SMP, dan SMA sudah memiliki sistem tersendiri dalam pembelajaran.

Pada tingkat sekolah dasar yakni di SD N 1 Prambanan hal yang menjadi penghambat dalam tindak lanjut sosialisasi gender yang dilakukan untuk implementasi pengarusutamaan gender adalah tidak adanya waktu yang cukup untuk mengimplementasikan kegiatan secara khusus tentang pengarusutamaan gender. Seperti yang dijelaskan dalam *Politics and Policies Implementation in the Third World* karya Grindle (1980) dalam Yoyon Bahtiar (2012:42) dijelaskan bahwa keberhasilan

proses implementasi suatu kebijakan tergantung pada kegiatan yang telah dirancang dan pembiayaan yang cukup memadai. Adapun hasil dari sosialisasi sudah terlihat dari tidak adanya perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri.

Di tingkat sekolah menengah pertama yakni di SMP N 1 Prambanan Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender adanya pemahaman kesetaraan gender yang dijunjung tinggi. Adapun faktor penghambat lebih pada segi kegiatan fisik, yang mana masih mengedepankan keikutsertaan laki-laki daripada perempuan. Namun dalam hal pengembangan diri tidak ada perbedaan, sehingga kesempatan yang sama diberikan bagi siapapun yang ingin berprestasi dan meningkatkan kompetensi diri.

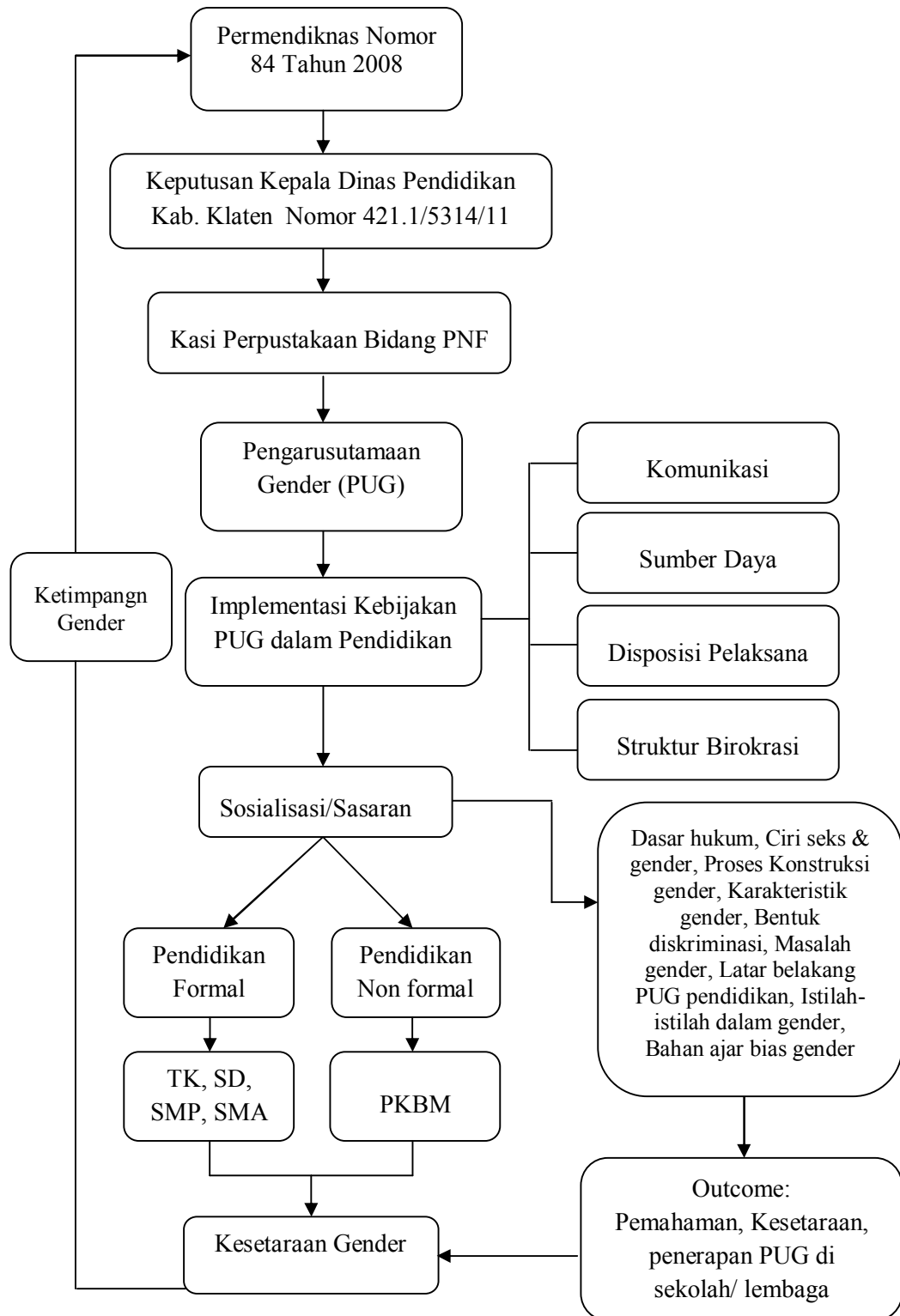
Pada SMA N 1 Prambanan dalam pelaksanaan PUG faktor yang menjadi pendukung dalam kegiatan ini adalah dari sumber daya sekolah itu sendiri yakni para guru-guru. Kesiapan guru-guru di SMAN 1 Prambanan untuk menerima kebijakan yang ada menjadi mudahnya suatu kebijakan itu dapat dilaksanakan. Adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan di SMA N 1 Prambanan lebih pada naluri kewanitaan, seperti ada kegiatan-kegiatan yang mana ketika waktunya pulang ibu-ibu masih terpancang waktu, namun bagi bapak-bapak waktu tidak menjadi suatu yang menjadi permasalahan.

Berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam implemementasi pengarusutamaan gender di sekolah berbeda-beda. Sehingga dari berbagai macam faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di sekolah mampu menjadikan acuan dalam impelentasi kebijakan yang nantinya akan dirancang oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten untuk dapat diterapkan di sekolah.

**Tabel 17. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan PUG**

| No | Sekolah                | Faktor Pendukung                 | Faktor Penghambat                                       |
|----|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | TK Pertiwi Tlogo       | Antusias para guru               | -                                                       |
| 2  | SD Negeri 1 Prambanan  | Kesiapan guru                    | Alokasi waktu                                           |
| 3  | SMP Negeri 1 Prambanan | Kesadaran para guru dan karyawan | Kegiatan fisik yang lebih mengedepankan peran laki-laki |
| 4  | SMA Negeri 1 Prambanan | Sumber daya                      | Naluri kewanitaan                                       |

*(Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara)*



**Gambar 12. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah**  
*(Sumber: Diolah dari Hasil Penelitian)*



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam pelaksanaannya dilakukan pada pendidikan formal dan non formal. Pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender oleh Dinas Pendidikan didukung dengan komunikasi yang jelas, sumberdaya staf yang masih memiliki tanggung jawab ganda, fasilitas yang memadai, anggaran yang bersumber dari APBD serta kewenangan pelaksanaan. Implementasi pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan diadakannya kegiatan sosialisasi gender pada sekolah-sekolah dan lembaga yang berjumlah 13 sekolah dan lembaga dari berbagai jenjang pendidikan di wilayah Kecamatan Prambanan Klaten. Kegiatan sosialisasi memberikan pemahaman tentang gender serta pengarusutamaannya di sekolah-sekolah kepada kepala sekolah kemudian disampaikan kepada para guru dan koordinator PKBM yang kemudian disampaikan kepada masyarakat. Implementasi PUG oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah baru sebatas sosialisasi, dan belum ada tindak lanjut kembali dari kegiatan sosialisasi tersebut.
2. Pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten pada sekolah formal maupun non formal terdapat berbagai hambatan dalam pengimplementasiannya. Pada Dinas

Pendidikan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan PUG adalah dana guna melaksanakan program-program kegiatan untuk menunjang pelaksanaan PUG. Selain itu, faktor sumber daya yang kurang juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan PUG, karena Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sendiri belum memiliki tim khusus yang fokus dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender sesuai yang dicanangkan oleh pemerintah dalam Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan. Pada lingkup sekolah, yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan PUG itu sendiri terkendala oleh waktu khusus untuk melakukan program kegiatan PUG sehingga gender hanya diintegrasikan ke dalam pembelajaran yang disampaikan oleh guru, serta melalui tindakan atau perlakuan terhadap siswa dan guru dengan tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin, semua memiliki kapasitas yang sama dalam hal apapun.

## **B. Saran**

Berdasarkan atas penelitian serta informasi yang telah diperoleh, maka dari hasil kajian penelitian mengenai implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan terlaksana secara efisien, sebaiknya Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten menunjuk koordinator khusus yang fokus pada bidang gender, tindak

dengan mengembangkan tanggung jawab kepada staf yang telah memiliki tanggung jawab di bidang lain. Sehingga dapat lebih terfokus pada ranah atau bidang yang dijalannya.

2. Agar pengarusutamaan gender dapat terlaksana dengan baik, Dinas Pendidikan perlu membentuk tim khusus sesuai dengan pedoman dalam Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan dengan membentuk tim POKJA PUG bidang pendidikan. Sehingga kegiatan PUG tidak hanya sebatas sosialisasi namun ada tindak lanjut seperti perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Selain itu perlu adanya alokasi waktu dan dana khusus untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pendidikan.
3. Rekomendasi kebijakan yang dapat dibuat yakni: a) melakukan studi banding atau *sharing* dengan dinas pendidikan yang telah maju dalam melaksanakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan, sehingga dapat menambah wawasan dan memahami strategi dalam mengimplementasikan kebijakan PUG, serta mengadopsi berbagai program yang ada untuk dapat diterapkan dalam rencana program kegiatan PUG di dinas dan sekolah b) Dinas Pendidikan membuat program pelatihan atau *workshop* bagi guru untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abid Rosadi. (2012). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Bidang Pendidikan (Study tentang Kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kabupaten Sleman, Yogyakarta terhadap Kesetaraan Gender. *Skripsi*. FIS UNY.
- Arif Rohman. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Cholid Narbuo dan Abu Achmadi. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Elvi Muawanah. (2009). *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Farida Hanum dan Lutfi Wibawa. (2010). Kesetaraan Gender pada Struktur Aparat Pemda dan Kabupaten Sleman. *Laporan Penelitian Pengembangan Keilmuan Guru Besar*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- H.A.R Tilaar& Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) NOMOR 9 TAHUN 2000 (9/2000) Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
- Joko Widodo. (2008). *Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Manshour Fakh. (2008). *Analisis Gender Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muh. Roqib. (2003). *Pendidikan Perempuan*. Yogyakarta: Gama Media.
- Paulus Mujiran. (2002). *Pernik-pernik Pendidikan Manifestasi dalam Keluarga, Sekolah dan Penyadaran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia. (2004). *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Riant Nugroho. (2008). *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono. (2008). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudiyono. (2007). Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Buku Ajar Jurusan Administrasi Pendidikan*. Yogyakarta: FIP UNY.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto. (2012). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subari. (1994). *Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yoyon Bahtiar Irianto. (2012). *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyu Nurharjadmo. 2008. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda Di Sekolah Kejuruan*. Spirit Publik Volume 4 Nomor 3 Hal: 215 – 228.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# PEDOMAN DOKUMENTASI DAN WAWANCARA

**PEDOMAN WAWANCARA  
DENGAN STAFF DINAS PENDIDIKAN**

Nama :

Usia :

Pendidikan :

Jabatan di Dinas :

Daftar Pertanyaan :

1. Sejak kapan Anda menjabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten?
2. Apa tugas dan fungsi utama Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten?
3. Apa yang Anda ketahui tentang peranan Dinas Pendidikan terhadap Pengarusutamaan Gender dalam pendidikan?
4. Sejak kapan Dinas Pendidikan ?
5. Program apa sajakah yang disusun dalam pelaksanaan pengarusutmaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten?
6. Seberapa efektifkah implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan?
7. Faktor pendukung dan penghambat apa sajakah yang selama ini terdapat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut?
8. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam merealisasikan implementasi kebijakan PUG dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten?
9. Apa dan bagaimana yang akan dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten untuk mewujudkan kesetaraan gender kedepannya?
10. Dampak positif seperti apa yang dapat



11. dirasakan dalam merealisasikan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan?
12. Adakah pengontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan PUG dalam pendidikan oleh Dinas Pendidikan?
13. Saran apa yang anda inginkan dalam merealisasikan implementasi kebijakan PUG dalam pendidikan?

**PEDOMAN WAWANCARA  
DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL  
YANG MENJADI SOSIALISASI PUG**

**A. Waktu Pelaksanaan**

Tanggal :

Tempat :

Waktu :

**B. Identitas Diri Responden**

Nama :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Agama :

Jabatan :

**C. Daftar Pertanyaan:**

1. Apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten melaksanakan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di sekolah ini?
2. Program apa sajakah yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) di sekolah ini?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu guru terkait implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di sekolah ini?
4. Sejauh mana pengarusutamaan gender diterapkan di sekolah ini?
5. Sudah efektifkan program-program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten tersebut bagi sekolah ini?

6. Faktor pendukung dan penghambat apa sajakah yang selama ini terdapat dalam implementasi kebijakan tersebut?
7. Apa saran bapak/ibu terkait implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) kedepannya?

**PEDOMAN WAWANCARA  
DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL  
YANG MENJADI SOSIALISASI PUG**

**A. Waktu Pelaksanaan**

Tanggal :

Tempat :

Waktu :

**B. Identitas Diri Responden**

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan :

Agama :

Jabatan :

**C. Daftar Pertanyaan**

1. Apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten melakukan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) di PKBM ini?
2. Program apa sajakah yang dilakukan Dinas pendidikan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di PKBM ini?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di PKBM ini?
4. Sejauh mana kebijakan pengarusutamaan gender diterapkan di PKBM ini?

5. Sudah efektifkah program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tersebut bagi PKBM ini?
6. Faktor pendukung dan penghambat apa sajakah yang selama ini terdapat dalam implementasi kebijakan tersebut?
7. Apa saran bapak/ibu terkait implementasi kebijakan pengarusutamaan gender kedepannya?

**LAMPIRAN 2**

# PEDOMAN PENCERMATAN DOKUMEN

## PEDOMAN PENCERMATAN DOKUMENTASI

| No | Hal yang dikaji                                                  | Aspek yang dicari                                                                                                            | Sumber                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Profil Dinas Pendidikan                                          | a. Visi<br>b. Misi<br>c. Tujuan dan Sasaran<br>d. Susunan Struktur Dinas Pendidikan<br>e. Kondisi Geografi<br>f. Sumber daya | Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten                                                                                                         |
| 2  | Profil Sekolah                                                   | a. Visi<br>b. Misi<br>c. Jumlah guru<br>d. Jumlah siswa                                                                      | a. TK Pertiwi Tlogo<br>b. SDN 1 Prambanan<br>c. SMPN 1 Prambanan<br>d. SMAN 1 Prambanan<br>e. PKBM Cipta Karya                            |
| 3  | Dokumen Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang pendidikan | a. Analisis Kebijakan PUG<br>b. Program kerja PUG<br>c. Daftar Sekolah pelaksanaan PUG                                       | a. Bidang PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten<br>b. Sekolah Dasar<br>c. Sekolah Menengah<br>d. Sekolah Atas<br>e. Pendidikan Non Formal |

# CATATAN LAPANGAN



## **CATATAN LAPANGAN I**

**Hari/Tanggal : Rabu, 7 Mei 2014**

**Waktu : 09.00 – 11.00**

**Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten**

**Kegiatan :**

- **Mengurus Administrasi Perijinan Penelitian**
- **Observasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten**
- **Membuat Kesepakatan Perijinan ke Sekolah**

### **Deskripsi**

Pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 pukul 09.00 WIB peneliti datang di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten untuk mengurus perijinan penelitian terkait implementasi kebijakan pengarusutamaan gender. Perijinan penelitian mulanya peneliti menuju bagian kesekretariatan untuk menyerahkan surat pengantar dari BAPPEDA Kabupaten Klaten. Kemudian dari bagian kesekretariatan diarahkan untuk menuju bidang PNF (Pendidikan Formal dan Non Formal), karena gender ditangani oleh bidang PNF.

Setelah menuju bidang PNF peneliti bertemu dengan informan atau koordinator perputakaan yang sekaligus merangkap menangani terkait gender, yakni Ibu TH. Disitu peneliti mengutarakan maksud dan tujuan bahwa peneliti akan melakukan penelitian terkait implementasi gender di Dinas Pendidikan. Peneliti melakukan obrolan ringan terkait pelaksanaan gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Dari hasil perbincangan tersebut diinformasikan bahwa pelaksanaan gender dilakukan di beberapa sekolah di wilayah Prambanan, yakni 13 sekolah atau lembaga yang dikenai sosialisasi gender.

Dari informasi tersebut, Ibu TH mengarahkan untuk melakukan penelitian ke sekolah yang dikenai sosialisasi gender oleh Dinas Pendidikan. Sementara proses pengurusan surat pengantar ke sekolah, peneliti diminta kembali beberapa hari lagi untuk mengecek surat pengantar tersebut. Setelah semua selesai, yakni perijinan administrasi dan observasi di bidang PNF peneliti beranjak untuk pulang.

## CATATAN LAPANGAN II

**Hari/Tanggal : Senin, 19 Mei 2014**

**Waktu : 10.30 – 11.15**

**Tempat : Dinas Pendidikan Bidang Perencanaan**

**Kegiatan :**

- **Mengambil data Dinas Pendidikan di Bidang Perencanaan**

### **Deskripsi**

Pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 peneliti berencana untuk mengambil data terkait Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten di Bidang Perencanaan. Sebelum peneliti mengambil data di bidang perencanaan, peneliti melakukan perijinan pada bagian tata usaha untuk dapat diteruskan ke bidang perencanaan. Setelah bertemu dengan koordinator bagian tata usaha dan diberikan izin, peneliti melanjutkan pencarian di bidang perencanaan. Di bidang perencanaan peneliti bertemu dengan kepala bagian perencanaan dan mengutarakan maksud serta tujuan peneliti. Kemudian peneliti menunggu data-data yang dibutuhkan. Dalam pengambilan data ini, peneliti memperoleh data-data sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi dinas pendidikan
- b. Data jumlah pegawai dinas pendidikan kabupaten klaten
- c. Data renstra dinas pendidikan kabupaten klaten
- d. Data terkait seluk beluk Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Seluruh data tersebut diberikan kepada peneliti berupa soft file yang telah di masukkan dalam satu folder. Setelah memperoleh data yang telah dicari maka peneliti berpamitan dan kemudian pulang.

## CATATAN LAPANGAN

**Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2014**

**Waktu : 09.30 – 11.00**

**Tempat : Dinas Pendidikan Bidang PNF**

**Kegiatan :**

- **Observasi Data Pelaksanaan Kegiatan Gender**
- **Mengurus surat perijinan untuk ke sekolah/lembaga**

### **Deskripsi**

Pada hari kamis tanggal 22 Mei 2014 pukul 09.30 WIB peneliti memiliki jadwal untuk bertemu dengan Ibu TH selaku koordinator bidang gender di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Peneliti ingin melakukan observasi terkait data-data terkait implementasi kegiatan gender yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Sesampainya di Dinas Pendidikan Bidang PNF peneliti sudah ditunggu oleh Ibu TH yang sebelumnya peneliti telah melakukan perjanjian untuk bertemu. Observasi dilakukan dengan mengecek berkas-berkas hasil laporan kegiatan gender yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan pada 13 lembaga formal dan non formal. Dari pencarian data yang dilakukan, peneliti mendapatkan data-data:

- a. Laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan sosialisasi gender
- b. Daftar lembaga formal dan normal implementasi sosialisasi gender
- c. Surat pengantar untuk melakukan penelitian ke sekolah

Setelah memperoleh informasi serta data yang diharapkan, sebagai dokumentasi bagi peneliti data berupa hard file di foto copy untuk di arsipkan oleh peneliti. Selain data laporan kegiatan pelaksanaan sosialisasi gender, peneliti juga mengambil surat pengantar untuk melakukan penelitian ke sekolah atau lembaga yang dikenai sasaran implementasi gender oleh Dinas Pendidikan Bidang PNF.

## CATATAN LAPANGAN

**Hari/Tanggal : Jumat, 20 Juni 2014**

**Waktu : 09.00 – 10.30**

**Tempat : Bidang PNF Dinas Pendidikan**

**Kegiatan :**

- **Wawancara Terstruktur dengan Koordinator Bidang Gender**

### **Deskripsi**

Pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 pukul 09.00 WIB, peneliti memiliki agenda untuk wawancara secara terstruktur kepada Ibu TH selaku koordinator bidang gender di Dinas Pendidikan Klaten. Karena kegiatan wawancara sudah diagendakan sebelumnya, wawancara terkait implementasi kebijakan PUG di Dinas Pendidikan langsung bisa dilakukan. Kegiatan wawancara berlangsung sekitar 1 jam. Adapun selebihnya adalah obrolan santai antara peneliti dengan informan. Setelah cukup lama berbincang-bincang, kemudian peneliti berpamitan pulang yang sebelumnya berfoto bersama sebagai dokumentasi kegiatan.

## **CATATAN LAPANGAN**

**Hari/Tanggal : Sabtu, 31 Mei 2014**

**Waktu : 08.30 – 09.30**

**Tempat : SD N 1 Prambanan**

**Kegiatan :**

- **Wawancara dengan kepala sekolah**
- **Observasi di SD N 1 Prambanan**

### **Deskripsi**

Pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 pukul 08.00 WIB, peneliti memiliki jadwal untuk bertemu dengan Ibu TB selaku kepala sekolah SD N 1 Prambanan. pada kesempatan kali ini, peneliti akan melakukan wawancara sekaligus observasi di SD N 1 Prambanan. Dikarenakan pada hari ini bersamaan dengan kegiatan penawasan sekolah oleh pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan, maka peneliti menunggu sebentar karena kepala sekolah sedang melakukan persiapan untuk kegiatan pengawasan sekolah. Setelah kurang lebih setengah jam Ibu TB akhirnya menghampiri saya yang telah menunggu diruangannya. Karena Ibu TB tidak memiliki banyak waktu pada hari itu, tidak menunda-nunda waktu maka peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Ibu TB selaku kepala sekolah SD N 1 Prambanan. wawancara berlangsung sekitar 1 jam. Setelah selesai wawancara kami pun mengobrol santai sembari menunggu kedatangan pengawas sekolah dengan menikmati makanan kolak yang dibuat oleh para guru.

Menyadari kepala sekolah tidak banyak waktu, setelah selesai berbincang dan makan maka peneliti beralih pada pegawai sekolah yang menangani terkait data sekolah. Dari penelusuran data yang ada, peneliti memperoleh data sebagai berikut:

- a. Profil sekolah
- b. Daftar pengajar di SD N 1 Prambanan
- c. Foto dokumentasi kegiatan responsif gender

Setelah selesai mengambil data tersebut kemudian peneliti meminta izin pulang sekaligus mendokumentasikan papan nama serta gedung SD N 1 Prambanan, selesai mendokumentasikan kemudian peneliti pulang.

## **CATATAN LAPANGAN**

**Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2014**

**Waktu : 09.00 – 10.30**

**Tempat : SMP N 1 Prambanan**

**Kegiatan :**

- **Wawancara dengan kepala sekolah**
- **Observasi di SMP N 1 Prambanan**

### **Deskripsi**

Pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 pukul 08.15 WIB peneliti tiba di SMP N 1 Prambanan. Peneliti masuk menuju ruang tata usaha untuk melakukan perijinan wawancara dengan bapak kepala sekolah SMP N 1 Prambanan. Dikarenakan bapak kepala sekolah sedang ada kepentingan diluar maka peneliti berinisiatif untuk menunggu kedatangan bapak kepala sekolah, karena di SMP N 1 Prambanan sedang ada kegiatan pensi maka bapak kepala sekolah akan hadir ke sekolah. Setelah waktu menunjukkan pukul 09.00 bapak kepala sekolah tiba di sekolah. Kemudian peneliti bertemu dengan kepala sekolah dan menyampaikan maksud dan tujuan peneliti bahwa ingin melakukan wawancara terkait implementasi kegiatan gender oleh Dinas Pendidikan. Wawancara berlangsung sekitar 1 jam.

Setelah selesai wawancara dengan bapak kepala sekolah kemudian peneliti mengambil dokumentasi dengan foto bersama sebagai bukti wawancara dengan bapak kepala sekolah SM N 1 Prambanan. Karena data terkait kepala sekolah belum dituliskan secara lengkap, maka peneliti mencari informasi pada bagian tata usaha. Disana peneliti mendapat informasi data diri kepala sekolah. Setelah wawancara serta data telah diperoleh. Peneliti mengambil dokumentasi lingkungan sekolah dengan memfoto beberapa bagian sekolah seperti plang nama sekolah serta bangunan sekolah. Pada pukul 10.30 WIB peneliti berpamitan untuk pulang.

## **CATATAN LAPANGAN**

**Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juni 2014**

**Waktu : 08.00 – 09.30**

**Tempat : TK Pertiwi Tlogo**

**Kegiatan :**

- **Wawancara dengan kepala sekolah**
- **Observasi di TK Pertiwi Tlogo**

### **Deskripsi**

Pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 pukul 08.00 WIB, peneliti memiliki jadwal untuk bertemu dengan kepala sekolah TK Pertiwi Tlogo. Pukul 07.45 peneliti sampai di sekolah, peneliti disambut langsung oleh kepala sekolah, kemudian kami menuju kantor. Karena masih jam pelajaran, kepala sekolah meminta saya untuk menunggu sebentar. Sembari menunggu kepala sekolah, peneliti mengamati keadaan sekitar, peneliti melihat struktur organisasi sekolah serta kondisi TK Pertiwi Tlogo. Di TK Pertiwi Tlogo guru berstatus PNS baru dua orang, dua yang lainnya masih sebagai guru honorer atau guru tidak tetap. Sejenak kepala sekolah datang menghampiri saya. Kemudian saya utarakan maksud dan tujuan saya pada hari ini, yakni ingin melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait gender. Kepala sekolah menanggapi dengan hangat tujuan saya. Pukul 08.00 WIB saya mulai melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Pukul 09.30 peneliti selesai melakukan wawancara. Kemudian kami ngobrol santai tentang banyak hal dinamika sekolah terutama jenjang pendidikan taman kanak-kanak. Setelah bel istirahat berbunyi kami menyudahi perbincangan kami dan saya pun berpamitan untuk pulang. Sebelum pulang kami menyempatkan untuk foto bersama dengan guru-guru TK Pertiwi Tlogo.

## **CATATAN LAPANGAN**

**Hari/Tanggal : Selasa, 1 Juli 2014**

**Waktu : 10.00 – 11.30**

**Tempat : PKBM Cipta Karya**

**Kegiatan :**

- **Wawancara dengan kepala sekolah**
- **Observasi di PKBM Cipta Karya**

### **Deskripsi**

Pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 peneliti melakukan penelitian di PKBM Cipta Karya selaku pendidikan non formal. Sebelumnya peneliti telah menghubungi koordinator PKBM melalui telepon seluler. Setelah mendapatkan respon, kemudian peneliti berangkat menuju PKBM yang terletak di Desa Pereng Prambanan. karena letaknya yang cukup jauh serta berada di daerah sekitar gunung, maka peneliti harus berkali-kali bertanya kepada warga sekitar untuk dapat menemukan lokasi PKBM Cipta Karya tersebut. lokasinya memang cukup sulit karena berada diatas bukit. Sehingga ketika akan menuju PKBM Cipta Karya peneliti harus menaiki bukit dengan berjalan kaki, karena kendaraan tidak bisa naik ke atas.

Sesampainya di PKBM Cipta Karya peneliti melihat aktivitas yang dilakukan oleh beberapa orang disana adalah sebagai pengrajin dari bahan baku kayu. Peneliti bertemu dengan bapak SW selaku koordinator PKBM Cipta Karya. Kemudian peneliti menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan peneliti. Wawancara berlangsung sekitar 1, 5 jam. Setelah selesai wawancara peneliti memohon izin untuk mengambil dokumentasi yakni foto bersama serta memfoto papan nama PKBM Cipta Karya.



## **CATATAN LAPANGAN**

**Hari/Tanggal : Selasa, 7 Juli 2014**

**Waktu : 10.00 – 11.00**

**Tempat : SMA N 1 Prambanan**

**Kegiatan :**

**Wawancara dengan kepala sekolah**

**Observasi di SMA N 1 Prambanan**

### **Deskripsi**

Pada hari selasa tanggal 7 Juli 2014 peneliti akhirnya bisa bertemu dengan kepala sekolah SMA N 1 Prambanan setelah beberapa kali berkunjung ke sekolah namun belum berkesempatan untuk bertemu dengan bapak SHJ selaku kepala sekolah. Setelah sampai di SMA N 1 Prambanan pukul 09.30 WIB peneliti diminta untuk menunggu sebentar karena bapak SHJ sedang ada tau. Tidak laam kemudian yakni pukul 19.50 WIB peneliti diizinkan untuk bertemu dengan bapak SHJ. Disitu peneliti menyampaikan maksud dan tujuan peneliti kepada bapak SHJ. Bapak SHJ pun menyambut hangat terkait penelitian yang akan saya lakukan, karena pada dasarnya bapak SHJ adalah seorang yang senang dalam hal kepenulisan dan penelitian. Sekitar pukul 10.00 WIB peneliti melakukan wawancara terstruktur kepada bapak SHJ, dari wawancara tersebut cukup banyak hal yang dibahas. Waktu menunjukkan pukul 11.00 WIB dan peneliti memohon izin untuk pulang, yang mana tidak lupa pula kegiatan dokumentasi juga dilakukan peneliti.

**LAMPIRAN 4**

# TRANSKRIP WAWANCARA

**LAPORAN HASIL WAWANCARA  
DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL  
YANG MENJADI SOSIALISASI PUG**

**A. Waktu Pelaksanaan**

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juni 2014  
Tempat : TK Pertiwi Tlogo  
Waktu : 08.00 – 08.55

**B. Identitas Diri Responden**

Inisial :SS  
Jenis Kelamin :Perempuan  
Pendidikan :SPG  
Usia :55 Tahun  
Agama :Katholik  
Pekerjaan :Guru  
Jabatan :Kepala Sekolah

**C. Daftar Pertanyaan**

1. **Peneliti** :Apakah Dinas Pendidikan melakukan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di sekolah ini?  
**Informan** :“Dari Dinas memang melakukan kegiatan sosialisasi gender.”
2. **Peneliti** :Program apa sajakah yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di sekolah ini?  
**Informan** :“Pengarusutamaan itu apa sih mbak? Juga belum ada program memang baru kemarin itu ada wawasan dari kegiatan itu.”
3. **Peneliti** :Bagaimana pendapat bapak/ibu guru terkait Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di sekolah ini?  
**Informan** :“Dari kemarin, terus dari sini juga tidak ada tindak lanjut, kalau ini dilaksanakan juga bagus tapi hanya karna kita blum mendalaminya semua.”
4. **Peneliti** :Sejauh mana Kebijakan Pengarusutamaan Gender diterapkan di sekolah ini?  
**Informan** :“Jika di TK kelihatannya belum atau belum tepat atau belum waktunya atau karna baru pertama kali jadi belum memahaminya, jadi bagus jeleknya belum tau.”
5. **Peneliti** :Sudah efektifkah program-program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tersebut bagi sekolah ini?

**Informan** :“Ya dari awal memang saya jelas betul memang sudah bagus, karna saya belum tau betul dan diadakan dari dinas seprtinya ya baik, karna saya belum tahu betul maka jika diadakan berarti baik, tapi karna belum tahu betul jadi ya belum memahami sedetail itu.

Alokasi dana untuk gender memang ada, tapi dialokasikan untuk guu WB. Ada berapa saya lupa. Saya lupa digunakan untuk apa, namun memang ada. Biayanya lupa, tapi kalau ditempatkan di sekolah memang disuruh untuk itu ya saya sampaikan, tapi karna saya blum memahami dari awal sampai akhir, dan dari sana juga maksudnya untuk saya mendapat informasi dari sana ya saya sampaikan di sekolah ini. Tapi saya lupa, dan hanya sebagian saya ingat. Di SD memang jalan karna SD perbidang, di TK juga per bidang tapi gurunya kan tidak sama. Walaupun disini juga diperbidangkan tapi kan gurunya itu-itu. Dan jika saya memang paham betul maka program ini memnag baik, karna memang baru sekali mendapatkan itu. Untuk TK repot jika dilaksanakan, namun setidaknya kita mengetahui terkait gender. Sebenarnya saya sendiri juga tidak paham gender itu. Kegiatannya pun dilaksanakan secara singkat, tidak seharian.”

6. **Peneliti** :Faktor pendukung dan penghambat apa sajakah yang selama ini terdapat dalam implementasi kebijakan tersebut?

**Informan** :“Kalau faktornya juga penghabatnya tidak ada, tapi kalau faktor pendukungnya ya bagus dan karna ada sosialisasi kita juga menjadi tahu dan kegiatan di TK tambah baik juga. Kemrin memang saya sampaikan, di TK ada 3 guru yang saya kasih tahu dan yang memegang peranan. Terkait gender memang telah saya sampaikan. Yang pasti kita menerima dan kita beusaha menjalani. Sebenarnya saya tidak paham sama sekali terkait gender ini. Karna baru kali ini mendapatkan sosialisasi terkait gender. Kemarin pun saya kurang fokus. Saya dari tahun 81 baru kali ini mendapatkan wawasan seperti ini. Tapi kalau TK lain saya tidak tahu. Terkait gender ini pun saya memang belum memahami. Dari sosialisasi ini ya saya mencoba memahaminya.”

7. **Peneliti** :Apa saran bapak/inu terkait Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)?

**Informan** :“Kalau saya itu memang buat TK supaya lebih maju dengan adanya seperti ini dan guru-guru TK juga bisa lebih tahu apa yang dimaksud gender itu. Sukur bisa tidak seperti ini misal semua TK diambil, misal seperti ini, biaya tidak usah diambil namun TK bisa memahaminya. Jadi pemahamannya itu se ide kalau dijadikan satu dengan SD itu tidak seimbang program kurikulum dan penerimanya juga lain, kalau dijadikan satu seperti kemarin itu ya memang lain. Tapi ya bersyukur ada seperti itu, dan jika diadakan seperti itu agar disendirikan. Tk itu lain dengan SD,

penerimaannya lain. Kalau digabung kan sudah gak nyambung, tapi kalau TK sendiri SD sendiri kan khusus TK dan SD sudah bisa memahami sendiri-sendiri. Apapun kalau bisa antara SD dan TK jangan bersamaan, kurikulum beda penerimaan juga beda, kalau jadi satu ya repot. Seperti sertifikasi, kalau jadi satu ya repot. TK dan SD memang perbidang tapi kan bidangnya lain, TK bidangnya pengembangan.”

**LAPORAN HASIL WAWANCARA  
DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL  
YANG MENJADI SOSIALISASI PUG**

**A. Waktu Pelaksanaan**

Hari/Tanggal : Sabtu, 31 Mei 2014  
Tempat : SD N 1 Prambanan  
Waktu : 08.00 – 09.10

**B. Identitas Diri Responden**

Inisial : TB  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : S1 Bahasa dan Sastra Indo  
Usia : 56 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru  
Jabatan : Kepala Sekolah

**C. Daftar Pertanyaan**

1. **Peneliti** :Apakah Dinas Pendidikan melakukan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di sekolah ini?  
**Informan** :“Iya. Tapi bukan di sekolah ini namun kepala sekolah diundang kesana. Terus diberikan istilahnya pengertian-pengertian sosialisasi setelah diadakan sosialisasi kemudian pihak sekolah mensosialisasikan kepada guru dan siswa meskipun secara sederhana.”
2. **Peneliti** :Program apa sajakah yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di sekolah ini?  
**Informan** :“Ya yang kemarin itu intinya kita diberikan sosialisasi lalu diharapkan untuk disebarluaskan atau disosialisasikan kepada guru dan siswa. Tentunya harapan dari dinas dapat bermanfaat dan dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Tapi intinya hal semacam itu di sekolah kan sudah ada kurikulum yang harus dilakukan maka hal itu hanya bisa disisipkan dan tidak ada waktu khusus hanya sekali dua kali kita sampaikan ketika dapat program itu.”
3. **Peneliti** :Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di sekolah ini?  
**Informan** :“Ya kalau menurut saya lebih di penerapannya lebih sering. Misal disosialisasikan tidak hanya sekali. Bahkan kalau sosialisasi kepada guru, kepala sekolah dan siswa. Apakah itu mau dijadikan satu

digabung atau sendiri-sendiri. Tapi dari pihak dinas seharusnya tidak membebani kami sebagai guru untuk memberikan itu, dan sebaiknya ada tim khusus yang bisa datang untuk ke sekolah-sekolah atau bisa disebut sebagai sosialisasi atau evaluasi, jangan dipasrahkan di sekolah karena sekolah kerjanya juga banyak.”

4. **Peneliti** :Sejauh mana Kebijakan Pengarusutamaan Gender diterapkan di sekolah ini?

**Informan** :“Baru tahap sosialisasi.”

5. **Peneliti** :Sudah efektifkan program-program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tersebut bagi sekolah ini?

**Informan** :“Kalau sekali ya belum. Masih harus diadakan peningkatan. Dalam hal ini boleh dibilang seperti tadi saya sampaikan jangan hanya sekali menyampaikan materi bisa disampaikan lagi dikelompok lain bahkan atau dibentuk tim kecamatan dalam penyebarannya.”

6. **Peneliti** :Faktor pendukung dan penghambat apa sajakah yang selama ini terdapat dalam implementasi kebijakan tersebut?

**Informan** :“Pertama memang waktu, kalau masalah hasil dari sosialisasi kami pada anak-anak alhamdulillah sudah terlihat nyata di beberapa kegiatan itu kita tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan, bahkan banyak perempuan yang ambil bagian. Termasuk kecerdasan anak di bidang pendidikan juara-juaranya sebagian besar perempuan untuk disini. Bahawa yang memegang prestasi 1, 2, 3 perempuan. Kalau laki-laki cenderung lebih sembrono seperti tidak punya beban. Sebagian besar untuk anak-anak itu laki-laki lebih ‘*ndleyo*’ yaitu cuek.”

7. **Peneliti** :Apa saran bapak/inu terkait Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)?

**Informan** :“Kalau misal memungkinkan dibentuk tim khusus yang bisa datang ke sekolah yang sudah ditunjuk artinya selain mengawasi sekaligus mengevaluasi sampai dimana materi itu bisa terserap pelaksanaannya pada anak sehingga lebih spesifik dalam menangani gender ini. Bagaimana harapan pemerintah sampai dimana. Misal masih jauh bagaimana soslusinya dan tindak lanjutnya.”

**LAPORAN HASIL WAWANCARA  
DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL  
YANG MENJADI SOSIALISASI PUG**

**A. Waktu Pelaksanaan**

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2014  
Tempat : SMP N 1 Prambanan  
Waktu : 09.00 – 10.00

**B. Identitas Diri Responden**

Inisial : MS  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : S2  
Usia : 54 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru  
Jabatan : Kepala Sekolah

**C. Daftar Pertanyaan**

1. **Peneliti** :Apakah Dinas Pendidikan melakukan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di sekolah ini?

**Informan** :“Sebelum implementasi ada sosialisasi, secara kedinasan juga ada surat yang disebarkan ke sekolah-sekolah, disamping itu saya secara keseluruhan saja, bahkan tahun ajaran 2012/2013 juga ada perhatian dari pemerintah untuk subsidi yang berkaitan pelaksanaan gender itu. Kemudian kemanfaatannya berupa kebijakan terutama kepada bapak dan ibu, yang berkaitan dengan siswa bahwa tidak ada perbedaan. Sesuai dengan anjuran atau aturan yang berlaku, kebijakan di sekolah-sekolah ini yang berkaitan dengan tupoksi masing-masing disetiap satuan pendidikan itu semua diberi porsi yang sama. Setiap satuan pendidikan mempunyai kebijakan yang berbeda terutama penempatan guru dan karyawan itu berkaitan dengan tugas-tugas tambahan. Tugas tambahan yang itu juga dilihat dari berbagai sudut. Pertama kompetensi, kemauan, kesungguhan. Sekalipun kompetensinya ada tapi tingkat kesungguhannya kurang ya kurang seimbang.”

2. **Peneliti** :Program apa sajakah yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di sekolah ini?

**Informan** :“Program yang awal adalah sosialisasi kepada jajarannya guru dan karyawan. Ya itu tadi ada pemihakan pada sekolah-sekolah tapi



sosialisasi itu bukan guru tapi kepala sekolah kemudian disosialisasikan kepada guru, ya sesuai dengan tupoksi, semua tidak terlepas dari perannya tenaga pendidikan sesuai dengan pembagian tugasnya. Jadi yang terpenting baik itu bapak atau ibu-ibu tidak ada perlakuan diskriminasi, dan diperlakukan sama dan memiliki kesemangatan yang sama untuk peningkatan karir. Contoh setiap ada promosi kepala sekolah itu tidak selalu bapak-bapak tapi ibu pun dipromosikan untuk jadi kepala sekolah. Tapi kebetulan tahun ini adanya bapak-bapak yang diikutkan seleksi kepala sekolah. Selain seleksi kepala sekolah, guru teladan pun juga dilakukan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak.”

3. **Peneliti** :Bagaimana pendapat bapak/ibu guru terkait Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di sekolah ini?

**Informan** :“Implementasi dari sosialisasi sudah dilaksanakan, dan ada subsidi dari pemerintah untuk diserahkan pada kepala sekolah. Hanya saja program sekolah tidak ditentukan namun dari tiap satuan pendidikan itu sendiri-sendiri hanya tinggal pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Kegiatan secara khusus itu ada yaitu Dharma Wanita. Untuk kegiatan yang menyangkut pembelajaran yaitu tutor bagi siswa dan kegiatan sosial bagi masyarakat yang terkena musibah.”

4. **Peneliti** :Sejauh mana Kebijakan Pengarusutamaan Gender diterapkan di sekolah ini?

**Informan** :“Sudah dilaksanakan secara normatif, adapun diprosentase belum seratus persen. Namun adanya sosialisasi terkait PUG itu, tingkat kesadaran dan kewajaran bahwa kita memiliki kesetaraan mengenai kesetaraan itu ada pemahaman. Jadi misalnya dalam implementasi dalam kegiatan ini kepanitian atau dalam kepengurusan dan sebagainya itu selalu melibatkan guru baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan bervariasi.”

5. **Peneliti** :Sudah efektifkan program-program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tersebut bagi sekolah ini?

**Informan** :“Karna itu merupakan bagian dari serangkaian kegiatan. Tingkat efektifitasnya menurut saya ya sudah lumayan efektif namun tingkat efisien kurang. Yang jelas karna ini bagian yang mungkin sebagian teman menganggap bahwa ini adalah formalitas.”

“Menurut apa yang saya lakukan disini itu cukup efektif tapi untuk sekolah-sekolah yang lain saya tidak tahu persis, paling tidak pemahaman itu sudah disosialisasikan dan sudah disampaikan. Kegiatan yang berkaitan dengan itu sudah dilaksanakan, bahwa itu bukan dianggap hal yang sangat vital dalam pendidikan maka porsi kebijakan maupun

ranahnya itu *diincludekan* dalam kegiatan yang ada sesuai porsi masing-masing.”

6. **Peneliti** :Faktor pendukung dan penghambat apa sajakah yang selama ini terdapat dalam implementasi kebijakan tersebut?

**Informan** :“Faktor pendukung yang pertama masing-masing memahami kesetaraan gender itu merupakan hal yang harus dijunjung tinggi. Kalau masalah kendala itu tidak begitu, hanya terus terang saja dari segi fisik itu untuk hal kegiatan yang berkaitan dengan fisik itu pasti untuk pihak laki-laki itu masih banyak yang diikutseratakan dalam hal, tap hal pemikiran itu sudah merata. Kalau masalah kendala mungkin karna kesetaraan gender itu dianggap untuk sekarang ini bagi kita baik wilayah Klaten dan lain-lain itu hal yang sama dan paham bahwa pria dan wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama.”

7. **Peneliti** :Apa saran bapak/ibu terkait Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)?

**Informan** :“Karna hal yang semacam ini sudah berjalan, kalau boleh saya sampaikan yaitu perlu peningkatan dari hal yang sudah dilaksanakan. Kemudian sudah baik, wajarlah disana sini masih ada kelemahan yang kemudian tadi bukan konseptual tapi dalam implementasinya tidak ad perbedaan.”

“Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi itu melalui pengawas satuan pendidikan, tapi tidak khusus terkait gender, tapi menanyakan kegiatan awal tahun, masukan-masukan dari teman-teman itu diinfokan. Yang paling efektif adalah pengawas, namun secara khusus memonitoring terkait gender belum ada. Hanya dulu ketika pemberian bantuan itu dipantau, terutama keefektifan penggunaan bantuan dana yang dilakukan.”

**LAPORAN HASIL WAWANCARA  
DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL  
YANG MENJADI SOSIALISASI PUG**

**A. Waktu Pelaksanaan**

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Juli 2014  
Tempat : SMA N 1 Prambanan  
Waktu : 10.00 – 11.00

**B. Identitas Diri Responden**

Inisial : SH  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : S2  
Usia : 43 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru  
Jabatan : Kepala Sekolah

**C. Daftar Pertanyaan**

1. **Peneliti** : Apakah Dinas Pendidikan melakukan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di sekolah ini?  
**Informan** : “Baru tahap sosialisasi.”
2. **Peneliti** : Program apa sajakah yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di sekolah ini?  
**Informan** : “Berarti ya belum ada. Baru tahap sosialisasi.”
3. **Peneliti** : Bagaimana pendapat bapak/ibu guru terkait Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di sekolah ini?  
**Informan** : “Diupayakan tidak ada, emansipasi itu tetap, tidak kemudian laki-laki sebagai pemimpin dasarnya profesional, satu profesional dua pemerataan. Tapi pertama tetap profesional, sekolah, kemudian jabatan-jabatan di sekolah ya tidak contohnya kemarin wakil kepala sekolah itu kita pilih secara terbuka, bapak ibu komposisinya sama tidak ada rasio juga, kemudian terpilih itu putri ya sudah, nah itu amanat standar proses. Jadi kemudian sarana prasarana itu kan terkesan tidak harus seperti itu, mereka punya anak buah dalam pelaksanaan bapak-bapak ikut melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Kemudian kalau naik itu kan dari unsur pelaksana. Itu saja yang sederhana yang secara khusus apakah program pengarusutamaan itu secara khusus ya apa ya kalau Darma Wanita ya jelas. Darma Wanita

gender, tapi kalau prinsip keterlibatan ibu-ibu di sekolah ini pun ada, kegiatan bersama bapak ibu, saya pikir tidak banyak kegiatan, tapi kalau dimanajemen itu tidak membedakan bapak ibu, dan semua memiliki peluang yang sama untuk menjadi bagian dari manajemen ada diskriminasi. Disini guru olahraga juga putri dan tidak mengurangi apapun, jalan saja. Dan memang pada tahap awal kalau guru tidak tetap itu pasti ada rasa gimana-gimana tapi bukan karna gender tapi lebih karna posisi guru tidak tetap. Ini wakil kepala sekolah urusan kurikulum juga, sarana prasarana putri, kemarin ada kegiatan peningkatan mutu itu putri juga, terus siswanya sebagian besar putri juga. Kegiatan OSIS umum tidak kemudian kegiatan-kegiatannya putri, kemarin ada kegiatan mbak mas pada kartinian.”

4. **Peneliti** :Sejauh mana Kebijakan Pengarusutamaan Gender diterapkan di sekolah ini?

**Informan** :“Kaitannya dengan dinas, dinas mau tahap sosialisasi atau implementasi sebernarnya sekolah ini harus berjalan. Prinsip pendidikan dan kegiatan pengarusutamaan gender di sekolah ini ada. sehingga tidak kemudian program ini dari dinas kemudian kita melaksanakan ini, tapi sekolah melaksanakan atas inisiatif sendiri, termasuk apa namanya ini komposisi wakil kepala sekolah putra putri, kemudian di tingkat pengurusan osis putra putri, jabatan-jabatan di sekolah putra putri itu sudah tidak ada diskriminasi. Intinya seperti itu.”

5. **Peneliti** :Sudah efektifkan program-program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tersebut bagi sekolah ini?

**Informan** :“Sekolah ini kan baru tahap sosialisasi, sehingga tahu efektif tidaknya ya dilihat saja program-program di dinas, apa kemudian di sekolah itu sudah seperti yang disana belum, kalau di sekolah sudah seperti yang disana berarti efektif.”

“Tapi kalau mau melihat sudah efektifkah saya tidak punya secara standar khusus, program pengarusutamaan gender itu hanya terintegrasi dalam pengelolaan sekolah, tidak kemudian ohh.. ini khusus ini, darma wanita itu gender tapi pengajian tidak gender.”

6. **Peneliti** :Faktor pendukung dan penghambat apa sajakah yang selama ini terdapat dalam implementasi kebijakan tersebut?

**Informan** :“Faktor pendukungnya kan ya kesiapan teman-teman untuk menerima, jadi mereka welcome, kegiatan ini ditunjuk oleh teman yang lain mereka bisa atau mau ya bukan karna ibu-ibu mengurus rumah tidak mau tapi ya mau, mereka loyal pad tugas. Faktor Penghambat ya itu naluri kewanitaan saja, bahwa ibu harus ini itu, sehingga kadang-kadang kalau ada kegiatan-kegiatan yang kalau sudah waktu pulang ya tetep pulang tapi

kalau bapak-bapak tidak begitu terpancang waktu. Sehingga kalau ada ibu-ibu hebat jauh lebih hebat, bapak hebat sudah biasa. Tapi ibu-ibu kalau ada kegiatan malam di sekolah ya ke sekolah. Tapi kalau biasanya diantar bapak. Misal malam ada kegiatan seperti pengajaran tidak kemudian dibatasi, yang nyusun jadwal yang nyusun kegiatan itu disesuaikan.” “Saya pikir tidak terlalu banyak hambatan untuk menerapkan pengarusutamaan gender. Dinas itu kan anda lihat sendiri program seperti apa. Misal sosialisasi, sosialisasinya apa, misal efektif itu kan antara tujuan dan pelaksanaan. Tercapai ya tercapai, enggak ya enggak. Terkait ini dari dinas pastinya dibuat program tersendiri kalau mau dibuat program ada sosialisasi ada implementasi ada evaluasi ada pelaporan, ada pengawasan monev intinya, sehingga terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan.”

7. **Peneliti** :Apa saran bapak/inu terkait Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)?

**Informan** :“Pastinya ada inovasi seperti apa. Kalau mau karakter bahwa Klaten kegiatan pengarusutamaan gender itu mesti disamping yang pokok-pokok ada inovasi seperti apa. Tapi kalau cuma misal UAS bandel ya gimana. Tapi ya mungkin saja ya blum tahu.”

**LAPORAN HASIL WAWANCARA  
DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL  
YANG MENJADI SOSIALISASI PUG**

**A. Waktu Pelaksanaan**

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Juli 2014  
Tempat : PKBM Cipta Karya  
Waktu : 10.00 – 11.30

**B. Identitas Diri Responden**

Inisial : SW  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SMK Perdagangan  
Usia : 41 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jabatan : Koordinator PKBM Cipta Karya

**C. Daftar Pertanyaan**

1. **Peneliti** :Apakah Dinas Pendidikan melakukan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di PKBM ini?  
**Informan** :“Iya “
2. **Peneliti** :Program apa sajakah yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di PKBM ini?  
**Informan** :“Kalau untuk saat ini ya baru mulai kemarin itu langkah awal sosialisasi tapai kelanjutannya belum. Tapi untuk gender kalau program diluar ini belum. Saya pertama mendapat pelatihan lalu tindak lanjut dari dinas ya sosialisasi gender di sekolah bagi pengelola di Kecamatan Prambanan. Pendanaan tergantung dari kita.”
3. **Peneliti** :Bagaimana pendapat bapak/ibu guru terkait Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di PKBM ini?  
**Informan** :“Kalau menurut pandangan saya sampai saat ini kegiatan baru sebatas sosialisasi, ibarat sebatas pengumuman tentang gender memang untuk tindak lanjut belum, baru pengenalan. Sekarang langkah awal sosialisasi mungkin dari dinas ada program lain sebagai kelanjutan, mungkin ada program-program terkait gender. Memang baru sebatas sosiasliasi. Dari dinas memang disosialisasikan. Setiap kali pertemuan dari dinas saya sosialisasikan kepada elemen masyarakat.”

4. **Peneliti** :Sejauh mana Kebijakan Pengarusutamaan Gender diterapkan di PKBM ini?  
**Informan** :“Ya memang baru sebatas sosialisasi.”
5. **Peneliti** :Sudah efektifkan program-program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tersebut bagi PKBM ini?  
**Informan** :“Efektif dan dampak dimasyarakat sangat positif. “
6. **Peneliti** :Faktor pendukung dan penghambat apa sajakah yang selama ini terdapat dalam implementasi kebijakan tersebut?  
**Informan** :“Kalau implementasi terkait penerapan di lingkungan untuk gender terus terang saat ini mereka tinggal memahami ohh..ternyata ini gender, dan dari kegiatan itu sudah mencakup gender seperti karawitan yang awalnya khusus untuk ibu dengan maksud kenapa ibu-ibu, kebetulan di masyarakat kalau bapak-bapak keluar malam sudah biasa, maka kalau ibu-ibu hanya di rumah tidak pernah sosialisasi ibarat antar RT itu sudah tidak pernah ketemu dan adanya *gap*, maka dari kemarin saya kumpulkan satu RW kumpul jadi satu. Nah dari sosialisasi itu sangat bermanfaat dan sekarang mereka merasa keluarga. Setelah itu yang bapak-bapak kan punya inisiatif, bahkan bapak-bapak itu jga turut dalam kegiatan itu sehingga ikut membaur.”  
“Kalau menurut saya gender itu ya tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Dulu perbedaan antara laki-laki dan perempuan berbeda, ketika sore ibu-ibu di rumah, bapak pun masih diluar. Dan sangat berpengaruh dalam keluarga yaitu keharmonisan keluarga. “  
“Biasanya kerajinan identik dengan laki2 tapi dimasyarakat untuk kegiatan-kegiatan sosial malah 70% wanita, laki-laki rata-rata sekolah ya minimal SMP tapi perempuan biasanya tidak sekolah yang dulu mereka kelahiran tahun 1955 1960.”
7. **Peneliti** :Apa saran bapak/ibu terkait Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)?  
**Informan** :“Kalau saran saya gender itu memang 80% hanya disosialisasi, misal sekarang saya mendapat sosialisasi saya bisa menerapkan pada lingkungan saya , kalau untuk suport kegiatan ya sekarang yang macam apa? Menurut saya Sosialisasi memang efektif. Ketika pengetahuan gender dari lapisan masyarakat sudah mengetahui, saya yakin dari pengetahuan itu penerapannya diluar bisa. Misal istri saya ingin belajar ini itu tidak dibatasi. Saya setelah mendapat pengetahuan itu saya tahu bahwa perempuan juga punya hak. Dan menurut saya masih

lebih pada sosialisasi. Kalau sosialisasi kan minimal 5 tahun ke depan memang belum terlihat hasilnya.”

“Kalau gender saya pribadi hanya bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa paham. Dan kalau misal sekarang mau dibuat program apa dan bagaimana tindak lanjutnya.”

“Yang paling penting yang keterkaitan dengan gender itu titik tujuannya yang kita sosialisasikan seperti koordinator dan elemen masyarakat. Misal pemilik-pemilik perusahaan. Tapi kalau sekarang ini gender sudah menjadi hal umum namun hanya dalam pelaksanaan itu dalam pola hidup sehari-hari untuk masuk kesitu ya bagaimana.”



**LAPORAN HASIL WAWANCARA  
DENGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**

**A. Waktu Pelaksanaan**

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Juni 2014  
Tempat : Dinas Pendidikan  
Waktu : 09.00 – 10.00

**B. Identitas Diri Responden**

Inisial : TH  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : S1  
Usia : 52 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten  
Jabatan : Seksi Perpustakaan

**C. Daftar Pertanyaan**

1. **Peneliti** : Sejak kapan Anda menjabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten?  
**Informan** : “Tahun 1998”
2. **Peneliti** : Apa tugas dan fungsi utama Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten?  
**Informan** : “Secara umum karna hanya staff ya mbak, jawaban yang saya tahu, dinas pendidikan merupakan ujung tombak yang ada di negara ini khususnya yang ada di Klaten. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak usia mulai dari dalam kandungan sampai anak usia 18.”
3. **Peneliti** : Apa yang Anda ketahui tentang peranan Dinas pendidikan Kabupaten Klaten terhadap pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan?  
**Informan** : “Untuk peran dari dinas pendidikan tentang PUG untuk saat ini sepanjang kami tahu baru bisa memfasilitasi atau membedakan pengertian dasar dari gender itu sendiri sehingga siswa anak didik kami tahu tentang keberadaannya, pembedanya, fungsinya. Dari situ dulu anak-anak secara dasar tahu.”
4. **Peneliti** : Sejak kapan pengarusutamaan gender dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten?

**Informan** :“PUG ada sejak 2002 atau 2004. Saya baru tahun 2012 untuk ditugasi gender. Kalau saya mendengar tentang gender sejak ditugasi. “

5. **Peneliti** :Program apa sajakah yang disusun dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten?

**Informan** :“Pelaksanaan PUG di Dinas Pendidikan Klaten itu bersumber dari APBD. Dari sumber yang sangat terbatas itu jadi untuk pelaksanaan pada tingkat sosialisasi dan pemetaan sekolah-sekolah yang ditunjuk.”

Renstra terkait PUG Belum ada. Jika berbicara pada renstra sangat menarik. Namun sangat panjang rentetannya. Namun tenaga untuk menangani PUG itu belum ada secara spesifik.”

6. **Peneliti** :Seberapa efektifkah implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan?

**Informan** :“Secara umum kami baru bisa mengamati dari pendidik di Dinas Pendidikan ini memang sudah dikenalkan tentang gender itu sendiri, tapi untuk bidang pendidikan pada anak didik baik perempuan maupun laki-laki secara mendasar memang mayoritas masih belum memahami.”

7. **Peneliti** :Faktor pendukung dan penghambat apa sajakah yang selama ini terdapat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut?

**Informan** :“Faktor pendukung ya pemahaman itu butuh dana, penerapan juga butuh dana. Secara konkrit pemetaan butuh ini butuh ini juga butuh dana. Mungkin pendanaan juga butuh dana. Untuk tenaga juga perlu mengetahui dan dipahami.”

8. **Peneliti** :Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam merealisasikan implementasi kebijakan PUG dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten?

**Informan** :“Para-pada pembawa kebijakan memang harus tahu dulu arah dari PUG pendidikan itu sendiri jadi pada seorang pengambil kebijakan itu tahu seperti ini outputnya seperti ini beliau-beliau memang harus tahu. Kalau dibicarakan soal kendala kalau kita mengambil dari RAPBS sekolah gimana contoh-contoh konkrit di sekolah harusnya bisa, tapi karna pihak sekolah belum begitu paham.”

9. **Peneliti** : Apa dan bagaimana yang akan dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten untuk mewujudkan kesetaraan gender kedepannya?

10. **Peneliti** :Adakah pengontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten?

**Informan** :“Kegiatan evaluasi memang harusnya ada. Tapi juga karna keterbatasan personil terutama tugas yang diberikan tidak bisa terealisasi untuk itu dan dana jadi belum. Tapi kalau sewaktu-waktu kita ketemu dengan sekolah-sekolah yang pernah terjamah dengan sosialisasi ya kita tanyakan.

11. **Peneiti** :Dampak positif seperti apa yang dapat dirasakan dalam pelaksanaan merealisasikan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan?

**Informan** :“Kalau saya melihat kedepan tentang PUG itu jika dibandingkan dengan budaya timur itu saya memang belum sepaham untuk saya pribadi. Tapi kalau itu menurut pemerintah dan menag harus dijalankan ya memang harus dijalani.”

12. **Peneliti** :Saran apa yang Anda inginkan dalam merealisasikan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan?

**Informan** :“Sepanjang jalur pendidikan itu ditempatkan pada porsinya sesuai dengan keinginan anak didiknya dan itu bisa diterapkan pada kehidupan masing-masing saya kira gender itu bisa berjalan dengan sendirinya.”

# REDUKSI DATA

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  
DALAM PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

| 1                                                                                                              | 2                                                                                                                                                      | 3              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| Pengumpulan Data                                                                                               | Reduksi Data                                                                                                                                           | Penyajian Data |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tanggal    | Kode |
| <b>Jenjang Pendidikan Formal</b>                                                                               |                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |
| <b>TK (A-1)</b>                                                                                                |                                                                                                                                                        | Sosialisasi    | Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten telah melakukan kegiatan sosialisasi gender.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11/06/2014 | A-1  |
| Dari Dinas memang melakukan kegiatan sosialisasi gender                                                        | Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten telah melakukan kegiatan sosialisasi gender.                                                                         |                | Iya, Dinas Pendidikan telah melakukan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender. Kepala sekolah di undang oleh pihak Dinas pendidikan dalam kegiatan sosialisasi gender dan pelaksanaannya di sekolah untuk di sosialisasikan pada pihak sekolah.                                                                                                                                                                                    | 31/05/2014 | A-2  |
| Pengarusutamaan itu apa sih mbak? Juga belum ada program memang baru kemarin itu ada wawasan dari kegiatan itu | Program terkait pengarusutamaan gender belum ada, namun kegiatan yang telah dilakukan adalah wawasan tentang gender yakni berupa sosialisasi itu tadi. |                | Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten yakni adanya sosialisasi. Secara kedinasan ada surat yang diberikan ke sekolah-sekolah terkait kegiatan sosialisasi tersebut. pada tahun 2012/2013 pemerintah juga memberikan subsidi dalam pelaksanaan gender di sekolah. Dimana kebijakan tersebut memberikan manfaat kepada bapak dan ibu yang berkaitan dnegan siswa bahwa tidak | 10/06/2014 | A-3  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                               |            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan.                                                                                                                                              |            |     |
| Dari kemarin, terus dari sini juga tidak ada tindak lanjut, kalau ini dilaksanakan juga bagus tapi hanya karna kita blum mendalaminya semua                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pelaksanaan gender akan lebih baik apabila dilaksanakan dan dilakukan tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan, agar lebih bisa mendalami terkait gender.                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Implementasi pengarusutamaan gender di sekolah oleh Dinas pendidikan baru tahap sosialisasi.                                                                                                  | 07/07/2014 | A-4 |
| Jika di TK kelihatannya belum atau belum tepat atau belum waktunya atau karna baru pertama kali jadi belum memahaminya, jadi bagus jeleknya belum tau                                                                                                                                                                                                                                                                                | Penerapan PUG di TK belum tepat atau belum waktunya, dan baru pertama kali PUG di lakukan di TK ini, sehingga belum bisa diketahui bagus dab buruknya kebijakan tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Iya, Dinas Pendidikan telah melakukan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender.                                                                                                          | 01/07/2014 | A-5 |
| Ya dari awal memang saya jelas betul memang sudah bagus, karna saya belum tau betul dan diadakan dari dinas sepertinya ya baik, karna saya belum tahu betul maka jika diadakan berarti baik, tapi karna belum tahu betul jadi ya belum memahami sedetail itu. Alokasi dana untuk gender memang ada, tapi dialokasikan untuk guu WB. Ada berapa saya lupa. Saya lupa digunakan untuk apa, namun memang ada. Biayanya lupa, tapi kalau | Program yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sudah baik, namun karena kegiatan tersebut baru sekali dilakukan sehingga kami belum memahami betul program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan meskipun alokasi dana untuk kegiatan gender juga diberikan bagi sekolah. Yang perlu ditekankan lebih adalah pemahaman tentang gender itu sendiri, karena kami memang belum paham betul seperti apa gender itu jika diterapkan di sekolah. |  | Pelaksanaan PUG di Dinas Pendidikan Klaten bersumber dari APBD. Dari sumber yang sangat terbatas tersebut digunakan untuk pelaksanaan sosialisasi dan pemetaan sekolah-sekolah yang ditunjuk. | 20/06/2014 | A-0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>ditempatkan di sekolah memang disuruh untuk itu ya saya sampaikan, tapi karna saya blum memahami dari awal sampai akhir, dan dari sana juga maksudnya untuk saya mendapat informasi dari sana ya saya sampaikan di sekolah ini. Tapi saya lupa, dan hanya sebagian saya ingat. Di SD memang jalan karna SD perbidang, di TK juga per bidang tapi gurunya kan tidak sama. Walaupun disini juga diperbidangkan tapi kan gurunya itu-itu. Dan jika saya memang paham betul maka program ini memang baik, karna memang baru sekali mendapatkan itu. Untuk TK repot jika dilaksanakan, namun setidaknya kita mengetahui terkait gender. Sebenarnya saya sendiri juga tidak paham gender itu. Kegiatannya pun dilaksanakan secara singkat, tidak seharian</p> |                                                                                                               |  |  |  |  |
| <p>Kalau faktornya juga penghabatnya tidak ada, tapi kalau faktor pendukungnya ya</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan dirasa tidak ada. Pihak sekolah yang pasti</p> |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>bagus dn karna ada sosialisasi kita juga menjadi tahu dan kegiatan di TK tambah baik juga. Kemrin memang saya sampaikan, di TK ada 3 guru yang saya kasih tahu dan yang memegang peranan. Terkait gender memang telah saya sampaikan. Yang pasti kita menerima dan kita beusaha menjalani. Sebenarnya saya tidak paham sama sekali terkait gender ini. Karna baru kali ini mendapatkan sosialisasi terkait gender. Kemarin pun saya kurang fokus. Saya dari tahun 81 baru kali ini mendapatkan wawasan seperti ini. Tapi kalau TK lain saya tidak tahu. Terkait gender ini pun saya memang belum memahami. Dari sosialisasi ini ya saya mencoba memahaminya</p> | <p>menerima dan berusaha untuk melaksanakan kegiatan dari apa yang telah di sosialisasikan oleh Dinas Pendidikan. Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan gender di sekolah, karena sekolah memperoleh wawasan baru terkait gender dan pelaksanaannya.</p> |  |  |  |  |
| <p>Kalau saya itu memang buat TK supaya lebih maju dengan adanya seperti ini dan guru-guru TK juga bisa lebih tahu apa yang dimaksud gender itu. Sukur bisa tidak seprti ini misal semua TK</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Adanya pelaksanaan pengarusutamaan gender di sekolah saya sangat bersyukur, sehingga kami memperoleh pengetahuan terkait gender. Namun dalam pelaksanaannya atau sosialisasi dan</p>                                                                                                                                       |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
| diambil, misal seperti ini, biaya tidak usah diambil namun TK bisa memahaminya. Jadi pemahamannya itu se ide kalau dijadikan satu dengan SD itu tidak seimbang program kurikulum dan penerimanya juga lain, kalau dijadikan satu seperti kemren itu ya memang lain. Tapi ya bersyukur ada sprti itu, dan jika diadakan seperti itu agar disendirikan. Tk itu lain dengan SD, penerimaannya lain. Kalau digabung kan sudah gak nyambung, tapi kalau TK sendiri SD sendiri kan khusus TK dan SD sudah bisa memahami sendiri-sendiri. Apapun kalau bisa antara SD dan TK jangan bersamaan, kurikulum beda penerimaan juga beda, kalau jadi satu ya repot. Seperti sertifikasi, kalau jadi satu ya repot. TK dan SD memang perbidang tapi kan bidangnya lain, TK bidangnya pengembangan | pengarahan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan alangkah lebih baik apabila dalam sosialisasi atau pelaksanaan gender TK tidak digabungkan dengan jenjang sekolah yang lain terutama SD. Dalam kegiatan apapun TK selalu digabungkan. Padahal, program atau bidang di TK dan SD sama sekali berbeda. Karena di TK masih dalam tahap perkembangan, sehingga apabila suatu kegiatan sosialisasi terkait program kurang bisa nyambung antara TK dengan SD. |              |  |  |  |
| <b>SD (A-2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Implementasi |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Iya. Tapi bukan di sekolah ini namun kepala sekolah diundang kesana. Terus diberikan istilahnya pengertian-pengertian sosialisasi setelah diadakan sosialisasi kemudian pihak sekolah mensosialisasikan kepada guru dan siswa meskipun secara sederhana                                                                                                                                                                                             | Iya, Dinas Pendidikan telah melakukan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender. Kepala sekolah di undang oleh pihak Dinas pendidikan dalam kegiatan sosialisasi gender dan pelaksanaannya di sekolah untuk di sosialisasikan pada pihak sekolah.                                                                                       | PUG | Penerapan PUG di TK belum tepat atau belum waktunya, dan baru pertama kali PUG di lakukan di TK ini, sehingga belum bisa diketahui bagus dab buruknya kebijakan tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/06/2014 | A-1 |
| Ya yang kemarin itu intinya kita diberikan sosialisasi lalu diharapkan untuk disebarluaskan atau disosialisasikan kepada guru dan siswa. Tentunya harapan dari dinas dapat bermanfaat dan dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Tapi intinya hal semacam itu di sekolah kan sudah ada kurikulum yang harus dilakukan maka hal itu hanya bisa disisipkan dan tidak ada waktu khusus hanya sekali dua kali kita sampaikan ketika dapat program itu | Program dari Dinas Pendidikan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender bagi sekolah adalah sosialisasi. Dari sosialisasi tersebut diharapkan untuk disebarluaskan atau disosialisasikan kepada guru dan siswa, yang mana tentunya harapan dari Dinas Pendidikan dapat bermanfaat dan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. |     | Program yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sudah baik, namun karena kegiatan tersebut baru sekali dilakukan sehingga kami belum memahami betul program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan meskipun alokasi dana untuk kegiatan gender juga diberikan bagi sekolah. Yang perlu ditekankan lebih adalah pemahaman tentang gender itu sendiri, karena kami memang belum paham betul seperti apa gender itu jika diterapkan di sekolah. | 11/06/2014 | A-1 |
| Ya kalau menurut saya lebih di penerapannya lebih sering. Misal disosialisasikan tidak hanya sekali. Bahkan kalau sosialisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dirasa masih kurang, pleh karena itu penerapan kegiatan tentang gender lebih sering dilakukan. Seperti                                                                                                                                                                                        |     | Program dari Dinas Pendidikan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender bagi sekolah adalah sosialisasi. Dari sosialisasi tersebut diharapkan untuk disebarluaskan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31/05/2014 | A-2 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>kepada guru, kepala sekolah dan siswa. Apakah itu mau dijadikan satu digabung atau sendiri-sendiri. Tapi dari pihak dinas seharusnya tidak membebani kami sebagai guru untuk memberikan itu, dan sebaiknya ada tim khusus yang bisa datang untuk ke sekolah-sekolah atau bisa disebut sebagai sosialisasi atau evaluasi, jangan dipasrahkan di sekolah karena sekolah kerjanya juga banyak</p> | <p>kegiatan sosialisasi yang tidak hanya seklai saja. Dalam implementasi pengatusutamaan gender, Dinas Pendidikan seharusnya tidak membebani kepada guru untuk melakukan sosialisasi, namun ada tim khusus dari Dinas Pendidikan yang bisa datang ke sekolah-sekolah seperti sosialisasi, pemantauan dan evaluasi, sehingga tidak begitu saja diserahkan kepada sekolah sepenuhnya.</p> |  | <p>atau disosialisasikan kepada guru dan siswa, yang mana tentunya harapan dari Dinas Pendidikan dapat bermanfaat dan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.</p>                                                                                                              |                   |            |
| <p>Baru tahap sosialisasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Penerapan pengarusutamaan gender di sekolah oleh Dinas Pendidikan baru tahap sosialisasi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <p>Program awal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah sosialisasi kepada jajaran guru dan karyawan. Sosialisasi diberikan kepada kepala sekolah yang kemudian disosialisasikan kepada guru dengan menyesuaikan tupoksi dan tidak terlepas dari perannya sebagai tenaga pendidikan.</p> | <p>10/06/2014</p> | <p>A-3</p> |
| <p>Kalau sekali ya belum. Masih harus diadakan peningkatan. Dalam hal ini boleh dibilang seperti tadi saya sampaikan jangan hanya sekali menyampaikan materi bisa disampaikan lagi dikelompook lain</p>                                                                                                                                                                                           | <p>Program-program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait pengarusutamaan gender karena baru sekali ya belum dirasa efektif. Sosialisasi atau penyampaian materi gender jangan hanya sekali dilakukan,</p>                                                                                                                                                                        |  | <p>Belum ada program terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender karena baru tahap sosialisasi.</p>                                                                                                                                                                                           | <p>07/07/2014</p> | <p>A-4</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|-----|
| bahkan atau dibentuk tim kecamatan dalam penyebarannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | sosialisasi bisa dilakukan pada kelompok berbeda atau dibentuk tim kecamatan dalam penyebarannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |            |     |
| Pertama memang waktu, kalau masalah hasil dari sosialisasi kami pada anak-anak alhamdulillah sudah terlihat nyata di beberapa kegiatan itu kita tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan, bahkan banyak perempuan yang ambil bagian. Termasuk kecerdasan anak di bidang pendidikan juara-juaranya sebagian besar perempuan untuk disini. Bahawa yang memegang prestasi 1, 2, 3 perempuan | Faktor penghambat dalam implementasi pengarusutamaan gender di sekolah adalah waktu. Adapun hasil dari sosialisasi sudah terlihat dari tidak adanya perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Seperti contoh bahwa antara siswa laki-laki dan siswa perempuan berkesempatan yang sama untuk ambil bagian dalam pencapaian prestasi. Banyak anak perempuan yang mendapatkan prestasi, bahkan sebagian besar perempuan yang memegang prestasi 1, 2 dan 3. |  |  | 01/07/2014 | A-5 |
| Kalau misal memungkinkan dibentuk tim khusus yang bisa datang ke sekolah yang sudah ditunjuk artinya selain mengawasi sekaligus mengevaluasi sampai dimana materi itu bisa terserap pelaksanaannya pada anak                                                                                                                                                                                  | Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) agar dapat terlaksana dengan baik, apabila memungkinkan perlu dibentuk tim khusus yang bisa datang ke sekolah. Selain mengawasi jalannya PUG sekaligus mengevaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |            |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| sehingga lebih spesifik dalam menangani gender ini. Bagaimana harapan pemerintah sampai dimana. Misal masih jauh bagaimana sosialisinya dan tindak lanjutnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sampai dimana materi dijalankan. Sehingga dapat diketahui bagaimana sampai dimana pelaksanaan tersebut dijalankan serta apa solusi dan tindak lanjut dalam pelaksanaan PUG di sekolah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |     |
| <b>SMP (A-3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Faktor Pendukung & Penghambat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |     |
| Sebelum implementasi ada sosialisasi, secara kedinasan juga ada surat yang disebarkan ke sekolah-sekolah, disamping itu saya secara keseluruhan saja, bahkan tahun ajaran 2012/2013 juga ada perhatian dari pemerintah untuk subsidi yang berkaitan pelaksanaan gender itu. Kemudin kemanfaatannya berupa kebijakan terutama kepada bapak dan ibu, yang berkaitan dengan siswa bahwa tidak ada perbedaan. Sesuai dengan anjuran atau aturan yang berlaku, kebijakan di sekolah-sekolah ini yang berkaitan dengan tupoksi masing-masing disetiap satuan pendidikan itu semua diberi porsi yang sama. Setiap satuan pendidikan mempunyai kebijakan yang | Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten yakni adanya sosialisasi. Secara kedinasan ada surat yang diberikan ke sekolah-sekolah terkait kegiatan sosialisasi tersebut. pada tahun 2012/2013 pemerintah juga memberikan subsidi dalam pelaksanaan gender di sekolah. Dimana kebijakan tersebut memberikan manfaat kepada bapak dan ibu yang berkaitan dnegan siswa bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. |                               | Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan dirasa tidak ada. Pihak sekolah yang pasti menerima dan berusaha untuk melaksanakan kegiatan dari apa yang telah di sosialisasikan oleh Dinas Pendidikan. Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan gender di sekolah, karena sekolah memperoleh wawasan baru terkait gender dan pelaksanaannya. | 11/06/2014 | A-1 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| <p>berbeda terutama penempatan guru dan karyawan itu berkaitan dengan tugas-tugas tambahan. Tugas tambahan yang itu juga dilihat dari berbagai sudut. Pertama kompetensi, kemauan, kesungguhan. Sekalipun kompetensinya ada tapi tingkat kesungguhannya kurang ya kurang seimbang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |
| <p>Program yang awal adalah sosialisasi kepada jajarannya guru dan karyawan. Ya itu tadi ada pemihakan pada sekolah-sekolah tapi sosialisasi itu bukan guru tapi kepala sekolah kemudian disosialisasikan kepada guru, ya sesuai dengan tupoksi, semua tidak terlepas dari perannya tenaga pendidikan sesuai dengan pembagian tugasnya. Jadi yang terpenting baik itu bapak atau ibu-ibu tidak ada perlakuan diskriminasi, dan diperlakukan sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk peningkatan karir. Contoh setiap ada promosi kepala sekolah itu tidak</p> | <p>Program awal yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah sosialisasi kepada jajaran guru dan karyawan. Sosialisasi diberikan kepada kepala sekolah yang kemudian disosialisasikan kepada guru dengan menyesuaikan tupoksi dan tidak terlepas dari perannya sebagai tenaga pendidikan.</p> |  | <p>Faktor penghambat dalam implementasi pengarusutamaan gender di sekolah adalah waktu. Adapun hasil dari sosialisasi sudah terlihat dari tidak adanya perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri.</p> | 31/05/2014 | A-2 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| selalu bapak-bapak tapi ibu pun dipromosikan untuk jadi kepala sekolah. Tapi kebetulan tahun ini adanya bapak-bapak yang diikutkan seleksi kepala sekolah. Selain seleksi kepala sekolah, guru teladan pun juga dilakukan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |     |
| Implementasi dari sosialisasi sudah dilaksanakan, dan ada subsidi dari pemerintah untuk diserahkan pada kepala sekolah. Hanya saja program sekolah tidak ditentukan namun dari tiap satuan pendidikan itu sendiri-sendiri hanya tinggal pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Kegiatan secara khusus itu ada yaitu Dharma Wanita. Untuk kegiatan yang menyangkut pembelajaran yaitu tutor bagi siswa dan kegiatan sosial bagi masyarakat yang terkena musibah | Pelaksanaan pengarusutamaan gender dari sosialisasi sudah dilaksanakan, namun program secara khusus bagi sekolah dari pemerintah tidak ditentukan pada tiap satuan pendidikan. Pelaksanaan pengarusutamaan gender bergantung pada kebijakan masing-masing sekolah serta menjadi tanggungjawab sekolah dalam pelaksanaannya. Kesetaraan gender di sekolah nampak pada kegiatan Dharma Wanita. |  | Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender adanya pemahaman kesetaraan gender yang dijunjung tinggi. Adapun faktor penghambat lebih pada segi kegiatan fisik, yang mana masih mengedepankan keikutsertaan laki-laki daripada perempuan. | 10/06/2014 | A-3 |
| Sudah dilaksanakan secara normatif, adapun diprosentase belum seratus persen. Namun adanya sosialisasi terkait PUG itu, tingkat kesadaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pengarusutamaan gender di sekolah sudah dilaksanakan secara normatif. Adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan terkait PUG dapat meningkatkan                                                                                                                                                                                                                             |  | Faktor pendukung dalam implementasi gender di sekolah ini adalah kesiapan teman-teman guru untuk menerima kebijakan yang ada. Adapun faktor penghambat dalam implementasi                                                                                         | 07/07/2014 | A-4 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| <p>dan kewajaran bahwa kita memiliki kesetaraan mengenai kesetaraan it ada pemahaman. Jadi misalnya dalam implementasi dalam kegiatan ini kepanitian atau dalam kepengurusan dan sebagainya itu selalu melibatkan guru baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan bervariasi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>kesadaran dan kewajaran bahwa adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Seperti contoh dalam kegiatan kepanitiaan atau kepengurusan selalu melibatkan guru laki-laki maupun guru perempuan.</p> |  | <p>kebijakan tersebut lebih pada naluri kewanitaan saja. Misal seperti ada kegiatan-kegiatan ketika waktunya pulang karena terpancang waktu, namun bagi bapak-bapak waktu tidak menjadi suatu yang menjadi permasalahan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |            |     |
| <p>Karna itu merupakan bagian dari serangkaian kegiatan. Tingkat efektivitasnya menurut saya ya sudah lumayan efektif namun tingkat efisien kurang. Yang jelas karna ini bagian yang mungkin sebagian teman menganggap bahwa ini adalah formalitas.”<br/>“Menurut apa yang saya lakukan disini itu cukup efektif tapi untuk sekolah-sekolah yang lain saya tidak tahu persis, paling tidak pemahaman itu sudah disosialisasikan dan sudah disampaikan. Kegiatan yang berkaitan dengan itu sudah dilaksanakan, bahwa itu bukan dianggap hal yang</p> | <p>Tingkat efektivitas program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sudah lumayan efektif, namun tingkat efisien masih kurang dalam pelaksanaan di sekolah ini.</p>                                        |  | <p>Pemahaman tentang gender menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di masyarakat. Berbagai kegiatan masyarakat sudah mencakup gender, seperti karawitan yang awalnya khusus untuk ibu-ibu yang mana pemikiran masyarakat bahwa ketika sudah menjelang petang ibu-ibu harus sudah berada dirumah, namun kini dengan adanya kegiatan karawitan memberikan ruang sosialisasi bagi ibu-ibu, bahkan bapak-bapak juga turut dalam kegiatan karawitan.</p> | 01/07/2014 | A-5 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| sangat vital dalam pendidikan maka porsi kebijakan maupun ranahnya itu <i>diincludekan</i> dalam kegiatan yang ada sesuai porsi masing-masing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |
| Faktor pendukung yang pertama masing-masing memahami kesetaraan gender itu merupakan hal yang harus dijunjung tinggi. Kalau masalah kendala itu tidak begitu, hanya terus terang saja dari segi fisik itu untuk hal kegiatan yang berkaitan dengan fisik itu pasti untuk pihak laki-laki itu masih banyak yang diikutseratakan dalam hal, tap hal pemikiran itu sudah merata. Kalau masalah kendala mungkin karna kesetaraan gender itu dianggap untuk sekarang ini bagi kita baik wilayah Klaten dan lain-lain itu hal yang sama dan paham bahwa pria dan wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama | Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender adanya pemahaman kesetaraan gender yang dijunjung tinggi. Adapun faktor penghambat lebih pada segi kegiatan fisik, yang mana masih mengedepankan keikutsertaan laki-laki daripada perempuan. |  | Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender bahwa suatu kegiatan atau program itu memerlukan dana, begitu pula dengan penerapan. Maka faktor penghambatnya pun juga berkaitan dengan dana yang ada, bahwa tidak hanya dari pemetaan namun dari tenaga pun juga butuh pendanaan untuk memahami gender tersebut. | 20/06/2014 | A-0 |
| Karna hal yang semacam ini sudah berjalan, kalau boleh saya sampaikan yaitu perlu peningkatan dari hal yang sudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saran terkait implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) perlu diadakan kegiatan monitoring dan evaluasi gender                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                       |                                                         |            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----|
| dilaksanakan. Kemudian sudah baik, wajarlah disana sini masih ada kelemahan yang kemudian tadi bukan konseptual tapi dalam implementasinya tidak ada perbedaan.”<br>“Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi itu melalui pengawas satuan pendidikan, tapi tidak khusus terkait gender, tapi menanyakan kegiatan awal tahun, masukan-masukan dari teman-teman itu diinfokan. Yang paling efektif adalah pengawas, namun secara khusus memonitoring terkait gender belum ada. Hanya dulu ketika pemberian bantuan itu dipantau, terutama keefektifan penggunaan bantuan dana yang dilakukan | melaui pengawas satuan pendidikan. Pengawas sangat efektif untuk memonitoring keefektifan pelaksanaan serta penggunaan bantuan dana yang dilakukan. |                                       |                                                         |            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                       |                                                         |            |     |
| <b>SMA (A-4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | Kesetaraan Gender di Lembaga/Instansi |                                                         |            |     |
| Baru tahap sosialisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Implementasi pengarusutamaan gender di sekolah oleh Dinas pendidikan baru tahap sosialisasi.                                                        |                                       |                                                         | 11/06/2014 | A-1 |
| Berarti ya belum ada. Baru tahap sosialisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Belum ada program terkait pelaksanaan pengarusutamaan                                                                                               |                                       | Adapun hasil dari sosialisasi sudah terlihat dari tidak | 31/05/2014 | A-2 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gender karena baru tahap sosialisasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | adanya perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Seperti contoh bahwa antara siswa laki-laki dan siswa perempuan berkesempatan yang sama untuk ambil bagian dalam pencapaian prestasi. Banyak anak perempuan yang mendapatkan prestasi, bahkan sebagian besar perempuan yang memegang prestasi 1, 2 dan 3. |            |     |
| Diupayakan tidak ada, emansipasi itu tetap, tidak kemudian laki-laki sebagai pemimpin dasarnya profesional, satu profesional dua pemerataan. Tapi pertama tetap profesional, sekolah, kemudian jabatan-jabatan di sekolah ya tidak contohnya kemarin wakil kepala sekolah itu kita pilih secara terbuka, bapak ibu komposisinya sama tidak ada rasio juga, kemudian terpilih itu putri ya sudah, nah itu amanat standar proses. Jadi kemudian sarana prasarana itu kan terkesan tidak harus seperti | Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di sekolah ini diupayakan tidak adanya diskriminasi baik laki-laki maupun perempuan, dan emansipasi itu tetap ada. guru laki-laki dan guru perempuan memiliki komposisi yang sama dan juga tidak ada rasio. Sebagai contoh, pemilihan wakil kepala sekolah dilakukan secara terbuka. Baik guru laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama. Dari segi manajemen tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, semua memiliki peluang yang sama untuk |  | Kesetaraan gender di sekolah nampak pada kegiatan Dharma Wanita. Seperti contoh dalam kegiatan kepanitiaan atau kepengurusan selalu melibatkan guru laki-laki maupun guru perempuan                                                                                                                                                                                                   | 10/06/2014 | A-3 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>itu, mereka punya anak buah dalam pelaksanaan bapak-bapak ikut melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Kemudian kalau naik itu kan dari unsur pelaksana. Itu saja yang sederhana yang secara khusus apakah program pengarusutamaan itu secara khusus ya ap ya kalau Darma Wanita ya jelas Darma Wanita gender, tapi kalau prinsip keterlibatan ibu-ibu di sekolah ini pun ada, kegiatan bersama bapak ibu, saya pikir tidak banyak kegiatan, tapi kalau dimanajemen itu tidak membedakan bapak ibu, dan semua memiliki peluang yang sama untuk menjadi bagian dari manajemen ada diskriminasi. Disini guru olahraga juga putri dan tidak mengurangi apapun, jalan saja. Dan memang pada tahap awal kalau guru tidak tetap itu pasti ada rasa gimana-gimana tapi bukan karna gender tapi lebih karna posisi guru tidak tetap. Ini wakil kepala</p> | <p>menjadi bagian dari manajemen sekolah. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di sekolah terlihat pada berbagai kegiatan dan organisasi seperti Darma Wanita, OSIS serta tugas secara struktural sekolah.</p> |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| sekolah urusan kurikulum juga, sarana prasarana putri, kemarin ada kegiatan peningkatan mutu itu putri juga, terus siswanya sebagian besar putri juga. Kegiatan osis umum tidak kemudian kegiatan-kegiatannya putri, kemarin ada kegiatan mbak mas pada kartinian                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |     |
| Kaitannya dengan dinas, dinas mau tahap sosialisasi atau implementasi sebenarnya sekolah ini harus berjalan. Prinsip pendidikan dan kegiatan pengarusutamaan gender di sekolah ini ada. sehingga tidak kemudian program ini dari dinas kemudian kita melaksanakan ini, tapi sekolah melaksanakan atas inisiatif sendiri, termasuk apa namanya ini komposisi wakil kepala sekolah putra putri, kemudian di tingkat pengurusan osis putra putri, jabatan-jabatan di sekolah putra putri itu sudah tidak ada diskriminasi. Intinya seperti itu | Penerapan pengarusutamaan gender di sekolah ini berkaitan dengan Dinas Pendidikan. Baik itu baru tahap sosialisasi atau implementasi, sekolah harus berjalan. Prinsip pendidikan dan kegiatan pengarusutamaan gender di sekolah ini ada. sekolah melaksanakan atas inisiatif sendiri, tidak harus kemudian menunggu program dari Dinas Pendidikan. Sebagai contoh implementasinya di sekolah adalah tidak adanya diskriminasi baik guru laki-laki maupun perempuan, serta siswa laki-laki maupun perempuan. |  | Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di sekolah ini diupayakan tidak adanya diskriminasi baik laki-laki maupun perempuan, dan emansipasi itu tetap ada. guru laki-laki dan guru perempuan memiliki komposisi yang sama dan juga tidak ada rasio. Sebagai contoh, pemilihan wakil kepala sekolah dilakukan secara terbuka. Baik guru laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama. Dari segi manajemen tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, semua memiliki peluang yang sama untuk menjadi bagian dari manajemen sekolah. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di sekolah terlihat pada berbagai kegiatan dan | 07/07/2014 | A-4 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | organisasi seperti Darma Wanita, OSIS serta tugas secara struktural sekolah.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |
| <p>Sekolah ini kan baru tahap sosialisasi, sehingga tahu efektif tidaknya ya dilihat saja program-program di dinas, apa kemudian di sekolah itu sudah seperti yang disana belum, kalau di sekolah sudah seperti yang disana berarti efektif.”</p> <p>“Tapi kalau mau melihat sudah efektifkah saya tidak punya secara standar khusus, program pengarusutamaan gender itu hanya terintegrasi dalam pengelolaan sekolah, tidak kemudian ohh.. ini khusus ini, darma wanita itu gender tapi pengajian tidak gender</p> | <p>Program dari Dinas Pendidikan yang diberikan di sekolah baru tahap sosialisasi. Sehingga efektif atau tidaknya bisa dilihat dari berbagai program yang dijalankan Dinas Pendidikan. Apabila Dinas Pendidikan telah melaksanakan program sesuai dengan apa yang direncanakan, berarti program tersebut efektif. Jika melihat efektifitas di sekolah ini, tidak ada standar khusus terkait program pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender hanya terintegrasi dalam pengelolaan sekolah.</p> |  | <p>Berbagai kegiatan masyarakat sudah mencakup gender, seperti karawitan yang awalnya khusus untuk ibu-ibu yang mana pemikiran masyarakat bahwa ketika sudah menjelang petang ibu-ibu harus sudah berada dirumah, namun kini dengan adanya kegiatan karawitan memberikan ruang sosialisasi bagi ibu-ibu, bahkan bapak-bapak juga turut dalam kegiatan karawitan.</p> | 01/07/2014 | A-5 |
| <p>Faktor pendukungnya kan ya kesiapan teman-teman untuk menerima, jadi mereka welcome, kegiatan ini ditunjuk oleh teman yang lain mereka bisa atau mau ya bukan karna ibu-ibu ngurus rumah tidak mau tapi ya mau, mereka loyal pad tugas. Faktor</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Faktor pendukung dalam implementasi gender di sekolah ini adalah kesiapan teman-teman guru untuk menerima kebijakan yang ada. Adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut lebih pada naluri kewanitaan saja. Misal seperti ada kegiatan-kegiatan ketika waktunya pulang karena terpancang waktu,</p>                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>Penghambat ya itu naluri kewanitaan saja, bahwa ibu harus ini itu, sehingga kadang-kadang kalau ada kegiatan-kegiatan yang kalau sudah waktu pulang ya tetep pulang tapi kalau bapak-bapak tidak begitu terpancang waktu. Sehingga kalau ada ibu-ibu hebat jauh lebih hebat, bapak hebat sudah biasa. Tapi ibu-ibu kalau ada kegiatan malam di sekolah ya ke sekolah. Tapi kalau biasanya diantar bapak. Misal malam ada kegiatan seperti pengajaran tidak kemudian dibatasi, yang nyusun jadwal yang nyusun kegiatan itu disesuaikan.”</p> <p>“Saya pikir tidak terlalu banyak hambatan untuk menerapkan pengarusutamaan gender. Dinas itu kan anda lihat sendiri program seperti apa. Misal sosialisasi, sosialisasinya apa, misal efektif itu kan antara tujuan dan pelaksanaan. Tercapai ya tercapai, enggak ya enggak. Terkait ini dari dinas pastinya dibuat program tersendiri kalau mau dibuat</p> | <p>namun bagi bapak-bapak waktu tidak menjadi suatu yang menjadi permasalahan.</p> |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| program ada sosialisasi ada implementasi ada evaluasi ada pelaporan, ada pengawasan monev intinya, sehingga terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan                                                                                                                                   |                                                                                                                   |  |  |  |  |
| Pastinya ada inovasi seperti apa. Kalau mau karakter bahwa Klaten kegiatan pengarusutamaan gender itu mesti disamping yang pokok-pokok ada inovasi seperti apa. Tapi kalau cuma misal UAS bandel ya gimana. Tapi ya mungkin saja ya blum tahu                                              | Dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender pastinya perlu ada suatu inovasi dalam pengimplementasia nnya. |  |  |  |  |
| <b>Jenjang Pendidikan Non Formal</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |  |  |  |  |
| <b>PKBM (A-5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |  |  |  |  |
| Iya                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Iya, Dinas Pendidikan telah melakukan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender.                              |  |  |  |  |
| Kalau untuk saat ini ya baru mulai kemarin itu langkah awal sosialisasi tapai kelanjutannya belum. Tapi untuk gender kalau program diluar ini belum. Saya pertama mendapat pelatihan lalu tindak lanjut dari dinas ya sosialisasi gender di sekolah bagi pengelola di Kecamatan Prambanan. | Untuk saat ini, langkah awal yang dilakukan Dinas Pendidikan adalah sosialisasi dan belum ada kelanjutannya lagi. |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Pendanaan tergantung dari kita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| Kalau menurut pandangan saya sampai saat ini kegiatan baru sebatas sosialisasi, ibarat sebatas pengumuman tentang gender memang untuk tindak lanjut belum, baru pengenalan. Sekarang langkah awal sosialisasi mungkin dari dinas ada program lain sebagai kelanjutan, mungkin ada program-program terkait gender. Memang baru sebatas sosialisasi. Dari dinas memang disosialisasikan. Setiap kali pertemuan dari dinas saya sosialisasikan kepada elemen masyarakat | Implementasi pengarusutamaan gender menurut pandangan saya sampai saat ini baru sebatas sosialisasi, dan belum ada tindak lanjut lagi. Dari Dinas Pendidikan memang mensosialisasikan, dan kemudian saya sosialisasikan kepada elemen masyarakat. |  |  |  |  |
| Ya memang baru sebatas sosialisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sejauh mana kebijakan pengarusutamaan gender di PKBM ini memang baru sebatas sosialisasi.                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Efektif dan dampak dimasyarakat sangat positif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan terkait gender efektif dan memiliki dampak dimasyarakat yang sangat positif.                                                                                                                          |  |  |  |  |
| Kalau implementasi terkait penerapan di lingkungan untuk gender terus terang saat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pemahaman tentang gender menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan                                                                                                                                                     |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>ini mereka tinggal memahami ohh.. ternyata ini gender, dan dari kegiatan itu sudah mencakup gender seperti karawitan yang awalnya khusus untuk ibu dengan maksud kenapa ibu-ibu, kebetulan di masyarakat kalau bapak-bapak keluar malam sudah biasa, maka kalau ibu-ibu hanya di rumah tidak pernah sosialisasi ibarat antar RT itu sudah tidak pernah ketemu dan adanya gap, maka dari kemarin saya kumpulkan satu RW kumpul jadi satu. Nah dari sosialisasi itu sangat bermanfaat dan sekarang mereka merasa keluarga. Setelah itu yang bapak-bapak kan punya inisiatif, bahkan bapak-bapak itu juga turut dalam kegiatan itu sehingga ikut membaur.”</p> <p>“Kalau menurut saya gender itu ya tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Dulu perbedaan antara laki-laki dan perempuan berbeda, ketika sore ibu-ibu di rumah, bapak pun masih diluar. Dan sangat</p> | <p>gender di masyarakat. Berbagai kegiatan masyarakat sudah mencakup gender, seperti karawitan yang awalnya khusus untuk ibu-ibu yang mana pemikiran masyarakat bahwa ketika sudah menjelang petang ibu-ibu harus sudah berada dirumah, namun kini dengan adanya kegiatan karawitan memberikan ruang sosialisasi bagi ibu-ibu, bahkan bapak-bapak juga turut dalam kegiatan karawitan.</p> |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>berpengaruh dalam keluarga yaitu keharmonisan keluarga. “<br/> “Biasanya kerajinan identik dengan laki2 tapi dimasyarakat untuk kegiatan-kegiatan sosial malah 70% wanita, laki-laki rata-rata sekolah ya minimal SMP tapi perempuan biasanya tidak sekolah yang dulu mereka kelahiran tahun 1955 1960</p>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| <p>Kalau saran saya gender itu memang 80% hanya disosialisasi, misal sekarang saya mendapat sosialisasi saya bisa menerapkan pada lingkungan saya , kalau untuk suport kegiatan ya sekarang yang macam apa? Menurut saya Sosialisasi memang efektif. Ketika pengetahuan gender dari lapisan masyarakat sudah mengetahui, saya yakin dari pengetahuan itu penerapannya diluar bisa. Misal istri saya ingin belajar ini itu tidak dibatasi. Saya setelah mendapat pengetahuan itu saya tahu bahwa perempuan juga</p> | <p>Saran saya pelaksanaan gender 80% pada sosialisasi. Yang terpenting adalah bagaimana caranya agar masyarakat dapat memahami apa itu gender serta titik tujuannya yakni seperti koordinator dan elemen masyarakat. Saat ini gender sudah menjadi hal yang umum hanya bagaimana dalam pelaksanaan dalam pola sehari-hari.</p> |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>punya hak. Dan menurut saya masih lebih pada sosialisasi. Kalau sosialisasi kan minimal 5 tahun ke depan memang belum terlihat hasilnya.”</p> <p>“Kalau gender saya pribadi hanya bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa paham. Dan kalau misal sekarang mau dibuat program apa dan bagaimana tindak lanjutnya.”</p> <p>“Yang paling penting yang keterkaitan dengan gender itu titik tujuannya yang kita sosialisasikan seperti koordinator dan elemen masyarakat. Misal pemilik-pemilik perusahaan. Tapi kalau sekarang ini gender sudah menjadi hal umum namun hanya dalam pelaksanaan itu dalam pola hidup sehari-hari untuk masuk kesitu ya bagaimana</p> |                                                                                          |  |  |  |  |
| <b>Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |
| <b>Dinas Pendidikan (A-0)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |
| Tahun 1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saya menjabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sejak tahun 1998.                     |  |  |  |  |
| Secara umum karna hanya staff ya mbk, jawaban yang saya tahu, dinas pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tugas dan fungsi Dinas pendidikan Kabupaten Klaten sepengetahuan saya adalah bahwa Dinas |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| merupakan ujung tombak yang ada di negara ini khususnya yang ada di Klaten. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak usia mulai dari dalam kandungan sampai anak usia 18                                                                                                        | Pendidikan merupakan ujung tombak yang ada di negara ini khususnya yang ada di Klaten. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak usia mulai dari dalam kandungan sampai usia 18 tahun.                                                       |  |  |  |  |
| Untuk peran dari dinas pendidikan tentang PUG untuk saat ini sepanjang kami tahu baru bisa memfasilitasi atau membedakan pengertian dasar dari gender itu sendiri sehingga siswa anak didik kami tahu tentang keberadaannya, pembedanya, fungsinya. Dari situ dulu anak-anak secara dasar tahu | Peran dari Dinas Pendidikan tentang PUG untuk saat ini sepanjang kami tahu yakni baru bisa memfasilitasi atau membedakan pengertian dasar dari gender itu sendiri. sehingga siswa atau anak didik tahu tentang keberadaannya, pembedaannya, dan fungsinya. |  |  |  |  |
| PUG ada sejak 2002 atau 2004. Saya baru tahun 2012 untuk ditugasi gender. Kalau saya mendengar tentang gender sejak ditugasi                                                                                                                                                                   | Pengarusutamaan gender dirancang oleh Dinas Pendidikan sejak tahun 2002. Adapun saya diberikan tugas dalam bidang gender baru pada tahun 2012.                                                                                                             |  |  |  |  |
| Pelaksanaan PUG di Dinas Pendidikan Klaten itu bersumber dari APBD. Dari sumber yang sangat terbatas itu jadi untuk pelaksanaan pada tingkat sosialisasi dan pemetaan sekolah-sekolah                                                                                                          | Pelaksanaan PUG di Dinas Pendidikan Klaten bersumber dari dana APBD. Dari sumber yang sangat terbatas tersebut digunakan untuk pelaksanaan sosialisasi dan pemetaan sekolah-sekolah yang                                                                   |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| yang ditunjuk.” Renstra terkait PUG Belum ada. Jika berbicara pada renstra sangat menarik. Namun sangat panjang rentetannya. Namun tenaga untuk menangani PUG itu belum ada secara spesifik                                                                       | ditunjuk. Adapun Renstra PUG saat ini belum ada. berbicara terkait renstra sangat menarik, namun sangat panjang rentetannya. Dan tenaga khusus untuk menangani PUG pun belum ada secara spesifik.                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| Secara umum kami baru bisa mengamati dari pendidik di Dinas Pendidikan ini memang sudah dikenalkan tentang gender itu sendiri, tapi untuk bidang pendidikan pada anak didik baik perempuan maupun laki-laki secara mendasar memang mayoritas masih belum memahami | Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender secara umum baru bisa diamati dari para pendidik yang sudah dikenalkan tentang gender. Namun untuk bidang pendidikan pada anak didik baik perempuan maupun laki-laki secara mendasar memang mayoritas belum memahami.                                                                    |  |  |  |  |
| Faktor pendukung ya pemahaman itu butuh dana, penerapan juga butuh dana. Secara konkrit pemetaan butuh ini butuh ini juga butuh dana. Mungkin pendanaan juga butuh dana. Untuk tenaga juga perlu mengetahui dan dipahami                                          | Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender bahwa suatu kegiatan atau program itu memerlukan dana, begitu pula dengan penerapan. Maka faktor penghambatnya pun juga berkaitan dengan dana yang ada, bahwa tidak hanya dari pemetaan namun dari tenaga pun juga butuh pendanaan untuk memahami gender tersebut. |  |  |  |  |
| Para-para pembawa                                                                                                                                                                                                                                                 | Solusi untuk mengatasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| kebijakan memang harus tahu dulu arah dari PUG pendidikan itu sendiri jadi pada seorang pengambil kebijakan itu tahu seperti ini outputnya seperti ini beliau-beliau memang harus tahu. Kalau dibicarakan soal kendala kalau kita mengambil dari RAPBS sekolah gimana contoh-contoh konkret di sekolah harusnya bisa, tapi karena pihak sekolah belum begitu paham | hambatan-hambatan dalam penerapan PUG ya para pembawa kebijakan memang harus tahu terlebih dahulu arah dari PUG pendidikan itu sendiri. sehingga para pengambil kebijakan mengetahui output dari kebijakan tersebut.    |  |  |  |  |
| Kegiatan evaluasi memang harusnya ada. Tapi juga karena keterbatasan personil terutama tugas yang diberikan tidak bisa terealisasi untuk itu dan dana jadi belum. Tapi kalau sewaktu-waktu kita ketemu dengan sekolah-sekolah yang pernah terjamah dengan sosialisasi ya kita tanyakan. Koordinasi                                                                 | Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender memang seharusnya ada, namun karena keterbatasan personil terutama tugas yang diberikan serta dana yang kurang sehingga belum bisa terealisasi. |  |  |  |  |
| Kalau saya melihat kedepan tentang PUG itu jika dibandingkan dengan budaya timur itu saya memang belum sepaham untuk saya pribadi. Tapi kalau itu menurut                                                                                                                                                                                                          | Realisasi implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pendidikan kalau saya melihat kedepan jika dibandingkan dengan budaya                                                                                     |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| pemerintah dan menag harus dijalankan ya memang harus dijalani                                                                                                                                           | Timur saya pribadi kurang belum sepaham. Namun jika menurut pemerintah dan hal tersebut harus dijalankan ya memang harus dijalankan.                                                                                                                    |  |  |  |  |
| Sepanjang jalur pendidikan itu ditempatkan pada porsinya sesuai dengan keinginan anak didiknya dan itu bisa diterapkan pada kehidupan masing-masing saya kira gender itu bisa berjalan dengan sendirinya | Dalam merealisasikan kebijakan pengarusutamaan gender sepanjang jalur pendidikan itu ditempatkan pada porsinya sesuai dengan keinginan anak didiknya dan bisa diterapkan pada kehidupan masing-masing saya kira gender bisa berjalan dengan sendirinya. |  |  |  |  |



**LAMPIRAN 6**

# HASIL PENGERTAMATAN DOKUMEN

1. Dokumen Struktur Organisasi dan Daftar Pegaawai Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah

Pada pencermatan dokumen struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten didapatkan data bahwa struktur organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Kepegawaian. Dalam bagan organisasi juga terdiri atas bidang-bidang serta seksi-seksi di dalamnya. Adapun bidang yang ada di Dinas Pendidikan terdiri atas Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, Bidang Peningkatan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dan Bidang Pendidikan Non Formal. Dalam Bidang Pendidikan Dasar terdapat pembagian seksi yakni seksi taman kanak-kanak dan sekolah dasar, seksi sekolah menengah pertama dan pendidikan luar sekolah, serta seksi sarana dan prasarana. Pada Bidang Pendidikan menengah terdiri atas seksi sekolah menengah atas, seksi sekolah menengah kejuruan dan seksi sarana dan prasarana. Bidang Peningkatan Mutu Pendidikn dan Tenaga Kependidikan terdiri atas seksi pengembangan profesi, seksi pendidik, dan seksi tenaga kependidikan. Bidang Pendidikan Formal dan Non Formal terdiri atas Seksi pendidikan masyarakat, pendidikan anak usia dini dan kesetaraan serta seksi perpustakaan sekolah. Dalam bagan organisasi tersebut juga diterangkan adanyaKelompok Jabatan Fungsional serta Unit pelaksana Teknis Dinas.

2. Dokumen Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Pada pencermatan dokumen visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten didapatkan data bahwa Dinas Pendidikan memiliki visi yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas, Kreatif, Disiplin dan berakhlak Mulia dalam Kerangka Klaten yang Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo. Adapun misisnya yaitu melaksanakan pembinaan terhadap pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap sekolah dan masyarakat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki; mewujudkan sistem dan iklim pendidikan yang demokratis dan berkualitas; menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya bangsa, menjadi sumber kearifan dalam bertindak; menerapkan pelaksanaan manajemen berbasis kompetensi, baik di jalur sekolah maupun luar sekolah dalam rangka melibatkan seluruh warga masyarakat dan kelompok lain yang terkait dengan Dinas Pendidikan; menumbuhkan semangat keunggulan dan kemandirian dalam rangka menuju sumber daya manusia yang profesional.

3. Dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada regulasi dan dokumen perencanaan strategis pada tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dan disesuaikan pula dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam dokumen tersebut juga terdapat penjabaran tugas dan fungsi masing-masing pengurus yang tersusun dalam bagan organisasi Dinas pendidikan Kabupaten Klaten.

4. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Sosialisasi Gender

Pada pencermatan dokumen laporan pertanggungjawaban kegiatan gender yakni sosialisasi yang telah dilakukan bahwa dari data LPJ kegiatan tersebut telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi gender pada sejumlah 13 sekolah/lembaga dengan sasaran yakni wilayah kecamatan Prambanan Klaten. Tiga belas sekolah/lembaga tersebut adalah SDN 1 Prambanan, SDN 1 Brajan, SDN 1 Randusari, SDN 1 Joho, SDN 1Cucukan, SDN 1 Kebondalem Lor, SDN 1 Sengon, PAUD Taji, TK Pertiwi Tlogo, TK Pertiwi 1 Brajan, SMPN 1 Prambanan, SMAN 1 Prambanan dan PKBM Cipta Karya Prambanan. Kegiatan sosialisasi diberikan oleh kepala sekolah dan koordinator dari masing-masing sekolah/lembaga. Dari data laporan tersebut terdapat kebijakan yang telah dirumuskan oleh Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan gender. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut kelompok sasaran sosialisasi diberikan materi serta pengarahan terkait gender.

# DOKUMENTASI FOTO

**1. Foto Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten**



...aten Klaten

**2.**



Gambar 2. Papan Nama TK Pertiwi Tlogo



ra dengan kepala sekolah

3.



Gambar 4. Papan nama SD N 1 Prambanan Klaten



1 melakukan wawancara

4.



Gambar 6. Papan nama SMP N 1 Prambanan Klaten



h setelah wawancara

5.



Gambar 8. Lobby SMA N 1 Prambanan Klaten





6.



Gambar 10. Papan nama dan foto bersama koordinator PKBM Cipta Karya setelah wawancara

# SURAT KEPUTUSAN

**INSTRUKSI PRESIDEN  
NO. 9 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang:**

Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional;

Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden.

**Mengingat:**

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (L.N. RI Tahun 1984 No. 29, T.L.N. No. 3277);
3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (L.N. RI Tahun 1999 No. 60, T.L.N. No. 3839);
4. Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (L.N Tahun 1999 No. 72, T.L.N. No. 3848);
5. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (L.N.Tahun 2000 No. 206).

## **MENGINSTRUKSIKAN**

Kepada:

- Menteri;
- Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
- Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara;
- Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
- Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Gubernur;
- Bupati/ Walikota;

Untuk:

### **PERTAMA**

Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

### **KEDUA**

Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.

### **KETIGA**

Menteri Pemberdayaan Perempuan:

- Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden.

### **KEEMPAT**

Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

**KELIMA**

Instruksi Presiden ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Desember 2000

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**ABDURRAHMAN WAHID**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

ttd.

Eddy Sudibyo

SALINAN

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 84 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER  
BIDANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam pembangunan pendidikan;
  - b. bahwa kegiatan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh semua unit kerja yang ada di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
  - c. bahwa untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan secara terpadu dan terkoordinasi, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2006;
  4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya.
- (2) Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dilaksanakan dengan menggunakan pedoman pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Satuan unit kerja pendidikan yang terbukti menyelenggarakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2008

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

TTD.

**BAMBANG SUDIBYO**

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional.

TTD.

**Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM**  
NIP 131661823



SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 84 TAHUN 2008 TANGGAL 23 DESEMBER 2008

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER  
BIDANG PENDIDIKAN

**A. PENGANTAR**

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional menginstruksikan agar setiap institusi pemerintah melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pembangunan.

Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan agar lebih menjamin semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif, dan mempunyai kontrol serta mendapat manfaat dari pembangunan pendidikan, sehingga laki-laki dan perempuan dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.

Secara nasional dalam hal akses penduduk laki-laki dan perempuan sudah memiliki peluang yang hampir setara untuk mendapatkan layanan pendidikan. Namun demikian kesenjangan gender masih terjadi di beberapa daerah, disamping kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara daerah perkotaan dan perdesaan. Proses pembelajaran perlu ditingkatkan agar sepenuhnya responsif gender yang antara lain ditunjukkan oleh (i) materi bahan ajar yang pada umumnya masih bias gender; (ii) proses pembelajaran di kelas yang belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif secara seimbang antara siswa laki-laki dan perempuan; dan (iii) lingkungan fisik sekolah yang belum menjawab kebutuhan spesifik anak laki-laki dan perempuan. Disamping itu pengelolaan pendidikan juga perlu dilaksanakan kearah adil gender atau memberikan peluang yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Sehubungan dengan itu untuk mendukung pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan diperlukan Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan. Pedoman ini merupakan acuan bagi semua pihak yang melaksanakan pembangunan pendidikan, baik yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional maupun yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam melaksanakan PUG bidang pendidikan. Melalui PUG Bidang Pendidikan ini diharapkan seluruh aspek pembangunan pendidikan menjadi

responsif gender dan lebih menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif secara seimbang, memiliki kontrol yang sama terhadap sumber-sumber pembangunan, menikmati manfaat yang sama dari hasil pembangunan pendidikan.

#### **B. PENGERTIAN**

Beberapa pengertian yang terkait dengan peraturan ini adalah:

1. Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut PUG Pendidikan adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
5. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
6. Perencanaan Pendidikan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki di bidang pendidikan.
7. Anggaran Pendidikan Berperspektif Gender (*Gender Budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan.
8. Dinas Pendidikan adalah satuan kerja pemerintah daerah bidang pendidikan yang berada di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.
9. Kantor Cabang Dinas Pendidikan adalah perangkat dinas pendidikan yang berada di tingkat kecamatan.

10. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal dan nonformal yang berada di seluruh Indonesia.
11. Penggerak Kegiatan PUG Bidang Pendidikan adalah aparatur dinas pendidikan dan satuan pendidikan yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
12. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Pokja PUG Pendidikan adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga pendidikan.

#### **C. TUJUAN**

Pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan bertujuan :

1. memberikan acuan bagi para pemegang kebijakan dan pelaksana pendidikan dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan;
2. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
3. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender pada satuan pendidikan dan masyarakat;
4. mewujudkan pengelolaan anggaran pendidikan yang responsif gender;
5. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan.

#### **D. PERENCANAAN**

Perencanaan pendidikan yang responsif gender mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Unit kerja pusat dan dinas pendidikan serta satuan pendidikan kewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Pendidikan Nasional, Rencana Strategis Dinas Pendidikan, serta Rencana Kerja Satuan Pendidikan.
2. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada point (1) dilakukan melalui analisis gender.
3. Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam point (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.



4. Analisis gender terhadap rencana kerja dilakukan oleh masing-masing lembaga yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMN, RPJMD dan Renstra dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
6. Dinas Pendidikan mengkoordinasikan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan berperspektif gender.
7. Rencana Kerja Dinas Pendidikan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada point (6) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

#### **E. PELAKSANAAN**

Pelaksanaan pendidikan yang responsif gender pada berbagai tingkatan adalah sebagai berikut:

##### **a. Pelaksanaan di Provinsi**

1. Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender bidang pendidikan.
2. Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada point (1) dibantu oleh kepala dinas pendidikan.
3. Gubernur menetapkan dinas pendidikan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di provinsi.
4. Dalam upaya percepatan pelemagaan pengarusutamaan gender di dinas pendidikan provinsi dibentuk Pokja PUG Bidang Pendidikan di provinsi.
5. Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala unit kerja di bawah dinas pendidikan dan atau yang mempunyai hubungan dengan bidang pendidikan di provinsi serta ketua lembaga lainnya yang dianggap relevan dengan program PUG Pendidikan.
6. Pembentukan Pokja PUG Bidang Pendidikan di provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
7. Pokja PUG Provinsi sebagaimana dimaksud dalam point (6) mempunyai tugas :
  - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG Bidang Pendidikan kepada unit kerja terkait;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG Bidang Pendidikan kepada pemerintah kabupaten/kota;
  - c. menyusun program kerja setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
  - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG Bidang Pendidikan setiap tahun;
  - f. bertanggung jawab kepada Gubernur melalui kepala dinas pendidikan;

## **F. PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

### **Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dan Evaluasi dilakukan melalui mekanisme:

1. Ketua Pokja PUG Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan.
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada point (1) dilakukan pada setiap unit kerja dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
4. Pokja PUG Depdiknas melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan berdasarkan RPJMD dan Renja Dinas Pendidikan.
5. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
6. Hasil evaluasi pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

### **Mekanisme Pelaporan**

1. Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Bupati/Wali Kota.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Gubernur.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Ketua Pokja PUG Depdiknas dengan tembusan Menteri Pendidikan Nasional.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan satuan pendidikan.

### **Materi Laporan meliputi :**

1. Pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Sasaran kegiatan;
4. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
5. Permasalahan yang dihadapi; dan
6. Upaya yang telah dilakukan.

#### **G. PEMBINAAN**

1. Menteri Pendidikan Nasional melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan yang meliputi :
  - a. pemberian pedoman dan panduan;
  - b. penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
  - c. penguatan kapasitas Tim Teknis Analisis PUG, Pokja PUG Bidang Pendidikan provinsi, kabupaten dan kota;
  - d. pemantauan pelaksanaan PUG antar susunan pemerintahan;
  - e. evaluasi pelaksanaan PUG;
  - f. pemberian Pedoman Penilaian Pelaksanaan PUG (gender audit); dan
  - g. penyusunan indikator pencapaian kinerja PUG.
2. Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada point (1) dilaksanakan oleh Pejabat Eselon I yang menangani program PUG Bidang Pendidikan di Depdiknas;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan yang meliputi:
  - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan skala Provinsi;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di kabupaten/kota;
  - d. peningkatan kapasitas Penggerak Kegiatan PUG dan Pokja PUG Bidang Pendidikan; dan
  - e. strategi pencapaian kinerja.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan yang meliputi :
  - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten/kota dan satuan pendidikan;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di satuan pendidikan dan pada unit kerja di kabupaten/kota;
  - d. peningkatan kapasitas Penggerak Kegiatan PUG dan Pokja PUG; dan
  - e. strategi pencapaian kinerja.

#### **H. PENDANAAN**

1. Untuk mendukung program diperlukan anggaran yang memadai yang dialokasikan pada masing-masing unit kerja/satuan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Anggaran yang responsif gender diarahkan untuk (a) membiayai program, proyek, dan kegiatan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki, dan (b) dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan praktis dan atau kebutuhan strategis gender yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki.
3. Pembiayaan untuk pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan dapat bersumber dari :
  - a. Pemerintah  
Baik melalui APBN maupun APBD
  - b. Non Pemerintah  
Yang dimaksud dengan sumber dana Non Pemerintah adalah sumber dana lain dari luar APBD dan APBN yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalkan dukungan dana dari donor, individu, perusahaan atau dari organisasi-organisasi sosial/kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap persoalan pencegahan tindak pidana perdagangan orang baik dari dalam maupun luar negeri.

#### I. PENUTUP

Dengan disusunnya pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan ini diharapkan pelaksanaan masing-masing kelompok kerja PUG Eselon I dan unit lainnya dapat dengan mudah melakukan pengarusutamaan gender pada unit kerjanya dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sehingga dimasa yang akan datang Departemen Pendidikan Nasional dapat mengidentifikasi dan menganalisis seluruh kebijakan, program, kegiatannya telah responsif gender. Dengan demikian pembangunan sektor pendidikan dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Departemen Pendidikan Nasional.

TTD.

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM  
NIP 131661823





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Pemuda Selatan 151, Telp. (0272) 321780, Fax. 320575, Klaten

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.1 / 5314 / 11**

**TENTANG**

**PETUGAS PENDAFTARAN, NARASUMBER DAN PENYUSUN MAKALAH  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL  
PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
TAHUN 2013**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Pengerusutamaan Gender, bagi pendidik dari jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/MA/SMK, Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten perlu adanya Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pengerusutamaan Gender;
  - b. bahwa dalam rangka menindak lanjuti perihal tersebut diatas perlu adanya Petugas Pendaftaran, Narasumber, dan Penyusun Makalah pada Kegiatan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pengerusutamaan Gender, di Kabupaten Klaten Tahun 2013;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas);
  3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005;
  5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950;
  7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
  8. Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa yang dibiayai APBD Kabupaten Klaten Tahun 2008;
  9. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
  10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2013;



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan Petugas Pendaftara, Narasumber dan Penyusun Makalah pada Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pengarusutamaan Gender Kabupaten Klaten Tahun 2013 sebagaimana tersebut pada lampiran dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan Pengarusutamaan Gender pada APBD II Kabupaten Klaten Tahun 2013;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai berakhirnya kegiatan ini;

Apabila terjadi kesalahan pada Keputusan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya

ditetapkan di : Klaten  
pada tanggal : 2 Desember 2013

  
**Drs. PANTORO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610205 198012 1 003

# SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281  
Telp (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 540611; Dekan Telp. (0274) 520094  
Telp. (0274) 586168 Psw. (221, 223, 224, 295, 344, 345, 366, 368, 369, 401, 402, 403, 417)



Certificate No. QSC 00687

No. : 3503 /UN34.11/PL/2014  
Lamp. : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan izin Penelitian

5 Mei 2014

Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Klaten  
Jl. Pemuda Tengah No.56 Klaten  
Jawa Tengah

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : Firdaus Malaya Dewi  
NIM : 10110241017  
Prodi/Jurusan : Kebijakan Pendidikan/FSP  
Alamat : Jl. Pemuda Selatan No 151, Kabupaten Klaten 57424

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan izin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi  
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten  
Subyek : Kepala Dinas, Kepala sekolah  
Obyek : Pelaksanaan Kebijakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan  
Waktu : Mei - Juli 2014  
Judul : Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Maryanto, M. Pd.

NIP 19600902 198702 1 001

Tembusan Yth:

1. Rektor ( sebagai laporan)
  2. Wakil Dekan I FIP
  3. Ketua Jurusan FSP FIP
  4. Kabag TU
  5. Kasubbag Pendidikan FIP
  6. Mahasiswa yang bersangkutan
- Universitas Negeri Yogyakarta



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**(BAPPEDA)**

Jl. Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272)321046 Psw 314-318 Faks 328730  
KLATEN 57424

Nomor : 072/548/V/2014  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Klaten, 7 Mei 2014  
Kepada Yth.  
Ka. Dinas Pendidikan Kab. Klaten  
Di -

KLATEN

Menunjuk Surat dari Dekan Fak. Ilmu Pendidikan UNY No. 3503/UN34.11/PL/2014 Tgl 5 Mei 2014 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan hormat kami beritahukan bahwa di Wilayah/Instansi Saudara akan dilaksanakan Penelitian oleh

Nama : Firdaus Malaya Dewi  
Alamat : Karangmalang, Yogyakarta  
Pekerjaan : Mahasiswa UNY  
Penanggungjawab : Dr. Haryanto, M.Pd..  
Judul/topik : Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten  
Jangka Waktu : 3 Bulan (7 Mei s/d 7 Agustus 2014)  
Catatan : Menyerahkan Hasil Penelitian Berupa **Hard Copy** Dan **Soft Copy** Ke Bidang PEPP/Litbang BAPPEDA Kabupaten Klaten

Besar harapan kami, agar berkenan memberikan bantuan seperlunya.

An. BUPATI KLATEN  
Kepala BAPPEDA Kabupaten Klaten  
Ub. Sekretaris

  
Hari Budiono, SH  
Pembina Tingkat I

NIP. 19611003 198812 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Klaten
2. Dekan Fak. Ilmu Pendidikan UNY
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda Selatan 151, Telp. (0272) 321780, Fax. 320575, Klaten

Klaten, 28 Mei 2014

Nomor : 421.1 / 1744.111  
Lamp. : 1lembar  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth. :

1. Kepala UPTD Pendidikan  
Kecamatan Prambanan
2. Kepala SMPN 1 Prambanan
3. Kepala SMAN 1 Prambanan

Menindaklanjuti surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) Kabupaten Klaten Nomor 072/548/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Perihal tersebut diatas maka kami minta bantuan Bapak/Ibu Kepala Sekolah yang kami tunjuk untuk membantu program PUG dalam penelitian dan Implentasinya di Sekolah Saudara ( terlampir ) oleh :

Nama : Firdaus Malaya Dewi  
Alamat : Karangmalang , Yogyakarta  
Pekerjaan : Mahasiswa UNY  
Penanggungjawab : Dr. Haryanto, M.Pd.  
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan  
Gender ( PUG ) Bidang Pendidikan di Dinas  
Pendidikan Kabupaten Klaten

Adapun waktu dan bentuk kegiatannya agar menyesuaikan dan tidak mengganggu jam belajar mengajar.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten

Drs. PANTORO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP 19610205 198012 1 003

**PENERIMA DANA PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL  
PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KEGIATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER ( PUG )  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**

| NO | NAMA                  | SEKOLAH                    |
|----|-----------------------|----------------------------|
| 1  | Tribekti              | SDN 1 Prambanan            |
| 2  | Najmu Munawaroh W     | SDN 1 Brajan               |
| 3  | Suwarni, S.Pd         | SDN 1 Randusari            |
| 4  | Sulasmu, S.Pd         | SDN 1 Joho                 |
| 5  | Ester Lely Susilo     | SDN 1 Cucukan              |
| 6  | Tri Suhartini, S.Pd   | SDN 1 Kebondalem Lor       |
| 7  | Triningsih            | SDN 1 Sengon               |
| 8  | Sendang Wahyuningrum  | PAUD Taji                  |
| 9  | Sri Sudiyati          | TKP Tiogo                  |
| 10 | Sugini                | TKP 1 Brajan               |
| 11 | M.Suryoto, S.Pd, M.Pd | SMPN 1 Prambanan           |
| 12 | Drs. Suwito           | SMAN 1 Prambanan           |
| 13 | Suwanto               | PKBM Cipta Karya Prambanan |

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten,



**DT. PANTORO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610205 198012 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PRAMBANAN**  
**TK PERTIWI TLOGO**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 83/TK/P/TL/IX/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala TK Pertiwi Tlogo menerangkan bahwa :

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Nama                     | : FIRDAUS MALAYA DEWI           |
| Tempat dan tanggal lahir | : Klaten, 2 Maret 1991          |
| NIM                      | : 10110241017                   |
| Program Studi            | : Kebijakan Pendidikan          |
| Universitas              | : Universitas Negeri Yogyakarta |

Nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di TK Pertiwi Tlogo pada tanggal 11 Juni 2014 dengan judul penelitian **"Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten"**.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya, kemudian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Prambanan, 25 September 2014



Srs. Sudiyati

NIP. 19590707 198103 2 013



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS PENDIDIKAN  
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PRAMBANAN  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PRAMBANAN**  
Jl. Yogya-Solo Km.17 Prambanan Klaten Telp. 08282512063

**SURAT KETERANGAN**

No : 057/Sdn.1.Prb/IX/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TRIBEKTI SITYASTUTI,S.Pd**  
NIP : 19580301 197802 2 004  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Kerja : SD Negeri 1 Prambanan

Menerangkan bahwa :

Nama : **FIRDAUS MALAYA DEWI**  
Tempat dan tanggal lahir : Klaten, 2 Maret 1991  
NIM : 10110241017  
Program Studi : Kebijakan Pendidikan  
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di SD Negeri 1 Prambanan dengan judul penelitian "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten" pada tanggal 31 Mei 2014.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya, kemudian agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya .

Prambanan, 17 September 2014  
Kepala Sekolah  
  
**TRIBEKTI SITYASTUTI,S.Pd**  
NIP. 19580301 197802 2 004





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SMP NEGERI 1 PRAMBANAN KLATEN**  
**SEKOLAH STANDAR NASIONAL ( SSN )**

Jl. Raya Solo – Yogya Km. 47 Kongklangan, Sanggrahan, Prambanan, Klaten 57454  
Telp Fax ( 0274 ) 496920

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 070/ 182 / 13**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Suryoto, S.Pd.M.Pd:  
NIP : 19601204 198303 1 007  
Pangkat gol Ruang : Pembina Gol.IV/a  
Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : **Firdaus Malaya Dewi**  
N I M : 10110241017  
Fakultas : Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta  
Jurusan : FSP Kebijakan Pendidikan  
Semester : VIII( Delapan )

Yang bersangkutan telah melaksanakan kerja praktek penelitian di SMP Negeri 1 Prambanan, Klaten tanggal 10 Juni 2014

Dengan judul : **" Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan kabupaten klaten "**

Surat Keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dibuat : Di Prambanan  
Tanggal : 17 September 2014.

KEPALA SEKOLAH  
  
M Suryoto, S.Pd.M.Pd  
NIP : 19601204 198303 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS PENDIDIKAN  
**SMA NEGERI 1 PRAMBANAN**

Jl. Manisrenggo - Prambanan - Klaten  
Kode : Pos 57454 Telp. (0274) 497549 Email : sman1prambanan@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 421.3/1191 /014 / 14

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SMA Negeri 1 Prambanan Klaten menerangkan bahwa :

Nama : FIRDAUS MALAYA DEWI  
Tempat, Tgl Lahir : Klaten, 2 Maret 1991  
Alamat : Sendangan, Mojayan, Klaten  
Nomor Mahasiswa : 10110241017  
Prodi/Jurusan : FSP Kebijakan Pendidikan  
Dosen Pengampu : Dr. Mami Hajaroh, M.Pd

Telah melaksanakan Penelitian di SMA Negeri 1 Prambanan Klaten pada tanggal 7 Juli 2014. Hasil Penelitian tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi Tugas Akhir / Skripsi yang berjudul " **Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten** ".

Demikian keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan semestinya.



Prambanan, 17 September 2014  
Kepala Sekolah

Suharja, M.Pd, M.Si  
NIP. 19611106111994121001